



BUKU 1

Katalog BPS: 5106023

ANALISIS TEMATIK ST2013 SUBSEKTOR
**TRANSFORMASI
STRUKTURAL
USAHATANI DAN PETANI
INDONESIA**

st2013
SENSUS PERTANIAN



BADAN PUSAT STATISTIK



MB-IPB

Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

ANALISIS TEMATIK ST2013 SUBSEKTOR

TRANSFORMASI STRUKTURAL USAHA TANI DAN PETANI INDONESIA



© Badan Pusat Statistik

**Analisis Tematik ST2013 Subsektor
Transformasi Struktural Usahatani dan Petani Indonesia**

ISBN : 978-979-064-870-8
No. Publikasi : 07310.1510
Katalog BPS : 5106023

Diproduksi : © Badan Pusat Statistik
Pengaruh : Dr. Suhariyanto, Dr. Adi Lumaksono, MA
Penanggung jawab : Dr. Margo Yuwono, S.Si., M.Si.
Editor : Dr. Margo Yuwono, S.Si., M.Si.
Penulis : Dr. Ir. Arif Daryanto, M.Ec., Dr. Ir. Idqan Fahmi, M. Ec,
Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS, Dr. Alla Asmara, S. Pt, M.Si,
Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si, Drs. Yudha Heryawa Asnawi, MM,
Suhendi, SP, MM.
Asisten : Zenal Asikin, SE, Siti Devi Fadillah, SE, Gunawan SP, Elsa Firyanza, SP, Sulistiyo, A.Md.
Desain : Rizal Herwin Wibowo, A.Md. Des, Zukha Latifah, S.St., Adi Nugroho, SST
Dicetak Oleh :

Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015
xvi + 103 halaman; 17,6 x 25 cm

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar



Badan Pusat Statistik (BPS) telah mempublikasikan tiga buku analisis hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013), yaitu: Potensi Pertanian Indonesia yang merupakan hasil analisis hasil pencacahan lengkap tahun 2013; Analisis Sosial Ekonomi Petani di Indonesia yang disusun berdasarkan hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian (SPP) 2013; dan Analisis Kebijakan Pertanian: Implementasi dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani dari Perspektif Sensus Pertanian 2013 yang memanfaatkan hasil Pencacahan Lengkap Rumah Tangga Usaha Pertanian dan SPP. Publikasi tersebut mempublikasikan hasil analisis Sensus Pertanian yang bersifat umum.

Dalam rangka mendapatkan analisis lebih mendalam lagi dan bersifat komprehensif, disusunlah publikasi Transformasi Struktural Usahatani dan Petani Indonesia yang bertujuan menggambarkan keragaan usahatani dan karakteristik petani, menganalisa transformasi struktural usahatani dan petani, menganalisa determinan utama transformasi struktural usahatani dan petani, serta merumuskan implikasi kebijakan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para peneliti dari Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor atas kerja samanya dalam melakukan penelitian, serta semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan ST2013 hingga tersusunnya buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada segenap pengguna.

Jakarta, Desember 2015

Kepala Badan Pusat Statistik

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suryamin'.

Dr. Suryamin

Kata Pengantar



Kajian ini dilatarbelakangi bahwa Indonesia, sebagaimana banyak negara lain, mengalami perubahan struktural ekonomi dari waktu ke waktu. Bagaimana transformasi terjadi dan apa yang menjadi determinannya perlu dikaji agar transformasi yang terjadi dapat dipahami dan transformasi di masa yang akan datang dapat diantisipasi dan diarahkan ke arah yang lebih sesuai dengan yang diharapkan. Keberadaan data hasil Sensus Pertanian 2013 memungkinkan untuk melihat transformasi yang terjadi pada usahatani maupun petani Indonesia dibandingkan dengan 10 tahun lalu (Sensus Pertanian 2003).

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih saran dan pemikiran dalam menentukan arah dan strategi kebijakan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas ke arah yang lebih baik, sehingga sektor pertanian dalam arti luas mampu menjadi katalis bagi terciptanya pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Apresiasi kami haturkan kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan saran dan masukan kepada tim penulis. Namun demikian, terlepas dari masukan berbagai pihak, segala kekurangan tetap menjadi tanggung jawab tim penulis. Semoga hasil kajian ini bermanfaat.

Bogor, Desember 2015
Direktur Program Pascasarjana Manajemen dan
Bisnis
Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang dan Permasalahan	3
1.2. Tujuan.....	7
II. TRANSFORMASI STRUKTURAL: SEBUAH TINAJUAN PUSTAKA	9
2.1. Definisi Transformasi Struktural	11
2.2. Perkembangan Teori Transformasi Struktural	11
2.3. Proses Transformasi Struktural	12
III. METODOLOGI.....	15
3.1. Kerangka Pemikiran Konseptual.....	17
3.2. Jenis dan Sumber data	18
3.3. Metode Analisis Data	18
IV. TRANSFORMASI STRUKTURAL USAHATANI DAN PETANI INDONESIA	21
4.1. Transformasi Perekonomian Makro	23
4.1.1. Transformasi PDB dan PDRB Sektor Pertanian	23
4.1.2. Transformasi PDB dan PDRB Intersubsektor Pertanian	25
4.2. Transformasi Karakteristik Usahatani	27
4.2.1. Proporsi Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga Usaha Pertanian	27
4.2.2. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian	30
4.2.3. Struktur Ongkos Usahatani	36
4.3. Transformasi Karakteristik Rumah Tangga Usaha Pertanian	38
4.3.1. Proporsi Rumah Tangga Pertanian Terhadap Rumah Tangga Keseluruhan	38
4.3.2. Proporsi Rumah Tangga Usaha Pertanian Terhadap Rumah Tangga Keseluruhan.....	39
4.3.3. Proporsi Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan Terhadap Rumah Tangga Keseluruhan.....	41
4.3.4. Proporsi Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem Terhadap Rumah Tangga Keseluruhan.....	43
4.3.5. Proporsi Rumah Tangga Usaha Pertanian Persubsektor	46

4.3.6. Proporsi ART Petani, ART Buruh di Sektor Pertanian dan di luar Sektor Pertanian	48
4.3.7. Proporsi Anggota Rumah Tangga \geq 10 tahun yang Menjadi Petani Berdasarkan Tingkat Usia	50
4.3.8. Proporsi Anggota Rumah Tangga \geq 10 tahun yang Menjadi Buruh di sektor Pertanian Berdasarkan Tingkat Usia.....	51
4.3.9. Proporsi Anggota Rumah Tangga \geq 10 tahun yang Menjadi Petani Berdasarkan Tingkat Pendidikan	53
4.3.10. Proporsi Anggota Rumah Tangga \geq 10 tahun yang Menjadi Buruh di sektor Pertanian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	55
V. DETERMINAN TRANSFORMASI STRUKTURAL USAHATANI DAN PETANI INDONESIA	57
5.1. Pengantar.....	59
5.2. Hasil Estimasi.....	60
5.2.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transformasi Struktural Perekonomian Makro	60
5.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transformasi Struktural Usahatani	62
5.2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transformasi Struktural Petani atau Rumah Tangga Usaha Pertanian	63
VI. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	65
VII. DAFTAR PUSTAKA	69

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Pangsa Agribisnis GDP di Beberapa Negara Maju dan Berkembang (persen), 1998	4
Tabel 1.2.	<i>Share</i> PDB Sektor Ekonomi Terhadap PDB Indonesia dan <i>Share</i> Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Terhadap Total Tenaga Kerja, 2003-2014.....	5
Tabel 1.3.	Pendapatan per Kapita Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2004-2014.....	6
Tabel 4.1.	Tingkat Signifikansi Hasil Uji Beda Struktur PDRB Sektor Pertanian, 2003 dan 2013	27
Tabel 4.2.	Tingkat Signifikansi Hasil Uji Beda Rumah Tangga Usaha Pertanian Berdasarkan Subsektor Menurut Sumber Penghasilan, 2004 dan 2014.....	29
Tabel 4.3.	Struktur Pendapatan RTUP Nasional Berdasarkan Subsektor Pertanian, 2004 dan 2014.....	34
Tabel 4.4.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Provinsi, 2003 dan 2013.....	40
Tabel 4.5.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan Menurut Provinsi, 2003 dan 2013.....	42
Tabel 4.6.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem Menurut Provinsi, 2003 dan 2013.....	44
Tabel 4.7.	Tingkat Signifikansi Hasil Uji Beda RTP, RTUP, RTP Pengguna Lahan, RTP Gurem Terhadap Rumah Tangga keseluruhan, 2003 dan 2013.....	45
Tabel 4.8.	Tingkat Signifikansi Hasil Uji Beda Rumah Tangga Usaha Pertanian per Subsektor, 2003 dan 2013	47
Tabel 4.9.	Tingkat Signifikansi Hasil Uji Beda ART Petani Buruh di Sektor Pertanian dan di Luar Sektor Pertanian, 2004 dan 2014	49
Tabel 4.10.	Tingkat Signifikansi Hasil Uji Beda Anggota Rumah Tangga yang Menjadi Petani Berdasarkan Tingkat Usia, 2004 dan 2014.....	51
Tabel 4.11.	Tingkat Signifikansi Hasil Uji Beda Anggota Rumah Tangga yang Menjadi Buruh Sektor Pertanian Berdasarkan Tingkat Usia, 2004 dan 2014.....	53
Tabel 4.12.	Tingkat Signifikansi Hasil Uji Beda Anggota Rumah Tangga yang Menjadi Petani Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2004 dan 2014.....	54
Tabel 4.13.	Tingkat Signifikansi Hasil Uji Beda Anggota Rumah Tangga yang Menjadi Buruh Sektor Pertanian Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2004 dan 2014.....	56
Tabel 5.1.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Proporsi PDRB Sektor Pertanian	61
Tabel 5.2.	Faktor-faktor yang mempengaruhi Transformasi (Perubahan Proporsi) Rumah Tangga Petani yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Subsektor Padi dan Palawija	62
Tabel 5.3.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transformasi (Perubahan Proporsi) Anggota Rumah Tangga Petani yang Menjadi Petani	63
Tabel 5.4.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Anggota Rumah Tangga Usaha Pertanian.....	64

Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Proses Transformasi Struktural Ekonomi	14
Gambar 3.1.	Kerangka Pemikiran Konseptual	18
Gambar 4.1.	Struktur PDB menurut Sektor 2003 dan 2013	24
Gambar 4.2.	Korelasi antara Penurunan Pangsa Pertanian dengan Penurunan Kemiskinan	24
Gambar 4.3.	Proporsi PDRB Sektor Pertanian Menurut Koridor Ekonomi, 2003 dan 2013	25
Gambar 4.4.	Struktur PDB Sektor Pertanian, 2003 dan 2013	26
Gambar 4.5.	Struktur PDRB Pertanian Menurut Koridor Ekonomi, 2003 dan 2013	27
Gambar 4.6.	Perubahan Proporsi RTUP Menurut Sumber Penghasilan (persen), 2013	28
Gambar 4.7.	Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian Berdasarkan Subsektor Menurut Sumber Penghasilan (Persen), 2004 dan 2014	29
Gambar 4.8.	Proporsi Jenis Kegiatan Terhadap Pendapatan RTUP, 2004 dan 2014.....	30
Gambar 4.9.	Rata-rata Pendapatan RTUP Berdasarkan Sumber Pendapatan, 2004 dan 2014	31
Gambar 4.10.	Perubahan Proporsi Rata-rata Pendapatan RTP Selama 1 Tahun yang Lalu, 2004 dan 2014	31
Gambar 4.11.	Proporsi Rata-rata Pendapatan Anggota Rumah Tangga Pertanian Sebagai Buruh Selama Setahun yang Lalu, 2004 dan 2014	32
Gambar 4.12.	Proporsi Rata-rata Pendapatan Anggota Rumah Tangga Pertanian Sebagai Buruh dari Sektor Pertanian dan Luar Sektor Pertanian Tahun 2004 dan 2014	33
Gambar 4.13.	Proporsi Rata-Rata Pendapatan RTUP dari Sektor Pertanian Selama Setahun yang Lalu, 2004 dan 2014	35
Gambar 4.14.	Proporsi Rata-rata pendapatan RTUP dari Luar Sektor Pertanian Selama Satu Tahun yang Lalu, 2004 dan 2014.....	36
Gambar 4.15.	Penerimaan dan Biaya Usahatani Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura, 2004 dan 2014	37
Gambar 4.16.	Struktur Ongkos Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura, 2004 dan 2014	38
Gambar 4.17.	Persentase Rumah Tangga Pertanian Terhadap Rumah Tangga Keseluruhan, 2004 dan 2014	39
Gambar 4.18.	Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian Terhadap Rumah Tangga Keseluruhan, 2003 dan 2013	41
Gambar 4.19.	Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan Terhadap Rumah Tangga Keseluruhan, 2003 dan 2013	43
Gambar 4.20.	Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem Terhadap Rumah Tangga Keseluruhan, 2003 dan 2013	45
Gambar 4.21.	Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian per Subsektor, 2003 dan 2013 .	47

Gambar 4.22. Persentase Anggota Rumah Tangga Menjadi Petani, Anggota Rumah Tangga Menjadi Buruh di Sektor Pertanian dan di Luar Sektor Pertanian, 2004 dan 2014	49
Gambar 4.23. Persentase Anggota Rumah Tangga yang Menjadi Petani Berdasarkan Tingkat Usia, 2004 dan 2014.....	51
Gambar 4.24. Persentase Anggota Rumah Tangga yang Menjadi Buruh Sektor Pertanian Berdasarkan Tingkat Usia, 2004 dan 2014.....	52
Gambar 4.25. Persentase Anggota Rumah Tangga yang Menjadi Petani Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2004 dan 2014.....	54
Gambar 4.26. Persentase Anggota Rumah Tangga yang Menjadi Buruh Sektor Pertanian Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2004 dan 2014.....	55

<http://www.bps.go.id>

Ringkasan Eksekutif

Indonesia, sebagaimana banyak negara lain, mengalami perubahan struktural ekonomi dari waktu ke waktu. Bagaimana transformasi terjadi dan apa yang menjadi determinannya perlu dikaji agar transformasi yang terjadi dapat dipahami dan transformasi di masa yang akan datang dapat diantisipasi dan diarahkan ke arah yang lebih sesuai dengan yang diharapkan. Keberadaan data hasil Sensus Pertanian 2013 memungkinkan untuk melihat transformasi yang terjadi pada usahatani maupun petani Indonesia dibandingkan dengan 10 tahun lalu (Sensus Pertanian 2003).

Kajian ini bertujuan untuk (1) menggambarkan keragaan usahatani dan karakteristik petani Indonesia, (2) menganalisa transformasi struktural perekonomian makro, usahatani dan petani Indonesia, (3) menganalisa determinan utama transformasi struktural perekonomian makro, usahatani dan petani Indonesia, dan (4) merumuskan implikasi kebijakan.

Transformasi struktural perekonomian makro pada sektor pertanian diproksi dengan PDRB sektor pertanian. Transformasi struktural tersebut diduga sebagai resultanta dari transformasi yang terjadi pada usahatani dan petani (faktor internal). Transformasi struktural juga diduga dipengaruhi faktor eksternal yaitu PDRB sektor ekonomi lainnya. Analisis transformasi struktural usahatani dan petani Indonesia dimulai dengan menganalisis karakteristik usahatani dan petani Indonesia. Transformasi struktural petani diduga tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik petani, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik usahatani, begitu juga sebaliknya. Selain data makro, data Sensus Pertanian 2013 dan 2003 digunakan untuk melihat transformasi struktural dan determinannya.

Berdasarkan hasil analisis uji beda dengan tingkat signifikansi 0,1 (10 persen) menunjukkan bahwa proporsi PDRB pertanian menurun signifikan di wilayah Jawa, Sulawesi dan Maluku-Papua. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa perubahan arah struktur PDB sektor pertanian tidak selalu searah dengan perubahan struktur PDRB di masing-masing wilayah.

Analisis terhadap proporsi struktur PDRB subsektor pertanian menunjukkan bahwa *pertama*, proporsi PDRB tanaman pangan, secara umum tidak mengalami perubahan signifikan, kecuali di Jawa yang menurun signifikan. *Kedua*, proporsi PDRB perkebunan meningkat signifikan di Sumatera dan Kalimantan. *Ketiga*, proporsi PDRB peternakan meningkat signifikan di Bali-Nusra, Kalimantan dan Sulawesi. *Kelima*, proporsi PDRB

kehutanan menurun signifikan di Sumatera, Kalimantan dan Maluku-Papua. *Keenam*, PDRB perikanan meningkat signifikan di Jawa dan Bali-Nusra. Oleh karena itu subsektor perikanan dapat dijadikan sumber pertumbuhan baru sehingga strategi kebijakan pengembangan perikanan perlu dirancang lebih baik dan semakin dirasakan langsung nelayan, terutama nelayan skala kecil.

Perubahan struktural di sektor pertanian lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal, khususnya pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan dan pertumbuhan subsektor perkebunan ketimbang faktor eksternal yaitu pertumbuhan sektor industri. Pertumbuhan sektor industri belum mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan sektor pertanian. Sektor industri justru menekan pertumbuhan sektor pertanian. Oleh karena itu, pengembangan industri berbasis pertanian dan perdesaan harus menjadi strategi pembangunan ekonomi agar terdapat keterkaitan antara pengembangan sektor pertanian dan sektor industri.

Hasil analisis terhadap struktur ongkos usahatani menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir *revenue cost ratio* (*R/C ratio*) tanaman pangan (padi sawah, padi ladang, jagung dan kedelai) maupun tanaman hortikultura (cabai merah) mengalami penurunan. Pada tahun 2003, komponen biaya terbesar dalam usaha tani pada tanaman pangan serta tanaman hortikultura adalah tenaga kerja, pupuk serta benih. Sebaliknya pada tahun 2013, proporsi biaya benih, pupuk dan pestisida pada struktur ongkos usahatani mengalami penurunan, sedangkan proporsi biaya tenaga kerja dan sewa lahan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kebijakan harga input, harga output, perbaikan infrastruktur dan teknologi pertanian yang lebih inovatif sangat diperlukan. Subsidi input pertanian (pupuk, benih dan pestisida) wajib lebih tepat sasaran agar efisiensi produksi pertanian terjamin.

Dalam sepuluh tahun terakhir, profesi petani semakin kurang diminati. Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya kecenderungan penurunan proporsi rumah tangga petani (RTP) terhadap jumlah rumah tangga keseluruhan. Penurunan signifikan proporsi jumlah RTP terhadap rumah tangga keseluruhan hampir terjadi di seluruh wilayah baik di Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan maupun Sulawesi. Penurunan signifikan proporsi RTP terhadap rumah tangga keseluruhan terbesar terjadi di Kalimantan, dengan penurunan mencapai 8,87 persen.

Penurunan proporsi RTUP terbesar terjadi pada RTUP subsektor hortikultura yang terjadi hampir diseluruh wilayah kecuali Bali-Nusra. Penurunan signifikan juga terjadi pada RTUP subsektor peternakan dan perikanan. Sebaliknya terjadi peningkatan signifikan pada proporsi RTUP subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman kehutanan.

Profesi pekerjaan di sektor pertanian semakin kurang diminati oleh anggota rumah tangga petani. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya proporsi anggota rumah tangga usia di atas 10 tahun yang memilih menjadi petani maupun buruh di sektor pertanian. Pola pergeseran profesi anggota rumah tangga sebagai petani beralih ke buruh luar sektor

pertanian paling banyak terjadi di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sementara itu kenaikan terjadi pada proporsi anggota rumah tangga yang menjadi buruh di luar sektor pertanian.

Proporsi RTP berdasarkan sumber penghasilan utama tidak mengalami perubahan signifikan kecuali di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Di wilayah Kalimantan, perubahan signifikan terjadi pada proporsi RTP yang sumber penghasilan utamanya berasal dari tanaman pangan (padi dan palawija) serta sektor perkebunan, sedangkan di Sumatera perubahan signifikan terjadi pada proporsi RTP yang sumber penghasilan utamanya berasal dari sektor perikanan yang mengalami penurunan signifikan.

Determinan utama transformasi struktural usahatani dan petani Indonesia adalah: *Pertama*, faktor penguasaan lahan dan pendapatan yang mewakili aspek ekonomi. Oleh karena itu peningkatan dan distribusi penguasaan lahan pertanian menjadi faktor penentu keberlanjutan usaha di sektor pertanian, selain pentingnya peningkatan produktivitas petani agar pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian semakin meningkat. *Kedua*, faktor pendidikan yang mewakili aspek sosial. Profesi petani dan sektor pertanian bukan menjadi profesi pilihan utama tetapi pilihan terakhir yang dipilih karena keterpaksaan. Kemampuan dan *skill* yang terbatas, membuat generasi muda (anggota rumah tangga petani) akhirnya menjadi petani atau buruh di sektor pertanian. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijakan yang dapat membawa sektor pertanian menjadi sektor yang “menarik” sebagai sumber penghidupan, misalnya melalui strategi kebijakan ekonomi kreatif dan pembangunan industri pedesaan sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja baru.



1

Pendahuluan

BAB 1

Pendahuluan

“Transformasi struktural ditandai dengan pergeseran tenaga kerja dan investasi dari sektor primer ke sektor sekunder dan yang terakhir ke sektor tersier.”



1.1 Latar Belakang dan Permasalahan

Transformasi struktural merupakan suatu proses yang terjadi pada masa transisi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Para ekonom mengemukakan bahwa transformasi struktural ditandai dengan pergeseran tenaga kerja dan investasi dari sektor primer ke sektor sekunder dan yang terakhir ke sektor tersier. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi struktural dapat dicapai dengan cara: (1) meningkatkan produktivitas pada setiap sektor dan (2) mengalihkan tenaga kerja dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi.

Indonesia, sebagai negara *transforming countries* dicirikan dengan sebagian besar petani menggarap lahan yang sempit (kurang dari 0,86 ha), dan hanya menyediakan sedikit peluang penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan orientasi pembangunan pertanian yang selama ini fokus komoditas yang bernilai rendah (*low-value commodities*) ke komoditas yang bernilai tinggi (*high-value commodities*). Dari pertanian ke agroindustri dan sektor nonpertanian (agribisnis) di perdesaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian, semakin maju suatu negara (semakin tinggi pendapatan per kapitanya), maka sumbangan relatif sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga semakin kecil, sementara pada saat yang sama sumbangan relatif sektor agribisnis (*agro-manufacturing* dan *agroservices*) terhadap PDB semakin besar (Tabel 1.1). Sebagai contoh India

“Indonesia, sebagaimana banyak negara lain, mengalami perubahan struktural ekonomi dari waktu ke waktu.”

yang pendapatan per kapitanya paling rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, sektor pertaniannya mempunyai sumbangan yang paling tinggi, sebesar 27 persen terhadap PDB. Hal yang sama juga untuk negara-negara berkembang seperti Filipina (21 persen), Indonesia (20 persen), dan Malaysia (13 persen). Sebaliknya, Amerika Serikat yang pendapatan per kapitanya paling tinggi, sumbangan sektor pertaniannya paling kecil, sebesar 1 persen terhadap PDB. Begitu juga dengan Korea Selatan yang sumbangan sektor pertaniannya hanya 8 persen. Dari pengalaman negara maju maupun negara berkembang, nilai tambah (*value added*) terbesar dalam sektor agribisnis ternyata berada di bagian hulu dan hilir.

Tabel 1.1.

Pangsa Agribisnis dalam PDB di Beberapa Negara Maju dan Berkembang (Persen), 1998

Negara	Pangsa dalam PDB			Pangsa industri & jasa pertanian dalam agribisnis (3)/(4)
	Pertanian	Industri & Jasa Pertanian	Agribisnis (2) + (3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Filipina	21	50	71	70
India	27	41	68	60
Thailand	11	43	54	79
Indonesia	20	33	53	63
Malaysia	13	36	49	73
Korea Selatan	8	36	44	82
Chili	9	34	43	79
Argentina	10	29	39	73
Brazil	8	30	38	79
Mexico	10	27	37	75
Amerika Serikat	1	13	14	91

Sumber : Pryor and Holt (1998)

Meskipun pangsa relatif sektor pertanian semakin kecil, bukan berarti peranan sektor pertanian menjadi mengecil. Menurunnya pangsa relatif sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki keterkaitan (*linkages*) dalam aspek *output*, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Sektor pertanian merupakan instrumen fundamental untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sekaligus mengurangi kemiskinan. Bagi Indonesia (sebagai negara agraris dan maritim), pertanian yang kuat merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi.

Indonesia, sebagai negara agraris dan maritim diduga kuat mengalami perubahan struktural yang tidak seimbang. Data menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor pertanian pada tahun 2014 mencapai 34 persen, namun pada saat yang sama, pangsa sektor pertanian terhadap PDB pada tahun 2014 hanya tinggal 12,1 persen (Tabel 1.2). Artinya transformasi ekonomi yang ditandai dengan penurunan kontribusi sektor-sektor primer, termasuk sektor pertanian tidak diikuti oleh transformasi ketenagakerjaan.

Kelompok Sektor	Primer				Sekunder		Tersier	
	Pertanian		Pertambangan		PDB	Tenaga Kerja	PDB	Tenaga Kerja
	PDB	Tenaga Kerja	PDB	Tenaga Kerja				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2003	15,2	NA	10,6	NA	34,3	NA	39,8	NA
2004	14,9	44,5	9,7	1,1	34,8	16,2	40,6	37,0
2005	14,5	45,2	9,4	1,0	34,7	16,9	41,4	36,9
2006	14,2	42,6	9,1	1,0	34,6	17,2	42,1	39,3
2007	13,8	41,9	8,7	1,0	34,3	17,0	43,2	40,0
2008	13,7	41,1	8,3	1,0	33,8	17,1	44,3	40,8
2009	13,6	40,7	8,3	1,1	33,4	17,0	44,8	41,2
2010	13,2	39,5	8,1	1,2	33,1	17,5	45,7	41,9
2011	12,8	36,4	7,7	1,3	32,9	19,6	46,6	42,7
2012	12,5	35,2	7,4	1,4	32,9	20,2	47,2	43,2
2013	12,3	34,8	7,1	1,3	32,9	19,1	47,8	44,8
2014	12,1	34,0	6,7	1,3	32,9	19,9	48,3	44,8
PDB/TK th 2014	0,355	5,153	1,653	1,078				

Tabel 1.2.

Share PDB Sektor Ekonomi Terhadap PDB Indonesia dan Share Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Terhadap Total Tenaga Kerja, 2003-2014

Sumber: BPS, 2015 (diolah)

Keterangan : Sektor sekunder : industri, listik gas air, dan konstruksi;

Sektor tersier : perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, transportasi, pergudangan dan komunikasi, lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

Tabel 1.2 dan 1.3 memperlihatkan kemakmuran sektoral dilihat dari produktivitas per kapita. Produktivitas per kapita tersebut dihitung dengan membagi nilai PDB konstan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor yang bersangkutan. Pertanian menjadi sektor yang memiliki kemakmuran (pendapatan per kapita) paling rendah dibandingkan sektor lainnya. Tahun 2014 misalnya, produktivitas per kapita sektor pertanian hanya 0,35 dari produktivitas per kapita nasional, sementara produktivitas per kapita sektor pertambangan mencapai 5,15 atau 14,5 kali lipat dibandingkan sektor pertanian. Kondisi ini dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya proses pemiskinan dan eksploitasi sumberdaya manusia pada sektor pertanian.

Lapangan Pekerjaan Utama	PDB Konstan/ Tenaga Kerja, Rp. Juta					
	2004	2007	2010	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian	5,73	6,36	7,05	8,29	8,66	9,00
Pertambangan dan Penggalian	148,50	165,50	146,11	120,51	137,30	136,05
Industri	43,28	44,65	44,32	42,92	47,29	48,63
Listrik, Gas, dan Air	46,88	71,49	75,17	80,00	84,30	77,54
Konstruksi	20,93	23,78	27,35	24,94	28,68	26,66
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	13,83	16,36	17,86	20,12	20,78	21,12
Pengangkutan dan Telekomunikasi	17,43	23,62	39,73	52,53	57,17	62,30
Keuangan	132,26	133,72	132,83	93,84	93,90	95,13
Jasa Kemasyarakatan	14,27	14,45	13,37	14,13	13,99	14,85
Total	17,09	19,29	21,12	23,28	24,56	25,38

Tabel 1.3.

Pendapatan per Kapita Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2004-2014

Sumber: BPS, 2015 (diolah)
Keterangan: * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

"Keberadaan data hasil ST2013 memungkinkan untuk melihat transformasi yang terjadi pada usahatani maupun petani Indonesia dibandingkan dengan sensus 10 tahun lalu."

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia, sebagaimana banyak negara lain, mengalami perubahan struktural ekonomi dari waktu ke waktu. Bagaimana transformasi terjadi dan apa yang menjadi determinannya perlu dikaji agar transformasi yang terjadi dapat dipahami dan transformasi di masa yang akan datang dapat diantisipasi dan diarahkan ke arah yang lebih sesuai dengan yang diharapkan. Keberadaan data hasil Sensus Pertanian 2013 memungkinkan untuk melihat transformasi yang terjadi pada usahatani maupun petani Indonesia dibandingkan dengan 10 tahun lalu (Sensus Pertanian 2003). Kajian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menentukan alternatif kebijakan dalam mendukung pembangunan sektor pertanian.

1.2 Tujuan

Penyusunan Publikasi Analisis Tematik ST2013 Subsektor: Transformasi Struktural Usahatani dan Petani Indonesia, bertujuan untuk:

1. Menggambarkan keragaan usahatani dan karakteristik petani Indonesia;
2. Menganalisa transformasi struktural perekonomian makro, usahatani dan petani Indonesia;
3. Menganalisa determinan utama transformasi struktural perekonomian makro, usahatani, dan petani Indonesia;
4. Merumuskan implikasi kebijakan.

<http://www.bps.go.id>



2

Transformasi Struktural: Sebuah Tinjauan Pustaka

BAB 2

Transformasi Struktural: Sebuah Tinjauan Pustaka

“Transformasi struktural ditentukan juga oleh perbaikan distribusi pendapatan.”



2.1 Definisi Transformasi Struktural

Transformasi struktural merupakan suatu proses yang terjadi pada masa transisi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Dalam proses ini, meningkatnya pendapatan dapat mengakibatkan meningkatnya akumulasi modal fisik dan kualitas manusia, dan pergeseran komposisi permintaan, perdagangan, produksi serta pemanfaatan tenaga kerja (Chenery, 1960; dan Syrquin, 1988).

Transformasi struktural tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pendapatan tetapi juga ditentukan oleh perbaikan distribusi pendapatan. Peningkatan pendapatan dari golongan berpendapatan rendah akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang dan jasa produksi sektor padat karya di dalam negeri sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sasaran transformasi struktural adalah meningkatnya peranan ekonomi rakyat yang dicerminkan oleh meningkatnya peranan sektor ekonomi produktif yang menjamin distribusi pendapatan.

2.2 Perkembangan Teori Transformasi Struktural

Perkembangan teori transformasi struktural dapat ditinjau dari berbagai segi, diantaranya pemikiran transformasi struktural tentang pergeseran tenaga kerja dan investasi dari sektor primer ke sektor sekunder serta ke sektor tersier yang dikemukakan oleh Fisher (1935) dan Clark (1940). Selanjutnya, Rostow

(1960) dan Lewis (1954) meninjau transformasi struktural dari segi peningkatan laju akumulasi modal. Terakhir, Kuznets (1960), Syrquin dan Chenery (1988) yang meninjau dari segi peningkatan pendapatan.

Teori transformasi struktural Fisher (1935) memiliki persamaan dengan teori tahapan pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh List. List mengemukakan bahwa terdapat lima tahapan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pergeseran distribusi tenaga kerja yaitu (1) masyarakat primitif; (2) masyarakat penggembala ternak; (3) masyarakat pertanian; (4) masyarakat pertanian-manufaktur; dan (5) masyarakat manufaktur-perdagangan (Hoselitz, 1960). Tetapi Fisher menekankan transformasi struktural dari segi adanya pergeseran tenaga kerja dan investasi yang bersifat permanen dari sektor pertanian ke sektor industri dan akhirnya ke sektor jasa. Perkembangan selanjutnya, Clark (1951) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi dapat dicapai dengan cara: (1) meningkatkan produktivitas pada setiap sektor dan (2) mengalihkan tenaga kerja dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi.

“Perkembangan teori transformasi struktural dapat ditinjau dari berbagai segi.”

Rostow lebih menekankan kepada laju akumulasi modal untuk terjadinya perubahan struktur ekonomi. Dalam hubungan ini, Rostow mengemukakan lima tahapan pertumbuhan yaitu: (1) masyarakat tradisional; (2) pra kondisi untuk tinggal landas; (3) tinggal landas; (4) gerakan menuju kematangan; dan (5) masa konsumsi tinggi. Sejalan dengan Rostow, Lewis dalam ekonomi dualistiknya menekankan tentang pergeseran sumber dari sektor tradisional ke sektor modern.

Pembuktian secara empiris tentang transformasi struktural dilakukan oleh Kuznets (1960) dan pendekatan secara statistik dilakukan oleh Chenery (1960). Kuznets beranggapan bahwa peningkatan tabungan dan investasi merupakan syarat keharusan, tetapi belum memenuhi syarat kecukupan bagi pertumbuhan ekonomi. Kuznets dan Chenery beranggapan bahwa selain peningkatan akumulasi modal (fisik dan kualitas manusia), juga diperlukan suatu perubahan struktur perekonomian yang saling berkaitan, agar terjadi perubahan dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern.

2.3 Proses Transformasi Struktural

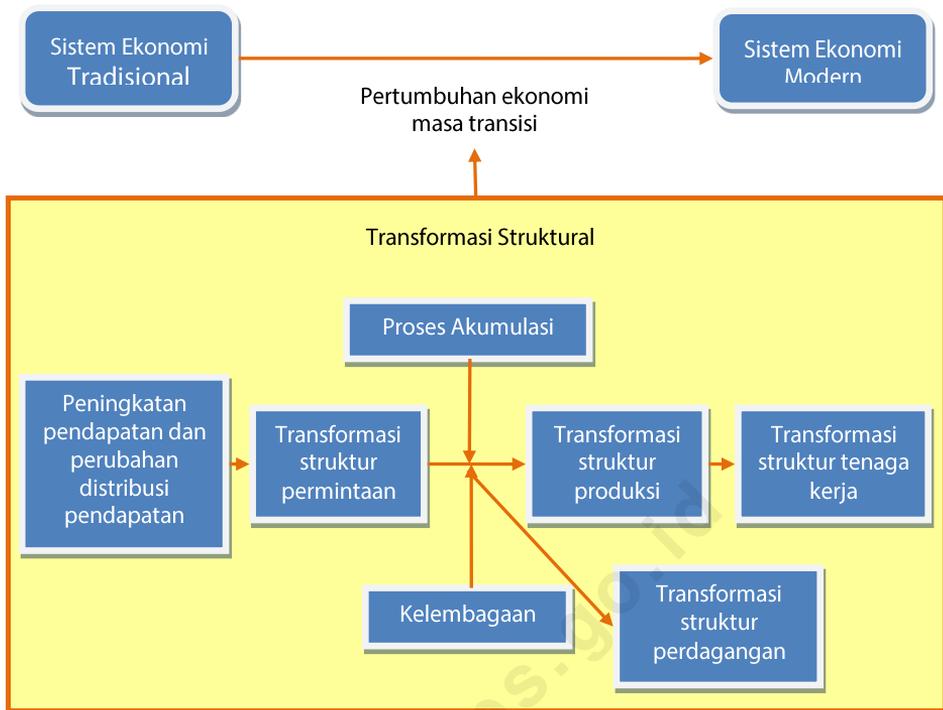
Proses transformasi struktural secara skematis disajikan pada Gambar 2.1. Peningkatan pendapatan dan peningkatan pemerataan pendapatan dapat merubah pola permintaan domestik, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan populasi, yang akan menggeser permintaan dari barang-barang pertanian (pangan) ke barang-barang non pertanian (industri dan jasa). Perubahan pola permintaan akan mendorong terjadinya transformasi struktur produksi. Transformasi struktur produksi ditandai dengan terjadinya penurunan pangsa relatif PDB sektor pertanian. Keadaan ini mencerminkan relatif lambatnya peningkatan

laju pertumbuhan produksi dan nilai tambah bruto (NTB) sektor pertanian terhadap sektor nonpertanian (Anwar, 1983 dalam Budiharsono, 1996).

Peranan sektor pertanian di Indonesia selama proses pertumbuhan hanya merupakan pasar bagi barang-barang industri dan penghasil devisa dari ekspor. Peranannya sebagai penyedia bahan baku, modal dan tenaga kerja untuk sektor industri tidak begitu besar. Penyebabnya yaitu kurangnya keterkaitan pertumbuhan sektor industri dengan sektor pertanian. Kecilnya keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor industri baik dari segi produksi maupun penyerapan tenaga kerja dapat mempengaruhi proses transformasi struktural. Penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian antara lain disebabkan oleh: (i) produk marginal sektor pertanian semakin turun; dan (ii) harga relatif barang-barang pertanian terhadap barang-barang nonpertanian semakin menurun. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan produktivitas tenaga kerja, diperlukan kebijakan untuk dapat menggeser tenaga kerja dari sektor yang produktivitasnya rendah (pertanian) ke sektor dengan produktivitas tinggi (industri).

“Salah satu penyebab terjadinya pergeseran tenaga kerja adalah tingginya upah riil di perkotaan dan meningkatnya kesempatan berusaha”

Model Todaro mengemukakan bahwa pergeseran tenaga kerja terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama, tenaga kerja dari sektor pertanian bergeser kepada sektor yang mempunyai produktivitas marginal yang sama dengan sektor pertanian yaitu sektor jasa informal. Tahap selanjutnya, tenaga kerja yang berada di sektor jasa informal akan berpindah ke sektor industri (Paauw, 1992 dalam Budiharsono, 1996). Transformasi ketenagakerjaan juga ditandai dengan proses migrasi dari desa ke kota (urbanisasi) dan pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Salah satu penyebab terjadinya pergeseran itu adalah tingginya upah riil di perkotaan dan meningkatnya kesempatan berusaha.



Gambar 2.1.
Proses Transformasi Struktural Ekonomi

Sumber: Budiharsono (1996)

3

Metodologi

<http://www.bps.go.id>

BAB 3

Metodologi

“Transformasi struktural perekonomian makro pada sektor pertanian diproksi dengan PDRB sektor pertanian.”



3.1 Kerangka Pemikiran Konseptual

Transformasi struktural ditandai dengan pergeseran tenaga kerja dan investasi dari sektor primer ke sektor sekunder dan yang terakhir ke sektor tersier. Indonesia, sebagai negara agraris dan maritim diduga kuat mengalami perubahan struktural yang tidak seimbang. Transformasi ekonomi yang ditandai dengan penurunan kontribusi sektor-sektor primer, termasuk sektor pertanian, tidak diikuti oleh transformasi ketenagakerjaan. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 34 persen (2014), pada saat yang sama pangsa sektor pertanian terhadap PDB hanya tinggal 12,1 persen (2014). Oleh karena transformasi struktural di Indonesia tidak seimbang, maka penting untuk didalami bagaimana transformasi struktural di sektor pertanian.

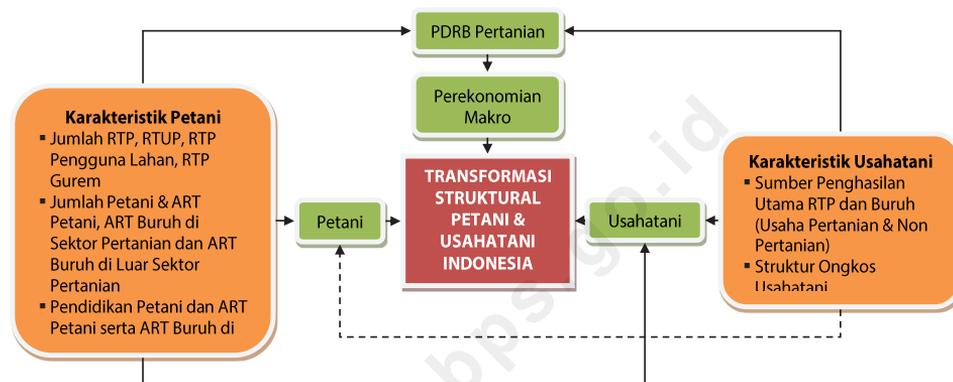
Transformasi struktural perekonomian makro pada sektor pertanian diproksi dengan PDRB sektor pertanian. Transformasi struktural tersebut diduga sebagai resultanta dari transformasi yang terjadi pada usahatani dan petani (faktor internal). Transformasi struktural juga diduga dipengaruhi faktor eksternal yaitu PDRB sektor ekonomi lainnya.

Analisis transformasi struktural di sektor pertanian, khususnya transformasi struktural usahatani dan petani Indonesia dimulai dengan menganalisis karakteristik usahatani dan petani Indonesia. Pada tahap ini, analisis eksploratif dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta yang faktual tentang “apakah terjadi

“Transformasi struktural petani diduga tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik petani, tetapi juga karakteristik usahatani, begitu juga sebaliknya”

transformasi struktural usahatani dan petani Indonesia pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir?”. Variabel-variabel apa saja yang menjadi “penciri” terjadinya transformasi struktural tersebut?. Hasil analisis pada tahap ini menjadi panduan untuk menganalisis determinan transformasi struktural usahatani dan petani Indonesia.

Transformasi struktural petani diduga tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik petani, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik usahatani, begitu juga sebaliknya. Secara ringkas, kerangka pemikiran konseptual disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran Konseptual

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Data utama yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari hasil Sensus Pertanian (ST) 2003 dan 2013, baik data sensus cacah lengkap, survei pendapatan petani, maupun subsektor.

3.3 Metode Analisis Data

(1) Analisis eksploratif

Analisis eksploratif adalah suatu analisis dalam meneliti sekelompok objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dilakukannya analisis ini adalah untuk membuat suatu deskripsi atau gambaran secara sistematis yang faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang terjadi (Nazir, 1999). Bentuk analisis eksploratif dalam kajian ini adalah untuk mendapatkan fakta-fakta yang faktual tentang (i) apakah terjadi transformasi struktural usahatani dan petani Indonesia pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir?; (ii) bagaimana pola transformasi struktural usahatani dan petani Indonesia pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir? dan

“Data utama yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari hasil sensus pertanian (ST) 2003 dan 2013.”

(iii) komponen-komponen apa saja yang mengalami transformasi struktural tersebut?

(2) Analisis Kuantitatif

Apabila hasil analisis eksploratif menunjukkan fakta-fakta bahwa terjadi transformasi struktural usahatani dan petani Indonesia, maka penting untuk dikaji lebih mendalam determinan dari transformasi struktural tersebut dengan menggunakan analisis kuantitatif.

(2.1 Analisis Statistika : Analisis Uji Beda

Konsep uji beda adalah: i) penelitian bermaksud menguji keadaan (sesuatu) yang terdapat dalam suatu kelompok dengan kelompok lainnya, dan ii) menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan diantara kelompok-kelompok. Uji beda yang digunakan dalam kajian ini adalah *T-test paired sample test* dengan analisis hipotesis dari dua kelompok data yang berpasangan.

(2.2 Analisis Ekonometrika : Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau variabel independen atau variabel penjelas. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat atau variabel dependen. Secara konseptual, analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis determinan transformasi struktural usahatani dan petani Indonesia, yang terdiri atas tiga bagian yaitu determinan struktural perekonomian makro, determinan struktural usahatani, dan determinan struktural petani.

(2.3 Spesifikasi Model

Model merupakan suatu miniatur atau representasi dari fenomena aktual dunia nyata. Model ekonometrika merupakan gabungan atau integrasi dari teori ekonomi, matematika ekonomi, dan statistika untuk merepresentasikan fenomena ekonomi. Model ekonometrika dapat digunakan untuk (Koutsoyiannis 1977): (1) alat analisis, seperti pengujian atas teori ekonomi, (2) penetapan kebijakan, yaitu menyediakan nilai estimasi parameter perilaku ekonomi, dan (3) peramalan dampak, yaitu menggunakan nilai estimasi tersebut untuk memprediksi kondisi ekonomi mendatang.

Spesifikasi model dalam kajian ini diawali dengan mempelajari hubungan antarvariabel yang terkait dengan transformasi struktural petani, transformasi struktural usahatani dan transformasi perekonomian makro. Spesifikasi model yang dibuat didasarkan pada teori ekonomi, pengalaman empiris serta logika dan pengamatan yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Namun demikian agar diperoleh determinan utama transformasi struktural, maka hubungan antarvariabel tidak disusun dalam suatu model persamaan simultan, akan tetapi hanya sebagai persamaan tunggal yang terdiri dari beberapa persamaan. Model umum pada kajian ini adalah sebagai berikut:

a. Transformasi Struktur Perekonomian Makro

$$\text{PDRB pertanian} = \beta_0 + \beta_1 \text{ PDRB sektor lainnya} + \beta_2 \text{ PDRB subsektor pertanian} + \beta_3 \text{ Karakteristik RTUP}_{it} + \beta_4 \text{ Karakteristik Usahatani}_{it} + e_t$$

b. Transformasi Struktural Usahatani

$$\text{USAHATANI} = \beta_0 + \beta_1 \text{ PDRB} + \beta_2 \text{ Karakteristik RTUP}_{it} + \beta_3 \text{ Karakteristik Usahatani}_{it} + e_t$$

c. Transformasi Struktural Petani atau Rumah Tangga Usaha Pertanian

$$\text{ARTPETANI} = \beta_0 + \beta_1 \text{ Karakteristik RTUP}_{it} + \beta_2 \text{ Karakteristik Usahatani}_{it} + e_t$$

$$\text{RTUP} = \beta_0 + \beta_1 \text{ Karakteristik RTUP}_{it} + \beta_2 \text{ Karakteristik Usahatani}_{it} + e_t$$

Model diupayakan memenuhi tiga kriteria yang disyaratkan oleh Koutsoyiannis (1977), agar diperoleh hasil yang representatif. Kriteria-kriteria tersebut yaitu:

Kriteria teori ekonomi (*theoretically meaningful*) khususnya yang menyangkut tanda dan besaran (*sign and magnitude*) dari parameter persamaan sesuai dengan harapan teoritis secara apriori.

Kriteria statistika yang dilihat dari *goodness of fit* dan secara statistika memuaskan (*statistically satisfactory*).

Kriteria ekonometrika yang menetapkan estimasi parameter harus memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan seperti *unbiasedness*, *efficiency*, *consistency* dan *sufficiency*.

4

Transformasi Struktural Usahatani dan Petani Indonesia

BAB 4

Transformasi Struktural Usahatani dan Petani Indonesia

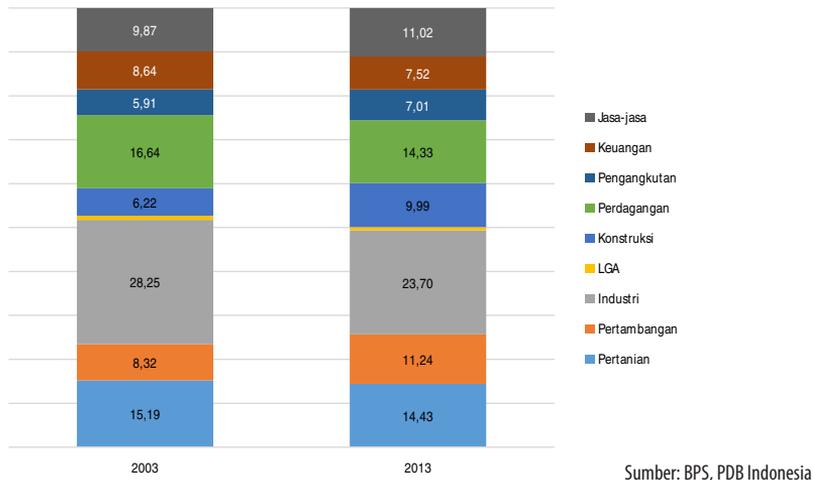
"Transformasi struktural perekonomian sektor pertanian berbeda antarwilayah."



4.1 Transformasi Perekonomian Makro

4.1.1 Transformasi PDB dan PDRB Sektor Pertanian

Sektor pertanian memiliki peranan penting dan strategis bagi perekonomian. Kontribusi sektor pertanian dalam PDB berada pada peringkat kedua setelah sektor industri. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, pangsa PDB sektor pertanian mengalami penurunan dari 15,19 persen pada tahun 2003 menjadi 14,43 persen pada tahun 2013 (Gambar 4.1). Penurunan pangsa sektor pertanian dalam PDB tidak dapat diartikan bahwa sektor pertanian tidak penting. Pangsa sektor pertanian yang semakin menurun merupakan *signal* "keberhasilan pembangunan" yaitu terjadinya perubahan struktur ekonomi yang ditandai dengan berkurangnya pangsa sektor pertanian (primer), dan sebenarnya secara absolut terus meningkat, dan meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri pengolahan).



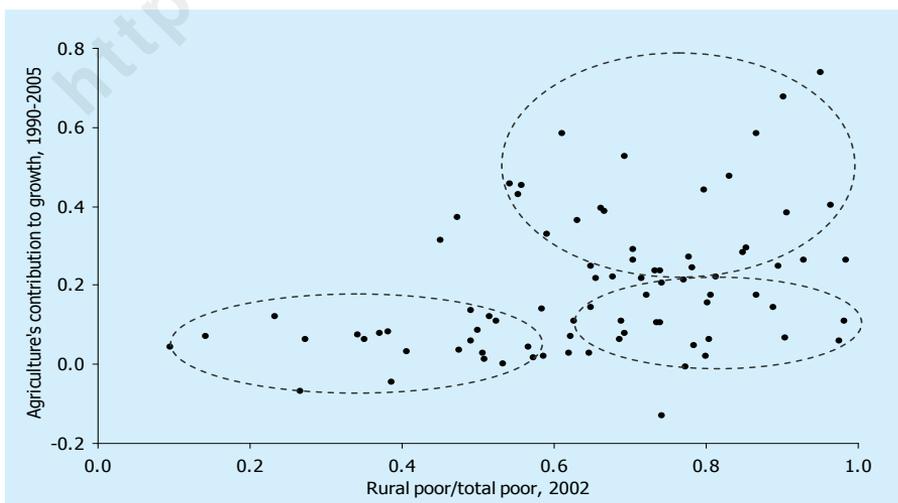
Gambar 4.1.

Struktur PDB menurut Sektor 2003 dan 2013

Sumber: BPS, PDB Indonesia

“Berkurangnya pangsa sektor pertanian akibat dari tumbuhnya pangsa sektor sekunder (industri pengolahan) berkorelasi positif dengan penurunan kemiskinan.”

Data *World Bank* (2008) menunjukkan bahwa berkurangnya pangsa sektor pertanian primer sebagai akibat dari tumbuhnya pangsa sektor sekunder (industri pengolahan) berkorelasi positif dengan penurunan kemiskinan (Gambar 4.2). Namun demikian, bukan berarti karena penurunan pangsa tersebut sektor pertanian kemudian diabaikan. Hal ini karena industri pengolahan memiliki ketergantungan yang erat dengan sektor pertanian. Penurunan pangsa sektor pertanian menjadi “signal” bahwa sektor pertanian memiliki keterkaitan (*linkages*) dalam aspek *output*, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Dalam hal ini sektor pertanian memiliki daya pengganda (*multiplier*) yang sangat besar. Sektor industri pengolahan tidak akan berkembang tanpa dukungan sektor pertanian. Oleh karena itu, negara yang pertaniannya mengalami stagnan, maka sektor industri pengolahannya pun akan lambat berkembang.



Gambar 4.2.

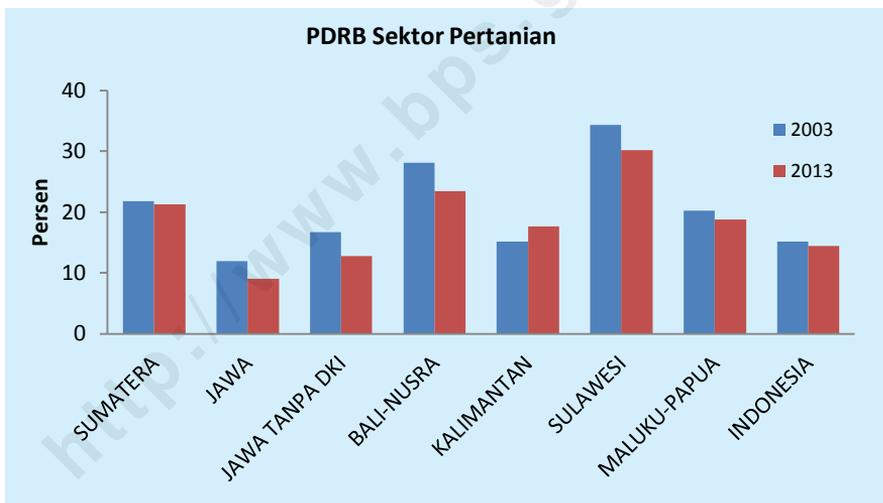
Korelasi antara Penurunan Pangsa Pertanian dengan Penurunan Kemiskinan

Sumber: World Bank (2008)

“Transformasi struktural memiliki resiko yang harus diantisipasi yaitu bila tidak berimbang akan menyebabkan kesenjangan pendapatan.”

Transformasi struktur ekonomi secara alami (*nature*) merupakan proses yang harus dilalui untuk kemajuan ekonomi. Transformasi ini merupakan peluang yang baik untuk ketahanan pangan petani dan kinerja usaha pertanian. Meskipun, proses transformasi memiliki risiko yang harus diantisipasi, yaitu bila tidak berimbang akan menyebabkan kesenjangan pendapatan.

Proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian menurut koridor ekonomi di seluruh wilayah, kecuali Kalimantan, menunjukkan penurunan (Gambar 4.3). Namun demikian, berdasarkan hasil analisis uji beda dengan tingkat signifikansi 0,1 (10 persen) menunjukkan bahwa proporsi PDRB pertanian yang menurun signifikan hanya di wilayah Jawa, Sulawesi dan Maluku-Papua. Hampir di seluruh wilayah, kecuali Jawa, proporsi PDRB sektor pertanian masih cukup besar dibandingkan dengan proporsi PDB sektor pertanian Indonesia yang hanya kurang dari 15 persen. Jawa menjadi satu-satunya wilayah yang proporsi PDRB sektornya lebih kecil dibandingkan dengan proporsi PDB sektor pertanian.



Gambar 4.3.

Proporsi PDRB Sektor Pertanian Menurut Koridor Ekonomi, 2003 dan 2013

Sumber: BPS, PDRB Sektoral Menurut Provinsi

Keterangan:
Tingkat signifikansi hasil uji beda: Sumatera (0,678), Jawa (0,011), Bali-Nusra (0,151), Kalimantan (0,289), Sulawesi (0,009), Maluku-Papua (0,027)

4.1.2 Transformasi PDB dan PDRB Intersubsektor Pertanian

Perubahan struktur juga terjadi pada PDB intersubsektor pertanian. Perubahan struktur tersebut ditandai dengan penurunan peran subsektor tanaman pangan (*tabama*), perkebunan serta kehutanan. Pada saat yang sama pangsa PDB subsektor perikanan meningkat signifikan (Gambar 4.4). Hal ini mengindikasikan subsektor perikanan berpotensi menjadi sumber

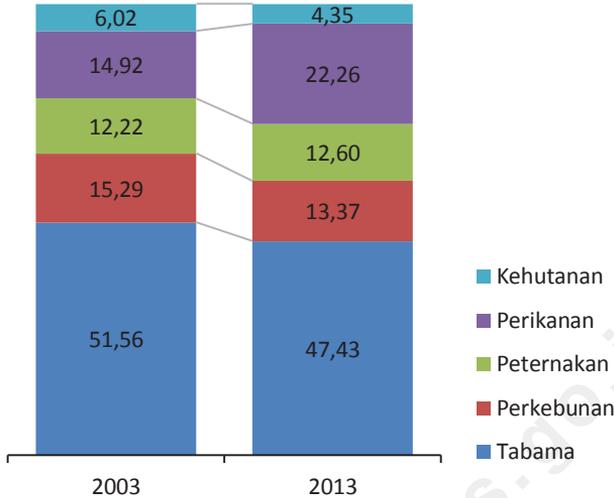
“Subsektor perikanan berpotensi menjadi sumber pertumbuhan di masa yang akan datang.”

"Subsektor perikanan berpotensi menjadi sumber pertumbuhan di masa yang akan datang."

pertumbuhan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, agar potensi sumber pertumbuhan tersebut dapat dioptimalkan maka diperlukan strategi kebijakan pengembangan perikanan yang lebih banyak dirasakan langsung oleh nelayan, terutama nelayan skala kecil.

Gambar 4.4.

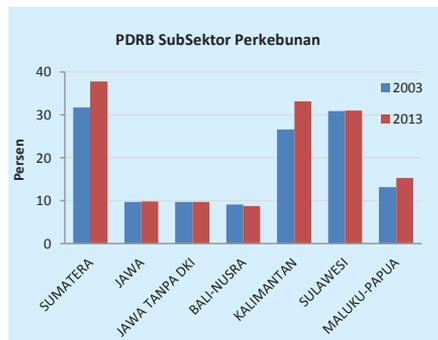
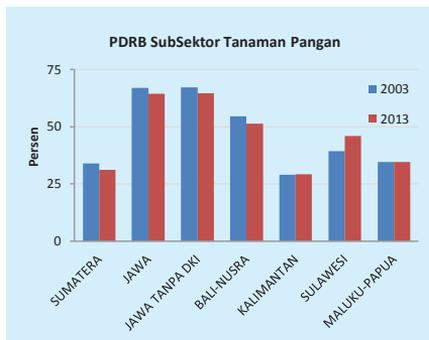
Struktur PDB Sektor Pertanian Indonesia, 2003 dan 2013

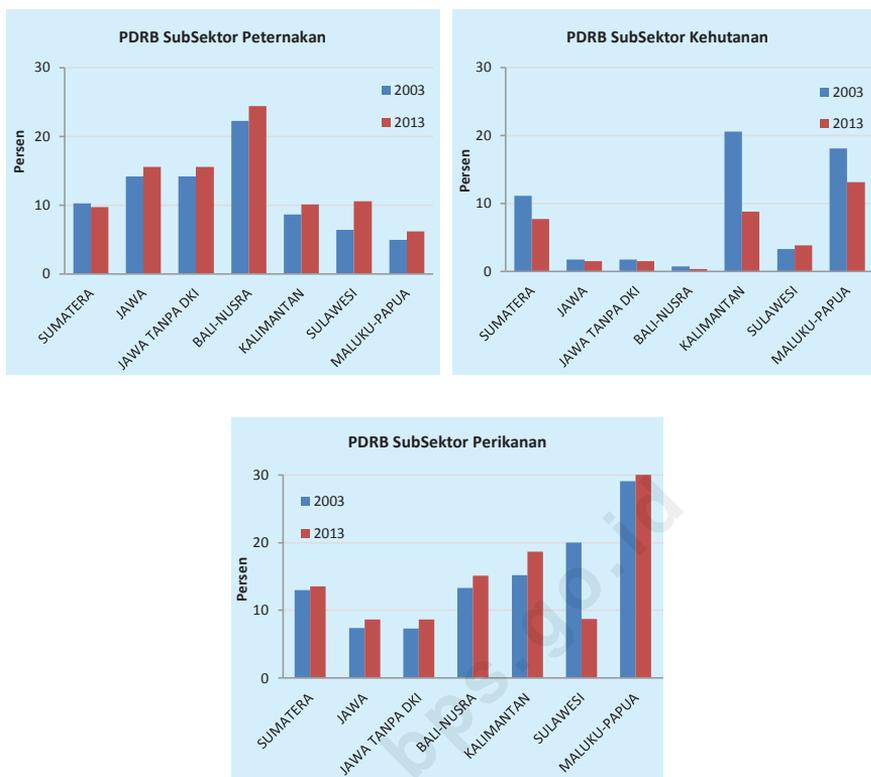


Sumber: BPS, PDB Indonesia

"Perubahan arah struktur PDB sektor pertanian tidak selalu sama dengan arah perubahan struktur PDRB di masing-masing wilayah."

Perubahan arah struktur PDB sektor pertanian tidak selalu sama dengan arah perubahan struktur PDRB di masing-masing wilayah. Perubahan struktur PDRB sektor pertanian di masing-masing wilayah berbeda. Proporsi PDRB tanaman pangan secara umum tidak mengalami perubahan signifikan, kecuali di Jawa yang mengalami penurunan signifikan. Proporsi PDRB perkebunan meningkat signifikan di Sumatera dan Kalimantan. Proporsi PDRB peternakan meningkat signifikan di Bali-Nusra, Kalimantan dan Sulawesi. Proporsi PDRB kehutanan menurun signifikan di Sumatera, Kalimantan dan Maluku-Papua, dan PDRB perikanan meningkat signifikan di Jawa dan Bali-Nusra (Gambar 4.5 dan Tabel 4.1).





Gambar 4.5.

Struktur PDRB Sektor Pertanian Menurut Koridor Ekonomi, 2003 dan 2013

Sumber: BPS, PDRB Sektoral Menurut Provinsi

Tabel 4.1.

Tingkat Signifikansi Hasil Uji Beda Struktur PDRB Sektor Pertanian, 2003 dan 2013

Wilayah	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Kehutanan	Perikanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	0,127	0,010	0,557	0,019	0,935
Jawa	0,107	0,347	0,291	0,338	0,077
Bali-Nusra	0,291	0,768	0,074	0,447	0,033
Kalimantan	0,568	0,076	0,045	0,097	0,286
Sulawesi	0,506	0,283	0,093	0,452	0,809
Maluku-Papua	0,665	0,190	0,309	0,075	0,240
Indonesia	0,069	0,013	0,003	0,002	0,248

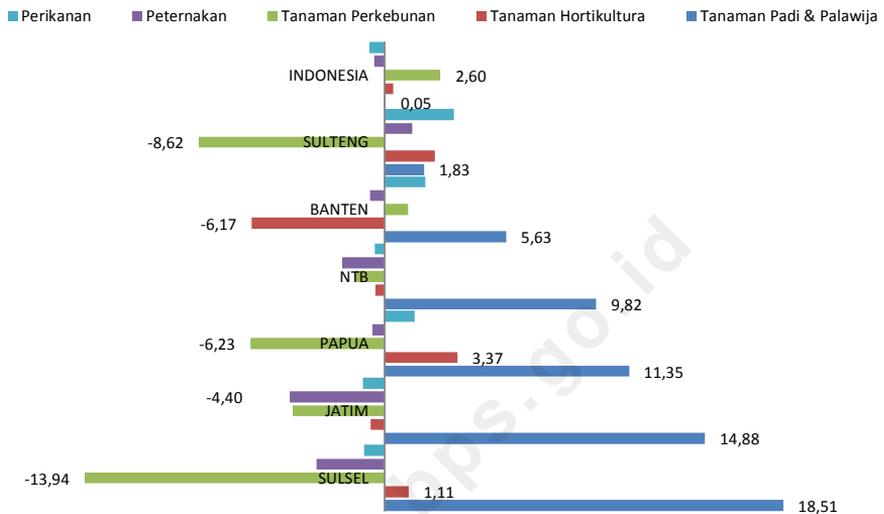
Keterangan: Berbeda signifikan jika tingkat signifikansinya $\leq 0,1$

4.2 Transformasi Karakteristik Usahatani

4.2.1 Proporsi Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga Usaha Pertanian

Sumber penghasilan utama Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Indonesia dari usaha sektor pertanian masih didominasi oleh subsektor

tanaman padi dan palawija, serta subsektor tanaman perkebunan. Proporsi RTUP dengan sumber penghasilan dari tanaman padi dan palawija meningkat signifikan di 6 Provinsi yaitu Sulawesi Tengah, Banten, NTB, Papua, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan (Gambar 4.6). Dari gambar tersebut terlihat, pola perubahan yang terjadi di keenam provinsi tersebut, dimana banyak RTUP yang semula sumber penghasilan utamanya berasal dari subsektor perkebunan atau hortikultura beralih menjadi subsektor tanaman padi dan palawija.



Gambar 4.6.

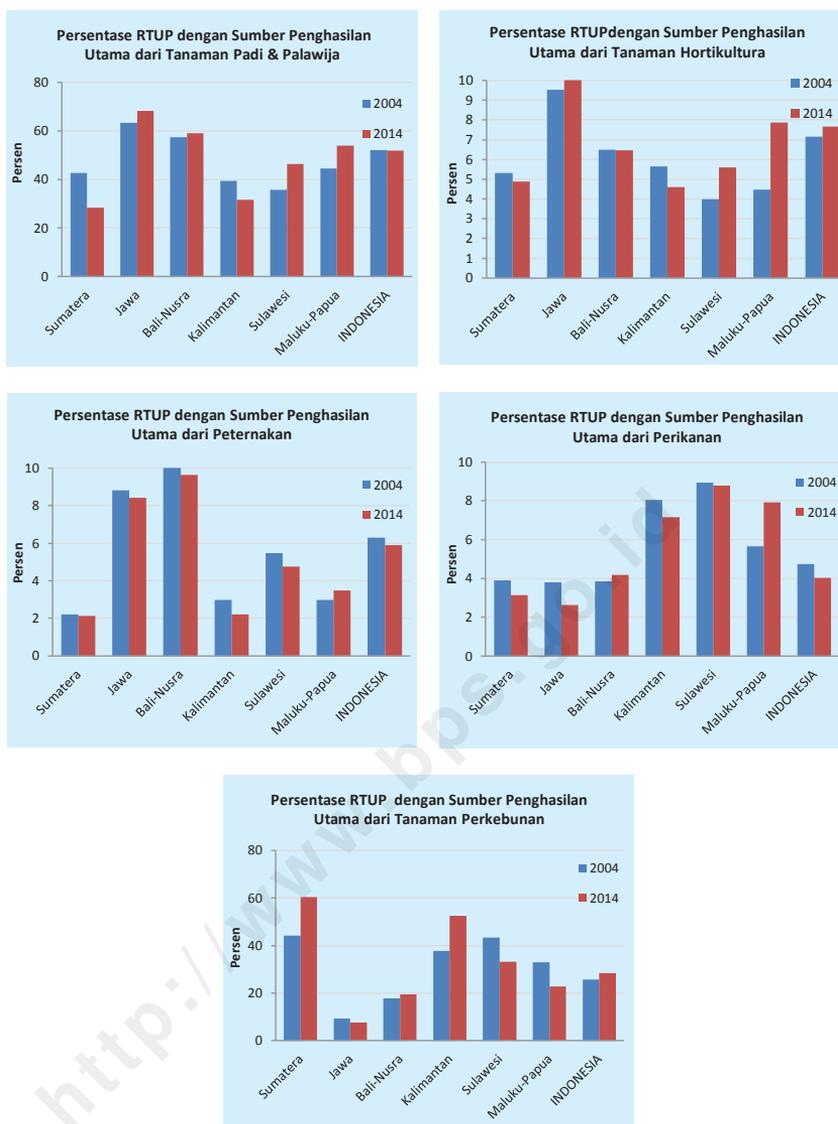
Perubahan Proporsi RTUP Menurut Sumber Penghasilan (Persen), 2013

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST 2013 (diolah)

"RTUP dengan sumber penghasilan dari tanaman padi dan palawija meningkat signifikan di 6 Provinsi."

Hasil analisis uji beda (Tabel 4.2) yang dilakukan terhadap proporsi RTUP berdasarkan sumber penghasilan utamanya menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, secara keseluruhan, proporsi RTUP berdasarkan sumber penghasilan utamanya tidak mengalami perubahan signifikan kecuali di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Di wilayah Kalimantan perubahan signifikan terjadi pada proporsi RTUP yang sumber penghasilan utamanya berasal dari subsektor tanaman pangan (padi dan palawija) serta subsektor perkebunan, sedangkan di Sumatera perubahan signifikan terjadi pada proporsi RTUP yang sumber penghasilan utamanya berasal dari subsektor perikanan yang mengalami penurunan signifikan.

Di Kalimantan, proporsi RTUP yang sumber penghasilannya berasal dari subsektor Tanaman padi dan Palawija mengalami penurunan yang signifikan, sebaliknya proporsi RTUP yang sumber penghasilannya berasal dari subsektor perkebunan mengalami peningkatan signifikan, kondisi ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pergeseran sumber penghasilan utama RTUP di Kalimantan yang semula berasal dari subsektor tanaman padi dan palawija beralih menjadi subsektor perkebunan.



Gambar 4.7.

Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian Berdasarkan Subsektor Menurut Sumber Penghasilan, 2004 dan 2014

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST 2003 dan ST 2013 (diolah)

Wilayah	Tanaman Padi dan Palawija	Tanaman Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	0,462	0,184	0,137	0,828	0,064
Jawa	0,170	0,819	0,477	0,455	0,298
Bali-Nusra	0,961	0,459	0,400	0,809	0,447
Kalimantan	0,078	0,119	0,017	0,736	0,843
Sulawesi	0,680	0,123	0,247	0,359	0,983
Maluku-Papua	0,996	0,172	0,702	0,524	0,198
Indonesia	0,641	0,557	0,093	0,435	0,411

Tabel 4.2.

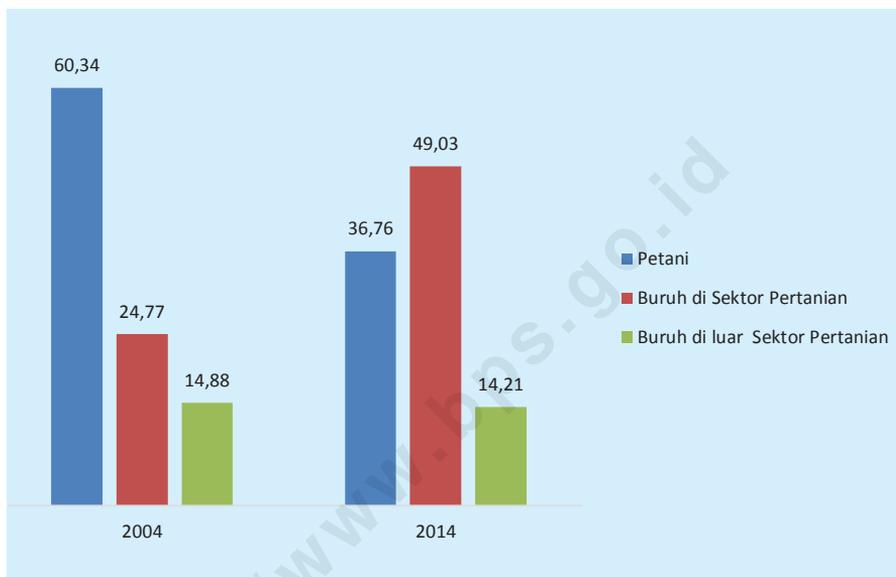
Tingkat Signifikansi Hasil Uji Beda Rumah Tangga Usaha Pertanian Berdasarkan Subsektor Menurut Sumber Penghasilan, 2004 dan 2014

Keterangan: Berbeda signifikan jika tingkat signifikansinya $\leq 0,1$

4.2.2 Struktur Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian

“Proporsi kontribusi pendapatan bergeser dari petani ke buruh di sektor pertanian.”

Saat ini pendapatan rumah tangga usaha pertanian tidak lagi sepenuhnya tergantung pada lahan pertanian yang dimiliki sebagai indikator pendapatan utama rumah tangga pertanian. Penguasaan lahan pertanian yang relatif sempit, membuat banyak petani juga bekerja di sektor *off farm* maupun *on farm* untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Struktur pendapatan RTUP dibagi menjadi tiga jenis kegiatan utama, yaitu petani, buruh di sektor pertanian dan buruh di luar sektor pertanian.



Gambar 4.8.

Proporsi Jenis Kegiatan Terhadap Pendapatan RTUP, 2004 dan 2014

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST 2003 dan ST 2013 (diolah)

Pada tahun 2004 kontribusi terbesar terhadap pendapatan RTUP masih diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh petani. Namun demikian, di tahun 2014 terlihat adanya pergeseran struktur pendapatan RTUP yang dibuktikan dengan semakin kecilnya proporsi pendapatan dari (sebagian) petani dan semakin besarnya proporsi pendapatan dari buruh di sektor pertanian. Dibandingkan dengan tahun 2004, proporsi pendapatan yang bersumber dari kegiatan sebagai petani mengalami penurunan, dari yang sebelumnya 60,34 persen di tahun 2004 menjadi 36,76 persen di tahun 2014. Hal ini bertolak belakang dengan jenis kegiatan buruh di sektor pertanian yang mengalami kenaikan dari 24,77 persen di tahun 2004 menjadi 49,03 persen di tahun 2014. Disisi lain proporsi jenis kegiatan buruh di luar sektor pertanian yang relatif stabil antara tahun 2004 dengan tahun 2014.

Rata-rata pendapatan rumah tangga petani masih didominasi oleh usaha sektor pertanian, diikuti rata-rata pendapatan di buruh luar pertanian dan usaha

"Proporsi kontribusi pendapatan buruh di luar sektor pertanian meningkat.."

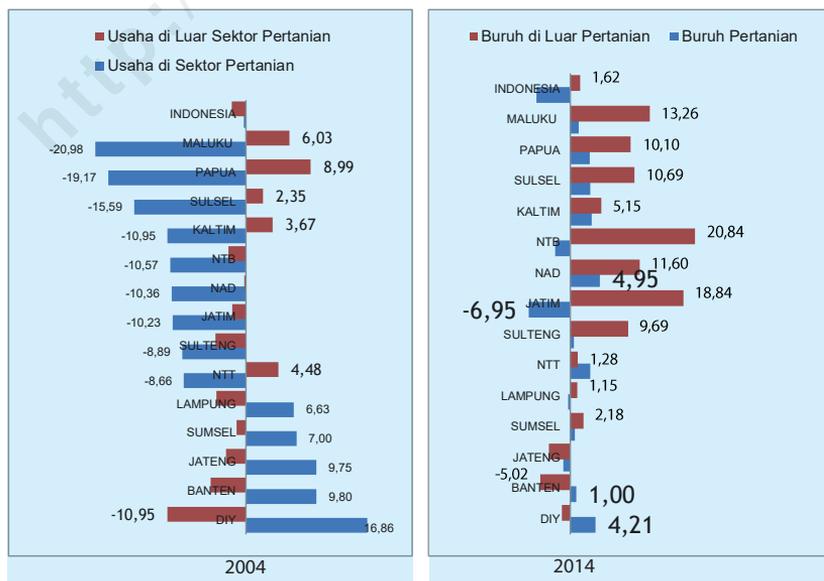
luar sektor pertanian. Namun demikian, Pada tahun 2014 terlihat terjadinya penurunan proporsi rata-rata pendapatan rumah tangga petani dari usaha sektor pertanian. Dlsisi lain, terjadi peningkatan yang signifikan pada rata-rata pendapatan rumah tangga pertanian yang sumber pendapatannya berasal dari buruh di luar sektor pertanian. Wilayah yang mengalami peningkatan signifikan pada proporsi rata-rata pendapatan dari buruh di luar sektor pertanian adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Proporsi rata-rata pendapatan dari usaha pertanian cenderung mengalami penurunan di seluruh provinsi, penurunan terbesar terjadi di Porvinsi Maluku (20,98 persen) dan Papua (19,17 persen).



Gambar 4.9.

Rata-rata Pendapatan RTUP Berdasarkan Sumber Pendapatan, 2004 dan 2014

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013 (diolah)



Gambar 4.10.

Perubahan Proporsi Rata-rata Pendapatan RTP selama 1 tahun yang Lalu, 2004 dan 2014

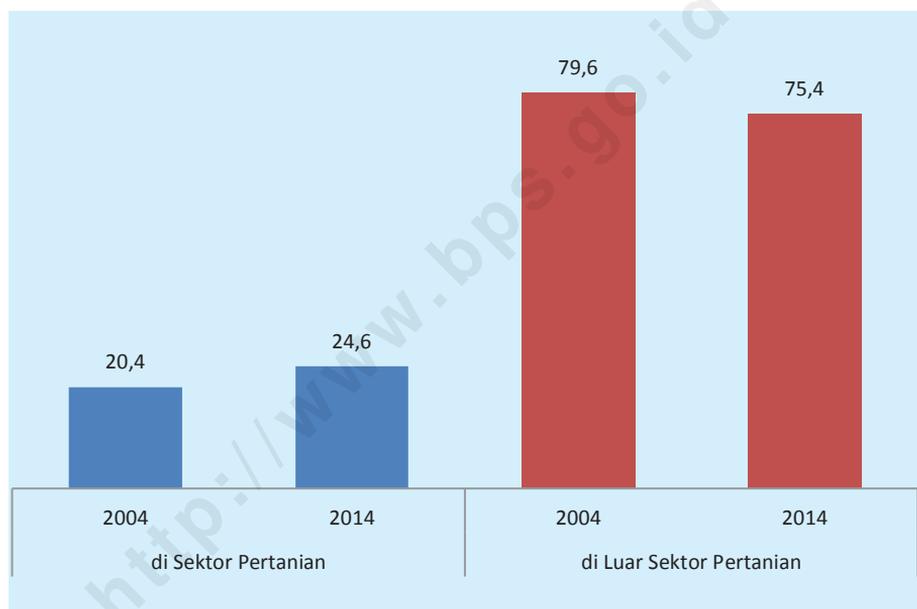
Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST 2003 dan ST 2013 (diolah)

“ Mayoritas provinsi mengalami penurunan proporsi rata-rata pendapatan dari usaha pertanian, meskipun proporsinya masih dominan. ”

Bagi anggota rumah tangga petani yang memiliki keterbatasan lahan pertanian, menjadi buruh merupakan suatu pilihan yang bisa mereka geluti guna memperoleh tambahan penghasilan. Pendapatan buruh di luar sektor pertanian lebih menjanjikan daripada buruh di sektor pertanian. Hal ini terlihat dari proporsi rata-rata pendapatan buruh di luar sektor pertanian yang lebih besar dibandingkan dengan buruh pertanian. Namun demikian, bila membandingkan tahun 2004 dengan 2014 proporsi rata-rata pendapatan anggota rumah tangga pertanian sebagai buruh di sektor pertanian cenderung mengalami peningkatan meskipun perubahan yang terjadi tidak terlalu besar, sebaliknya proporsi rata-rata pendapatan anggota rumah tangga pertanian sebagai buruh di luar sektor Pertanian cenderung menurun. Kondisi ini hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia kecuali di Provinsi Maluku Utara, Banten, Gorontalo, Sumatera Utara, Maluku, Sumatera Barat, dan Papua yang sebaliknya mengalami peningkatan.

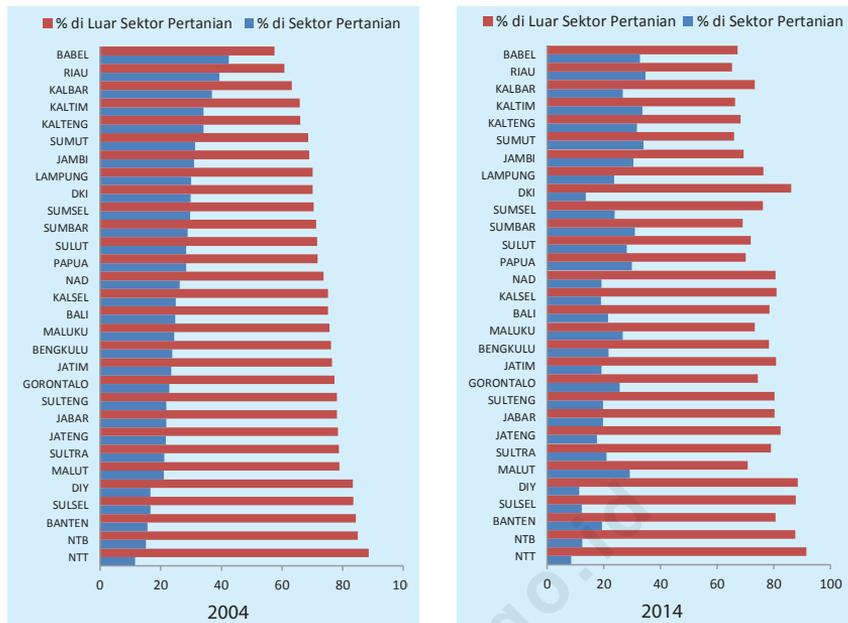
Gambar 4.11.

Proporsi Rata-Rata Pendapatan Anggota Rumah Tangga Pertanian Sebagai Buruh Selama Setahun yang Lalu, 2004 dan 2014



Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST 2003 dan ST 2013 (diolah)

Gambar 4.12.
Proporsi Rata-rata
Pendapatan
Anggota Rumah
Tangga Pertanian
Sebagai Buruh
dari Sektor
Pertanian dan
Luar Sektor
Pertanian Tahun
2004 dan 2014



Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST 2003 dan ST 2013 (diolah)

Subsektor tanaman pangan (padi dan palawija) serta perkebunan memberikan sumbangan terbesar terhadap total pendapatan RTUP nasional di sektor pertanian, baik itu pada buruh/karyawan maupun yang berusaha seperti yang terlihat pada Tabel 4.3. Selain itu, apabila dilihat perbandingan antara tahun 2004 dengan tahun 2014 pada yang status berusaha, maka terlihat bahwa pada subsektor perkebunan terjadi kenaikan proporsi antara tahun 2004 dengan tahun 2014, dari 25,92 persen menjadi 28,52 persen. Adapun subsektor lain relatif tidak berubah signifikan.

Pada tataran status buruh/karyawan subsektor yang mengalami perubahan secara signifikan terlihat pada subsektor tanaman pangan. Proporsi pendapatan subsektor tanaman padi dan palawija tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2004, yaitu dari 57,83 persen menjadi 54,08 persen. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada status buruh/karyawan di tanaman perkebunan yang mengalami peningkatan dari yang sebelumnya pada tahun 2004 adalah 13,49 persen menjadi 27,31 persen di tahun 2014. Hal ini dapat diartikan bahwa ada pergeseran struktur pendapatan buruh/karyawan dari tanaman padi dan palawija ke tanaman perkebunan. Selain itu, lebih tingginya rata-rata pendapatan di subsektor tanaman perkebunan dibandingkan dengan rata-rata pendapatan di subsektor tanaman padi dan palawija diduga menjadi salah satu penyebab pergeseran tersebut.

Besarnya kontribusi subsektor tanaman pangan dan perkebunan terhadap RTUP nasional menunjukkan kedua sektor ini merupakan subsektor

“Proporsi rata-rata pendapatan RTUP dari sektor pertanian dominan berasal dari tanaman padi & palawija serta tanaman perkebunan.”

andalan. Untuk subsektor lainnya (Tanaman Hortikultura, Peternakan, dan lainnya) memberikan sumbangan yang relatif kecil, bahkan proporsi subsektor peternakan terhadap pendapatan RTUP mengalami penurunan di tahun 2014.

Tabel 4.3.

Struktur
Pendapatan
RTUP
Nasional
Berdasarkan
Subsektor
Pertanian,
2004 dan
2014

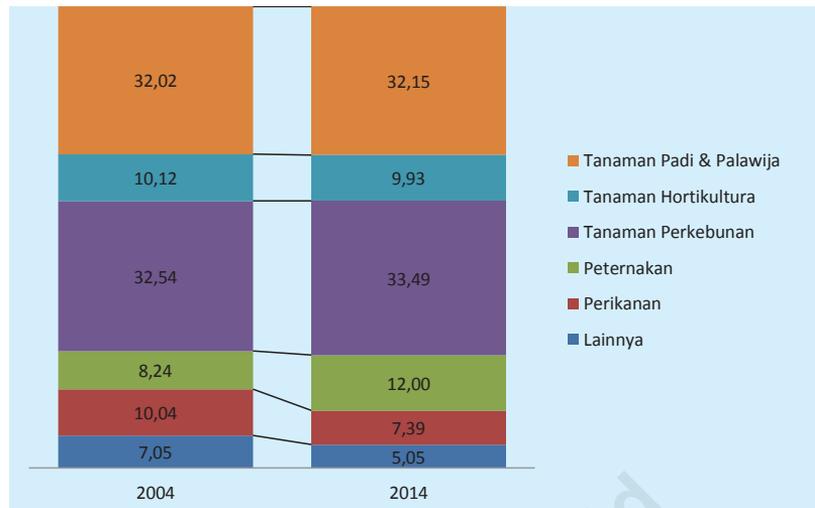
Subsektor	Berusaha (%)		Buruh/Karyawan (%)	
	2004	2014	2004	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanaman Padi dan Palawija	51,94	51,99	57,83	54,08
Tanaman Hortikultura	7,17	7,58	7,51	7,53
Tanaman Perkebunan	25,92	28,52	13,49	27,31
Peternakan	6,28	5,80	10,88	2,15
Lainnya (perikanan, kehutanan dan jasa pertanian dan pembibitan tanaman)	8,68	6,12	10,29	8,93

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST 2003 dan ST 2013 (diolah)

Tanaman padi dan palawija masih menjadi sumber pendapatan utama RTUP di wilayah Jawa, Bali, dan Nusra. Peningkatan proporsi pendapatan dari tanaman padi dan palawija terjadi di Provinsi Aceh, Sulawesi, DIY, dan Jawa Barat. Subsektor perkebunan menjadi sumber pendapatan utama RTUP di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, dan proporsi rata-rata pendapat pada sektor ini juga mengalami peningkatan.

Secara nasional, persentase rata-rata pendapatan rumah tangga pertanian dari subsektor tanaman hortikultura mengalami penurunan. Hanya 11 provinsi yang mengalami peningkatan yaitu NTB, Sulawesi Tengah, Papua, Jawa Timur, DIY, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Riau, Jawa Barat, Maluku, dan Sulawesi Tenggara dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,8 persen. Proporsi rata-rata pendapatan dari subsektor peternakan mengalami peningkatan di seluruh provinsi kecuali di NTT, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Proporsi pendapatan dari subsektor perikanan hanya meningkat di 10 provinsi yaitu Gorontalo, Riau, Banten, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, NTT, Sumatera Utara, dan Papua dengan rata-rata peningkatan sebesar 8,4 persen.

“ Proporsi rata-rata pendapatan RTUP dari luar sektor pertanian dominan berasal dari sektor perdagangan.”



Gambar 4.13.

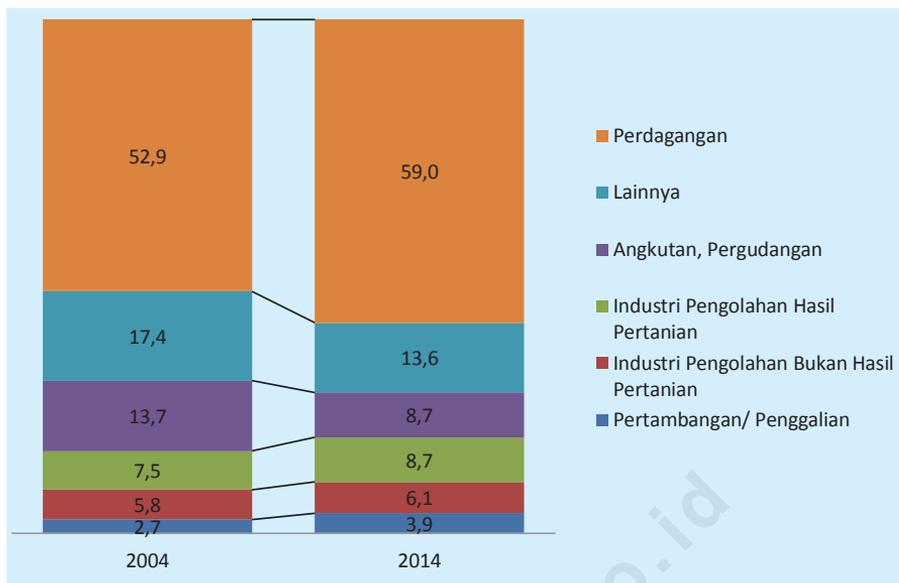
Proporsi Rata-Rata Pendapatan RTUP dari Sektor Pertanian Selama Setahun yang Lalu, 2004 dan 2014

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST 2003 dan ST 2013 (diolah)

Rendahnya pendapatan yang diperoleh petani dari usaha pertanian mendorong petani untuk melakukan kegiatan-kegiatan di sektor luar pertanian sebagai sumber pendapatan tambahan dalam upaya memenuhi kebutuhan. Lebih dari 50 persen sumber pendapatan rumah tangga pertanian dari usaha di luar sektor pertanian terbesar berasal dari sektor perdagangan. Proporsi rata-rata pendapatan RTUP dari sektor perdagangan meningkat di seluruh provinsi, kecuali di Jawa Tengah dan Maluku. Sektor nonpertanian lainnya yang mengalami peningkatan proporsi rata-rata pendapatan RTUP adalah sektor industri hasil pertanian dan sektor pertambangan. Peningkatan proporsi rata-rata pendapatan RTUP sektor industri hasil pertanian terjadi hampir di sebagian wilayah di Sumatera (kecuali Jambi dan Sumatera Utara), Jawa (kecuali Banten), Bali-Nusra, dan Maluku-Papua (kecuali Maluku Utara) serta Sulawesi Selatan dan Gorontalo, sedangkan peningkatan proporsi rata-rata pendapatan sektor pertambangan terjadi hampir di seluruh provinsi kecuali di DKI, Jawa Timur, NTT, dan Bangka Belitung.

Gambar 4.14.

Proporsi Rata-Rata Pendapatan RTUP dari Luar Sektor Pertanian Selama Satu Tahun yang Lalu, 2004 dan 2014

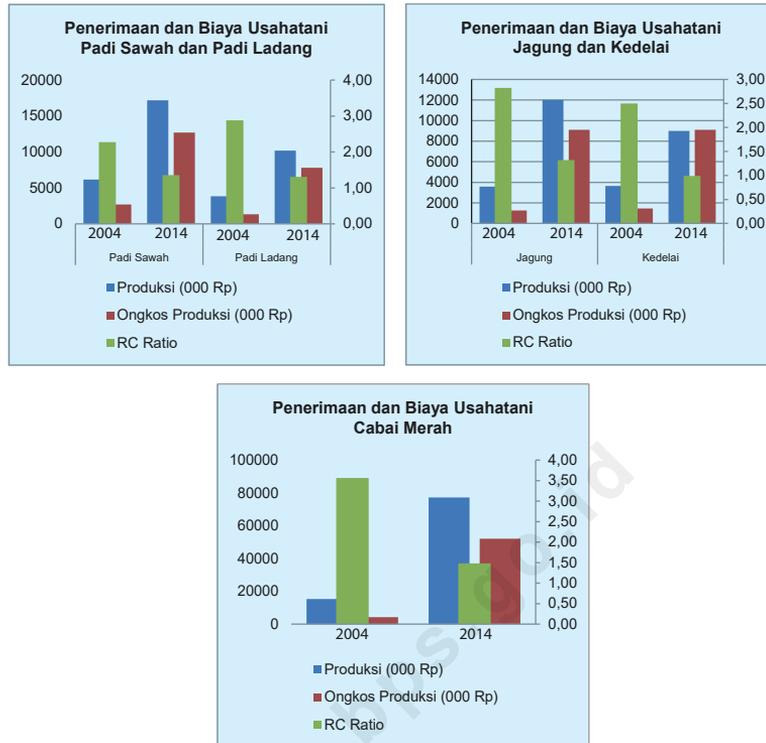


Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST 2003 dan ST 2013 (diolah)

4.2.3 Struktur Ongkos Usahatani

“Penurunan RC ratio menunjukan efisiensi dalam usahatani tanaman pangan dan tanaman hortikultura selama sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan.”

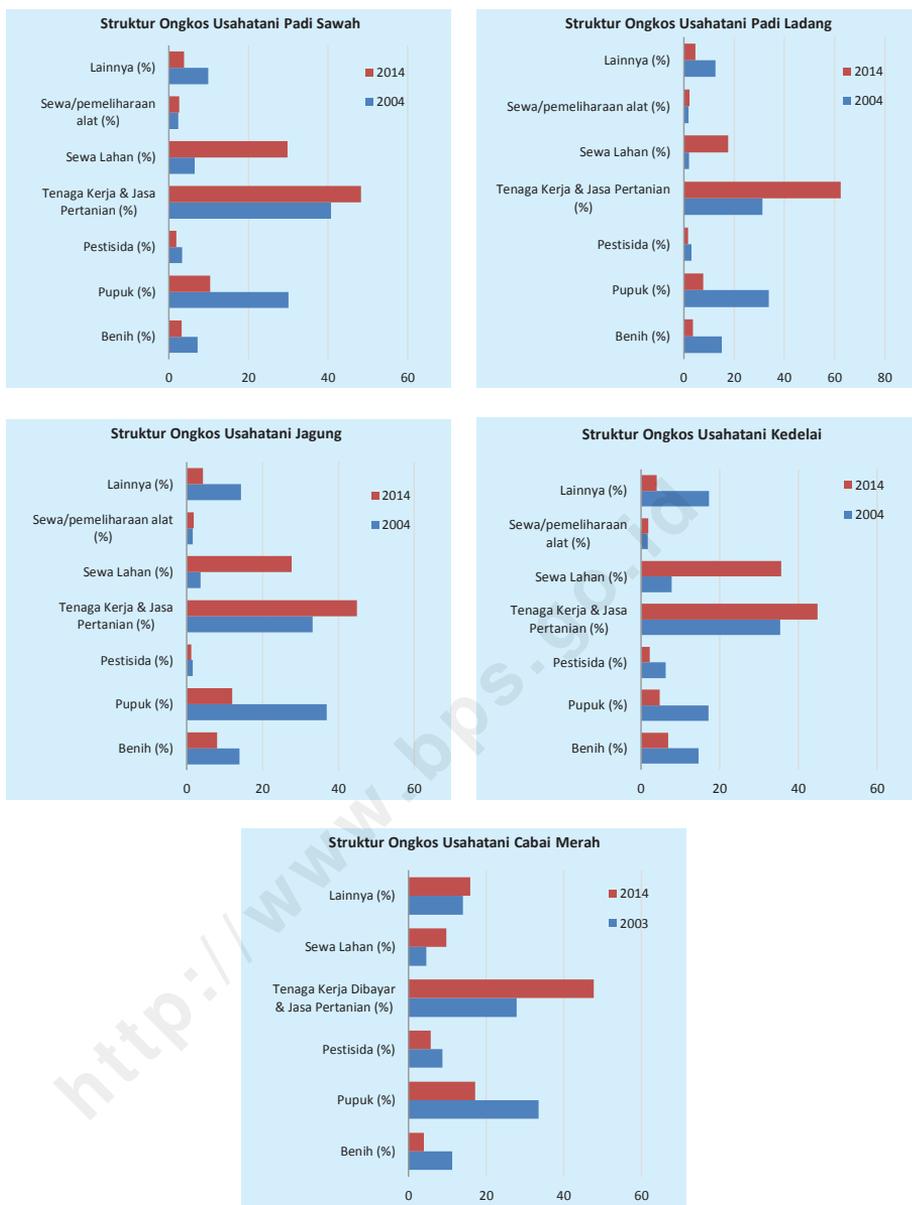
Indikator terjadinya transformasi struktural pada usahatani dapat terlihat dari adanya perubahan pada struktur ongkos usahatani. Dalam kurun waktu 10 tahun nilai produksi tanaman pangan (padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai) maupun tanaman hortikultura (cabai merah) cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian, peningkatan ongkos produksi ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan nilai produksi. Akibatnya, *Revenue Cost Ratio* usahatani tanaman pangan maupun tanaman hortikultura mengalami penurunan meskipun nilai *RC ratio* usahatani masih bernilai lebih dari 1. Penurunan *RC ratio* ini menunjukkan efisiensi dalam usahatani tanaman pangan maupun tanaman hortikultura selama sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan, namun demikian usahatani tanaman pangan maupun tanaman hortikultura masih layak untuk diusahakan.



Gambar 4.15.
Penerimaan dan Biaya Usahatani Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura, 2004 dan 2014

Sumber: BPS, Struktur Ongkos Usaha Pertanian ST2003 dan Struktur Ongkos Usaha Pertanian Komoditas Strategis dan Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan 2014

Tahun 2004 proporsi komponen biaya terbesar dalam usahatani pada tanaman pangan (padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai) serta tanaman hortikultura (cabai merah) adalah tenaga kerja, pupuk dan benih. Perubahan terjadi pada struktur ongkos usahatani tahun 2014 dimana proporsi biaya benih, pupuk dan pestisida mengalami penurunan, sedangkan proporsi biaya tenaga kerja dan sewa lahan mengalami peningkatan. Kondisi tersebut hampir terjadi di seluruh usahatani tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Proporsi komponen biaya tenaga kerja mengalami peningkatan tertinggi pada usahatani padi ladang yaitu meningkat hingga 31,05 persen, sedangkan proporsi komponen sewa lahan mengalami peningkatan tertinggi pada usahatani kedelai dengan peningkatan sebesar 27,88 persen.



Gambar 4.16.
Struktur Ongkos Usahatani Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura, 2004 dan 2014

Sumber: BPS, Struktur Ongkos Usaha Pertanian ST2003 dan Struktur Ongkos Usaha Pertanian Komoditas Strategis dan Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Sekitar Hutan 2014

4.3 Transformasi Karakteristik Rumah Tangga Usaha Pertanian

4.3.1 Proporsi Rumah Tangga Pertanian Terhadap Rumah Tangga Keseluruhan

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, proporsi rumah tangga petani (RTP) terhadap jumlah rumah tangga keseluruhan cenderung mengalami penurunan.

"Jumlah rumah tangga keseluruhan cenderung mengalami penurunan."

Penurunan ini menggambarkan semakin kurang diminatnya sektor pertanian sebagai tempat bermata pencaharian. Banyaknya petani yang meninggalkan profesi sebagai petani diduga karena penghasilan yang diterima oleh petani dari hasil usahatani relatif kecil, sehingga berdampak pada kesejahteraan petani. Penurunan signifikan proporsi jumlah RTP terhadap rumah tangga keseluruhan hampir terjadi di seluruh wilayah di Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, dan Sulawesi. Penurunan signifikan proporsi RTP terhadap rumah tangga keseluruhan terbesar terjadi di Kalimantan, dengan penurunan mencapai 8,87 persen, sedangkan penurunan signifikan proporsi RTP terhadap rumah tangga keseluruhan terkecil terjadi di Sumatera yaitu sebesar 2,11 persen.



Gambar 4.17.

Persentase Rumah Tangga Pertanian terhadap Rumah Tangga Keseluruhan, 2004 dan 2014

Sumber: BPS, Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap)

4.3.2 Proporsi Rumah Tangga Usaha Pertanian Terhadap Rumah Tangga Keseluruhan

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) terbesar masih didominasi di wilayah Jawa. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah RTUP terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dibandingkan hasil sensus tahun 2003, hasil sensus tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah RTUP mengalami penurunan dari sekitar 31,2 juta menjadi 26,1 juta. Penurunan jumlah RTUP selama 10 tahun terakhir mencapai 16,3 persen. Penurunan jumlah RTUP hampir terjadi di semua provinsi kecuali di Provinsi Riau, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua yang justru jumlah RTUP mengalami peningkatan.

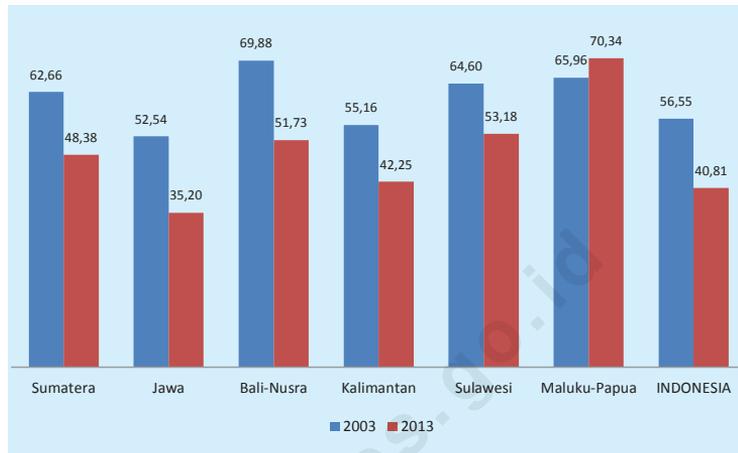
"Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian terbesar berada di Jawa Timur."

Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Pertanian (RUTP)		Pertumbuhan	
	2003	2013	Absolut	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NAD	699.370	644.851	(54.519)	(7.80)
Sumatera Utara	1.492.104	1.327.759	(164.345)	(11.01)
Sumatera Barat	709.351	644.610	(64.741)	(9.13)
Riau	615.245	651.508	36.263	5.89
Jambi	414.986	431.589	16.603	4.00
Sumatera Selatan	971.458	958.724	(12.734)	(1.31)
Bengkulu	280.964	277.136	(3.828)	(1.36)
Lampung	1.293.192	1.226.455	(66.737)	(5.16)
Bangka Belitung	139.315	124.970	(14.345)	(10.30)
Dki Jakarta	52.583	12.287	(40.296)	(76.63)
Jawa Barat	4.345.148	3.058.612	(1.286.536)	(29.61)
Jawa Tengah	5.770.801	4.290.619	(1.480.182)	(25.65)
D I Yogyakarta	574.920	495.781	(79.139)	(13.77)
Jawa Timur	6.314.370	4.978.358	(1.336.012)	(21.16)
Banten	898.021	592.841	(305.180)	(33.98)
Bali	492.394	408.233	(84.161)	(17.09)
Nusa Tenggara Barat	719.875	600.613	(119.262)	(16.57)
Nusa Tenggara Timur	729.483	778.854	49.371	6.77
Kalimantan Barat	614.738	627.638	12.900	2.10
Kalimantan Tengah	302.414	270.914	(31.500)	(10.42)
Kalimantan Selatan	471.972	432.328	(39.644)	(8.40)
Kalimantan Timur	242.127	225.349	(16.778)	(6.93)
Sulawesi Utara	324.374	253.503	(70.871)	(21.85)
Sulawesi Tengah	396.622	401.891	5.269	1.33
Sulawesi Selatan	1.249.349	1.166.793	(82.556)	(6.61)
Sulawesi Tenggara	314.011.00	316.262.00	2.251	0.72
Gorontalo	133.083.00	122.515.00	(10.568)	(7.94)
Maluku	184.376.00	175.362.00	(9.014)	(4.89)
Maluku Utara	129.246.00	130.233.00	987	0.76
Papua	356.292.00	508.881.00	152.589	42.83
Indonesia	31.232.184	26.135.469	(5.096.715)	(16.32)

Tabel 4.4.
Jumlah Rumah
Tangga Usaha
Pertanian
Menurut
Provinsi, 2003
dan 2013

Sumber: BPS, Laporan Hasil Sensus Pertanian 2003 dan 2013 (Pencacahan Lengkap)

Berdasarkan hasil analisis uji beda dengan tingkat signifikansi 0,1 (10 persen), proporsi RTUP terhadap rumah tangga keseluruhan dalam sepuluh tahun terakhir cenderung mengalami penurunan signifikan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, dan Sulawesi. Penurunan terbesar terjadi di wilayah Bali-Nusra dengan penurunan proporsi RTUP mencapai 18,15 persen.



Gambar 4.18.

Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian Terhadap Rumah Tangga Keseluruhan, 2003 dan 2013

Sumber: BPS, Laporan Hasil Sensus Pertanian 2003 dan 2013 (Pencacahan Lengkap)

4.3.3 Proporsi Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan Terhadap Rumah Tangga Keseluruhan

Jumlah rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan dalam kurun waktu 2003-2013 menurun sebesar 15 persen atau sebesar 4,6 juta rumah tangga usaha pertanian. Penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan terjadi di 22 provinsi. Provinsi dengan penurunan terbesar berada di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta (-79,87 persen), Banten (-33,25 persen), Jawa Barat (-22,34 persen), Jawa Tengah (-25,18 persen) dan Jawa Timur (-20,32 persen). Namun demikian, terdapat 11 provinsi yang menunjukkan peningkatan jumlah rumah tangga usaha pertanian yaitu Provinsi Papua, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Riau, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan (Tabel 4.5).

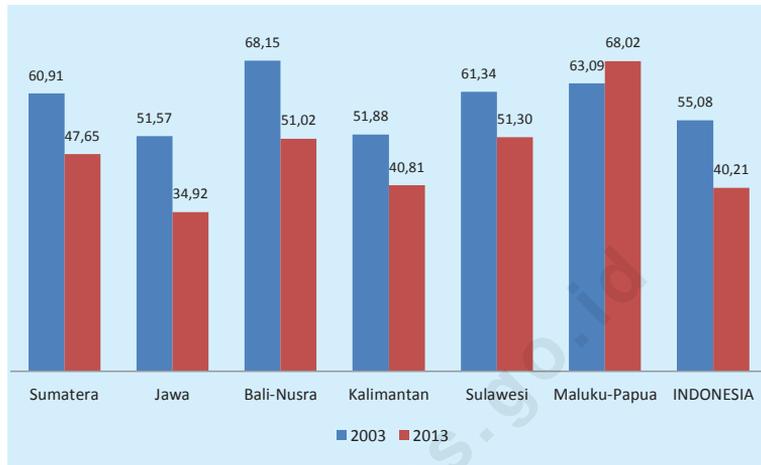
Provinsi	Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan			
	2003	2013	Pertumbuhan	
			Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	691.454	637.778	-53.676	-7,76
Sumatera Utara	1.451.813	1.308.393	-143.420	-9,88
Sumatera Barat	695.739	640.695	-55.044	-7,91
Riau	511.395	568.070	56.675	11,08
Jambi	401.052	426.647	25.595	6,38
Sumatera Selatan	946.858	949.801	2.943	0,31
Bengkulu	275.769	275.559	-210	-0,08
Lampung	1.272.932	1.218.927	-54.005	-4,24
Kepulauan Bangka Belitung	127.412	117.488	-9.924	-7,79
Kepulauan Riau	56.086	50.230	-5.856	-10,44
DKI Jakarta	47.262	9.515	-37.747	-79,87
Jawa Barat	4.242.003	3.039.716	-1.202.287	-28,34
Jawa Tengah	5.697.473	4.262.608	-1.434.865	-25,18
DI Yogyakarta	573.092	495.401	-77.691	-13,56
Jawa Timur	6.189.481	4.931.506	-1.257.975	-20,32
Banten	875.287	584.259	-291.028	-33,25
Bali	485.531	404.507	-81.024	-16,69
Nusa Tenggara Barat	686.172	587.617	-98.555	-14,36
Nusa Tenggara Timur	722.039	770.864	48.825	6,76
Kalimantan Barat	594.483	616.894	22.411	3,77
Kalimantan Tengah	273.806	261.227	-12.579	-4,59
Kalimantan Selatan	450.903	420.352	-30.551	-6,78
Kalimantan Timur	180.515	165.413	-15.102	-8,37
Kalimantan Utara	34.595	39.369	4.774	13,80
Sulawesi Utara	300.834	246.394	-54.440	-18,10
Sulawesi Tengah	372.636	387.258	14.622	3,92
Sulawesi Selatan	1.049.449	950.241	-99.208	-9,45
Sulawesi Tenggara	293.555	299.926	6.371	2,17
Gorontalo	118.257	117.248	-1.009	-0,85
Sulawesi Barat	160.863	179.814	18.951	11,78
Maluku	178.497	170.169	-8.328	-4,67
Maluku Utara	124.480	127.865	3.385	2,72
Papua Barat	71.131	65.458	-5.673	-7,98
Papua	266.728	424.058	157.330	58,99
Indonesia	30.419.582	25.751.267	-4.668.315	-15,35

Tabel 4.5

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan Menurut Provinsi, 2003 dan 2013

Sumber: BPS, Laporan Hasil Sensus Pertanian 2003 dan 2013 (Pencacahan Lengkap)

Dari hasil uji beda menunjukkan bahwa proporsi RTUP pengguna lahan terhadap rumah tangga keseluruhan mengalami penurunan signifikan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan dan Sulawesi. Penurunan proporsi RTUP pengguna lahan terbesar terjadi di wilayah Bali-Nusra dengan penurunan sebesar 17,13 persen.



Gambar 4.19.

Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan terhadap Rumah Tangga Keseluruhan, 2003 dan 2013

Sumber: BPS, Laporan Hasil Sensus Pertanian 2003 dan 2013 (Pencacahan Lengkap)

4.3.4 Proporsi Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem Terhadap Rumah Tangga Keseluruhan

Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 14,25 juta rumah tangga pertanian gurem atau sebesar 55 persen dari seluruh rumah tangga pengguna lahan. Jika dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu, telah terjadi penurunan persentase rumah tangga petani gurem sebesar 25,07 persen. Penurunan jumlah usaha rumah tangga pertanian gurem terjadi di 26 provinsi. Provinsi dengan penurunan terbesar yaitu DKI Jakarta (-81,04 persen), Kalimantan Timur (-51,27 persen), Kepulauan Bangka Belitung (-50,71 persen), Sumatera Selatan (-49,13 persen), dan Riau (-45,53 persen). Namun demikian, terdapat tujuh provinsi yang menunjukkan peningkatan jumlah rumah tangga usaha pertanian gurem yaitu Provinsi Papua (79,87 persen), Kalimantan Utara (28,86 persen), Sulawesi Barat (16,38 persen), Maluku (13,39 persen), Aceh (11,22 persen), Maluku Utara (11,07 persen), dan Sulawesi Tengah (5,92 persen) (Tabel 4.6).

Meskipun hasil Sensus Pertanian 2013 mencatat bahwa terjadi penurunan jumlah petani gurem di Jawa Barat sebesar 28,34 persen, Jawa Tengah (25,18 persen), dan Jawa Timur (20,32 persen) dibanding tahun 2003, tetap saja ketiga provinsi ini merupakan yang terbesar dari jumlah maupun persentasenya terhadap jumlah petani pengguna lahan (Tabel 4.4).

Provinsi	Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem			
	2003	2013	Pertumbuhan	
			Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	248.823	276.729	27.906	11,22
Sumatera Utara	751.330	570.185	-181.145	-24,11
Sumatera Barat	357.797	275.135	-82.662	-23,10
Riau	125.418	68.560	-56.858	-45,33
Jambi	101.836	65.499	-36.337	-35,68
Sumatera Selatan	218.091	110.932	-107.159	-49,13
Bengkulu	49.147	35.974	-13.173	-26,80
Lampung	447.126	362.148	-84.978	-19,01
Kepulauan Bangka Belitung	52.891	26.069	-26.822	-50,71
Kepulauan Riau	28.379	20.545	-7.834	-27,60
Dki Jakarta	45.428	8.611	-36.817	-81,04
Jawa Barat	3.501.867	2.298.193	-1.203.674	-34,37
Jawa Tengah	4.629.877	3.312.235	-1.317.642	-28,46
D I Yogyakarta	479.780	424.557	-55.223	-11,51
Jawa Timur	4.893.626	3.755.837	-1.137.789	-23,25
Banten	634.415	379.888	-254.527	-40,12
Bali	313.111	257.181	-55.930	-17,86
Nusa Tenggara Barat	446.040	350.131	-95.909	-21,50
Nusa Tenggara Timur	224.987	289.917	64.930	28,86
Kalimantan Barat	120.575	81.286	-39.289	-32,58
Kalimantan Tengah	45.564	29.083	-16.481	-36,17
Kalimantan Selatan	193.773	133.853	-59.920	-30,92
Kalimantan Timur	56.075	27.326	-28.749	-51,27
Kalimantan Utara	9.084	6.343	-2.741	-30,17
Sulawesi Utara	103.154	72.055	-31.099	-30,15
Sulawesi Tengah	69.935	74.073	4.138	5,92
Sulawesi Selatan	408.673	338.108	-70.565	-17,27
Sulawesi Tenggara	72.188	63.809	-8.379	-11,61
Gorontalo	44.791	40.959	-3.832	-8,56
Sulawesi Barat	43.560	50.696	7.136	16,38
Maluku	68.913	78.140	9.227	13,39
Maluku Utara	19.679	21.857	2.178	11,07
Papua Barat	39.344	37.570	-1.774	-4,51
Papua	169.774	305.380	135.606	79,87
Indonesia	19.015.051	14.248.864	-4.766.187	-25,07

Tabel 4.6

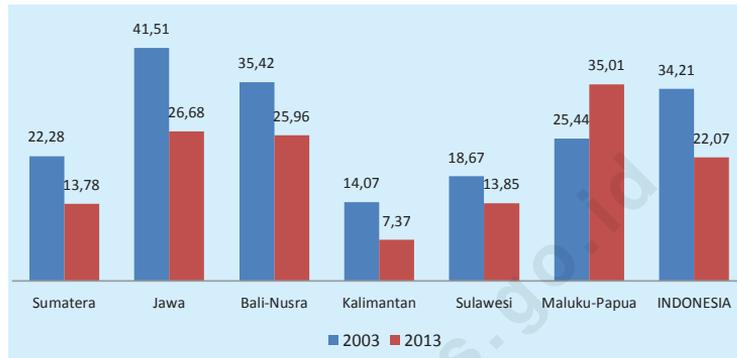
Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem Menurut Provinsi, 2003 dan 2013

Sumber: BPS, Laporan Hasil Sensus Pertanian 2003 dan 2013 (Pencacahan Lengkap)

Penurunan proporsi RTUP gurem terhadap rumah tangga keseluruhan signifikan terjadi hampir diseluruh wilayah Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, dan Sulawesi. Penurunan signifikan RTP gurem terbesar terjadi di wilayah Jawa yaitu sebesar 14,83 persen. Penurunan jumlah RTP gurem diindikasikan karena peningkatan jumlah dan persentase petani dengan luas di atas 0,5 hektar. Selain itu banyak petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar yang menjual atau menyewakan lahan mereka, kemudian beralih profesi ke sektor nonpertanian.

Gambar 4.20.

Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem terhadap Rumah Tangga Keseluruhan, 2003 dan 2013



Sumber: BPS, Laporan Hasil Sensus Pertanian 2003 dan 2013 (Pencacahan Lengkap)

Berbeda dengan wilayah lainnya, di Maluku-Papua menunjukkan bahwa jumlah RTP, RTUP, RTP Pengguna Lahan, maupun RTP Gurem mengalami peningkatan proporsi di tahun 2013, namun demikian berdasarkan hasil analisis uji beda yang dilakukan menunjukkan peningkatan tersebut tidak signifikan, artinya proposi persentase jumlah RTP, RTUP, RTP pengguna lahan maupun RTP gurem pada tahun 2003 dan 2013 di wilayah Maluku-Papua adalah sama.

Tabel 4.7.

Tingkat Signifikansi Hasil Uji Beda RTP, RTUP, RTP Pengguna Lahan, RTP Gurem Terhadap Rumah Tangga Keseluruhan, 2003 dan 2013

Wilayah	RTP	RTUP	RTPLahan	RTP Gurem
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera	0,001	0,000	0,000	0,000
Jawa	0,042	0,006	0,006	0,005
Bali-Nusra	0,028	0,018	0,013	0,024
Kalimantan	0,002	0,003	0,003	0,019
Sulawesi	0,031	0,005	0,004	0,013
Maluku-Papua	0,931	0,766	0,794	0,571
Indonesia	0,042	0,000	0,000	0,000

Keterangan: Berbeda signifikan jika tingkat signifikansinya $\leq 0,1$

4.3.5 Proporsi Rumah Tangga Usaha Pertanian Per Subsektor

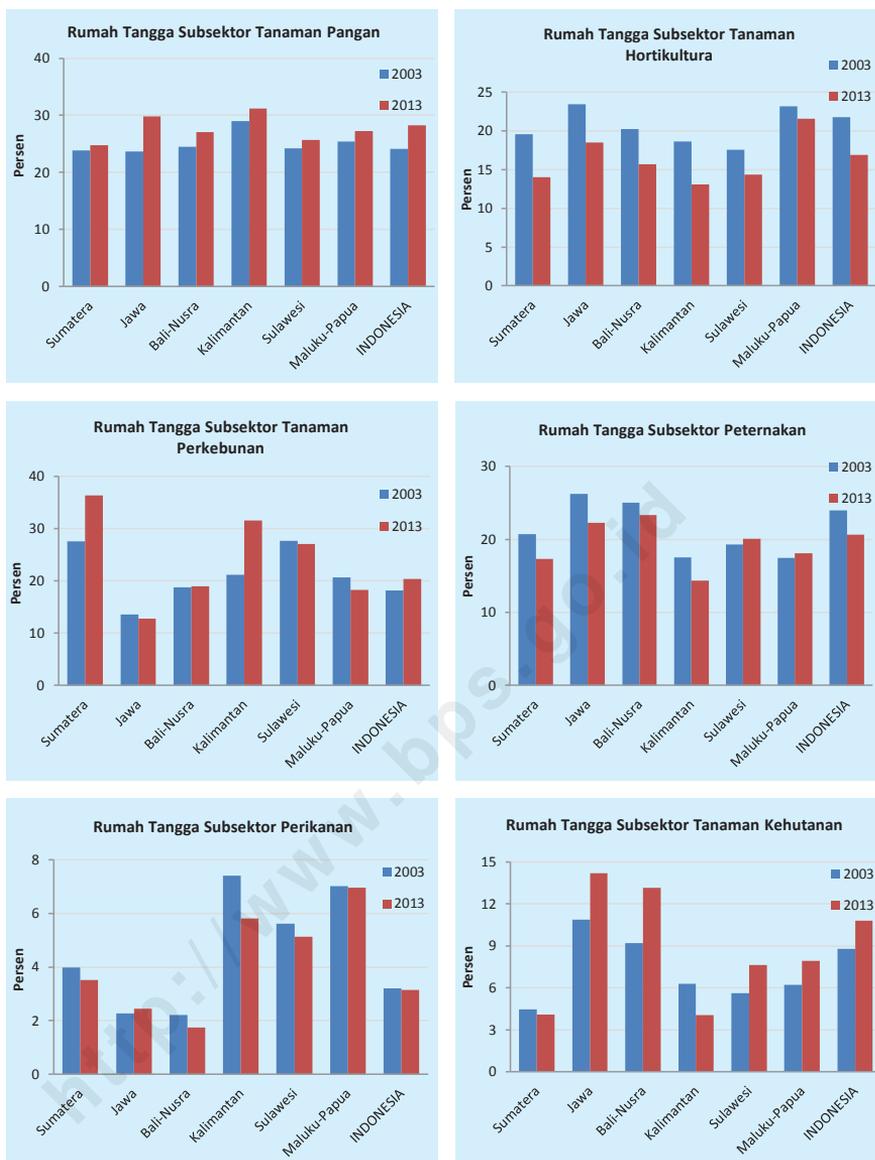
“Semakin banyak RTP di Sumatera dan Kalimantan yang sumber penghasilannya utamanya dari perkebunan.”

Rumah tangga usaha pertanian (RTUP) di Indonesia masih didominasi oleh subsektor tanaman pangan (17,7 juta rumah tangga), dan peternakan (12,9 juta rumah tangga). Subsektor yang memiliki RTUP paling sedikit adalah perikanan, walaupun terjadi peningkatan pada rumah tangga perikanan tangkap. Pada tahun 2003 tercatat sebanyak 2,49 juta rumah tangga di subsektor perikanan. Jumlah ini menurun menjadi 1,98 juta rumah tangga di tahun 2013. Penurunan ini disebabkan signifikannya penurunan rumah tangga perikanan tangkap sehingga tidak dapat dikompensasi oleh peningkatan yang cukup besar pada rumah tangga perikanan budidaya.

Secara keseluruhan pada tahun 2013 jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian mengalami penurunan. Penurunan proporsi terbesar terjadi pada RTUP subsektor hortikultura yaitu sebesar 4,93 persen. Penurunan signifikan RTUP subsektor hortikultura terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia kecuali di Bali-Nusra. Subsektor yang juga mengalami penurunan pada RTUP adalah subsektor peternakan dan perikanan. Wilayah yang mengalami penurunan signifikan pada proporsi RTUP peternakan adalah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dengan penurunan rata-rata sebesar 3,52 persen. Penurunan signifikan RTUP subsektor perikanan terjadi di wilayah Sumatera dan Sulawesi, meskipun penurunan terjadi relatif kecil yaitu hanya 0,48 persen.

Disisi lain peningkatan signifikan terjadi pada RTUP subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman kehutanan. Peningkatan signifikan proporsi RTUP subsektor tanaman pangan hanya terjadi di wilayah Kalimantan, dengan peningkatan sebesar 2,21 persen. Proporsi RTUP subsektor tanaman perkebunan meningkat signifikan di wilayah Sumatera dan Kalimantan, peningkatan tertinggi terjadi di Kalimantan mencapai 10,37 persen sedangkan di Sumatera peningkatan proporsi RTUP tanaman perkebunan yang terjadi sebesar 8,83 persen. Proporsi RTUP subsektor tanaman kehutanan meningkat signifikan di wilayah Jawa sebesar 3,30 persen, berbeda dengan di Jawa, Proporsi RTUP subsektor tanaman kehutanan di Kalimantan justru mengalami penurunan signifikan sebesar 2,24 persen.

“Proporsi Rumah Tangga Usaha Pertanian subsektor mengalami perubahan.”



Gambar 4.21.

Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian per Subsektor, 2003 dan 2013

Sumber: BPS, Potensi Pertanian Indonesia: Analisis Hasil Pencacahan Lengkap ST2003 dan ST2013

Wilayah	Tanaman Pangan	Tanaman Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan	Tanaman Kehutanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	0,721	0,000	0,001	0,000	0,012	0,398
Jawa	0,991	0,055	0,127	0,021	0,302	0,032
Bali-Nusra	0,860	0,141	0,538	0,276	0,124	0,152
Kalimantan	0,033	0,005	0,005	0,040	0,355	0,013
Sulawesi	0,574	0,008	0,595	0,300	0,037	0,162
Maluku-Papua	0,978	0,031	0,693	0,791	0,788	0,293
Indonesia	0,076	0,000	0,001	0,003	0,477	0,041

Tabel 4.8.

Tingkat Signifikansi Hasil Uji Beda Rumah Tangga Usaha Pertanian Per Subsektor, 2003 dan 2013

Keterangan: Berbeda signifikan jika tingkat signifikansinya $\leq 0,1$

4.3.6 Proposi ART Petani, ART Buruh di Sektor Pertanian dan di Luar Sektor Pertanian

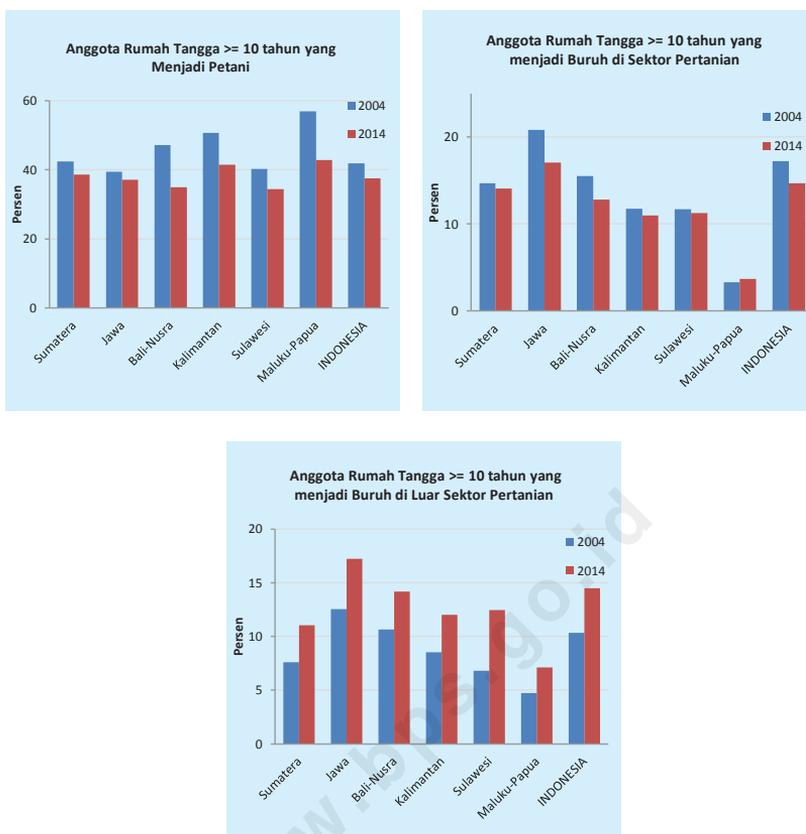
“Profesi petani dan sektor pertanian semakin kurang diminati.”

Profesi pekerjaan di sektor pertanian saat ini semakin kurang diminati oleh anggota rumah tangga petani itu sendiri. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya proporsi anggota rumah tangga usia di atas 10 tahun yang memilih menjadi petani maupun buruh di sektor pertanian. Banyak anggota rumah tangga petani, terutama yang berusia produktif menganggap profesi sebagai petani kurang menjanjikan masa depan, sehingga mereka lebih memilih bekerja di luar sektor pertanian yang lebih menjanjikan dan menaikkan tingkat kesejahteraan. Tidak hanya faktor ekonomi yang menyebabkan banyaknya peralihan profesi dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian, lahan pertanian yang semakin menyempit akibat dari konversi lahan menyebabkan semakin sulitnya petani untuk mengakses lahan pertanian sehingga banyak petani yang beralih ke sektor nonpertanian.

Pola pergeseran profesi anggota rumah tangga sebagai petani beralih ke buruh luar sektor pertanian paling banyak terjadi di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Proporsi anggota rumah tangga yang bekerja menjadi petani mengalami penurunan signifikan, sementara itu kenaikan terjadi pada proporsi anggota rumah tangga yang menjadi buruh di luar sektor pertanian. Wilayah yang paling tinggi penurunan proporsi anggota rumah tangga sebagai petani adalah Kalimantan yaitu 9,18 persen, sementara persentase penurunan proporsi anggota rumah tangga sebagai petani di Sumatera dan Sulawesi masing-masing sebesar 4,48 persen dan 5,88 persen.

“Anggota rumah tangga pertanian lebih memilih menjadi buruh di luar sektor pertanian.”

Di wilayah Jawa dan Bali-Nusra, pola pergeseran yang terjadi adalah banyak anggota rumah tangga sebagai buruh sektor pertanian beralih menjadi buruh luar sektor pertanian. Di kedua wilayah tersebut, proporsi anggota rumah tangga yang menjadi buruh di sektor pertanian mengalami penurunan signifikan, sebaliknya anggota rumah tangga yang menjadi buruh di luar sektor pertanian mengalami peningkatan. Di wilayah Jawa, proporsi anggota rumah tangga yang menjadi buruh di sektor pertanian menurun 3,77 persen, sedangkan proporsi anggota rumah tangga yang menjadi buruh di luar sektor pertanian meningkat sebesar 4,64 persen. Sama halnya di wilayah Jawa, proporsi anggota rumah tangga yang menjadi buruh di sektor pertanian di Bali-Nusra menurun 2,71 persen sedangkan proporsi anggota rumah tangga yang menjadi buruh di luar sektor pertanian meningkat sebesar 3,52 persen.



Gambar 4.22.

Persentase Anggota Rumah Tangga Menjadi Petani, Anggota Rumah Tangga Menjadi Buruh di Sektor Pertanian dan di Luar Sektor Pertanian, 2004 dan 2014

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013 (diolah)

Wilayah	Petani	Buruh di Sektor Pertanian	Perkebunan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumatera	0,031	0,175	0,001
Jawa	0,129	0,027	0,001
Bali-Nusra	0,307	0,015	0,050
Kalimantan	0,047	0,976	0,057
Sulawesi	0,010	0,603	0,006
Maluku-Papua	0,145	0,813	0,001
Indonesia	0,000	0,327	0,000

Tabel 4.9.

Tingkat Signifikansi Hasil Uji Beda ART Petani, Buruh di Sektor Pertanian dan di Luar Sektor Pertanian, 2004 dan 2014

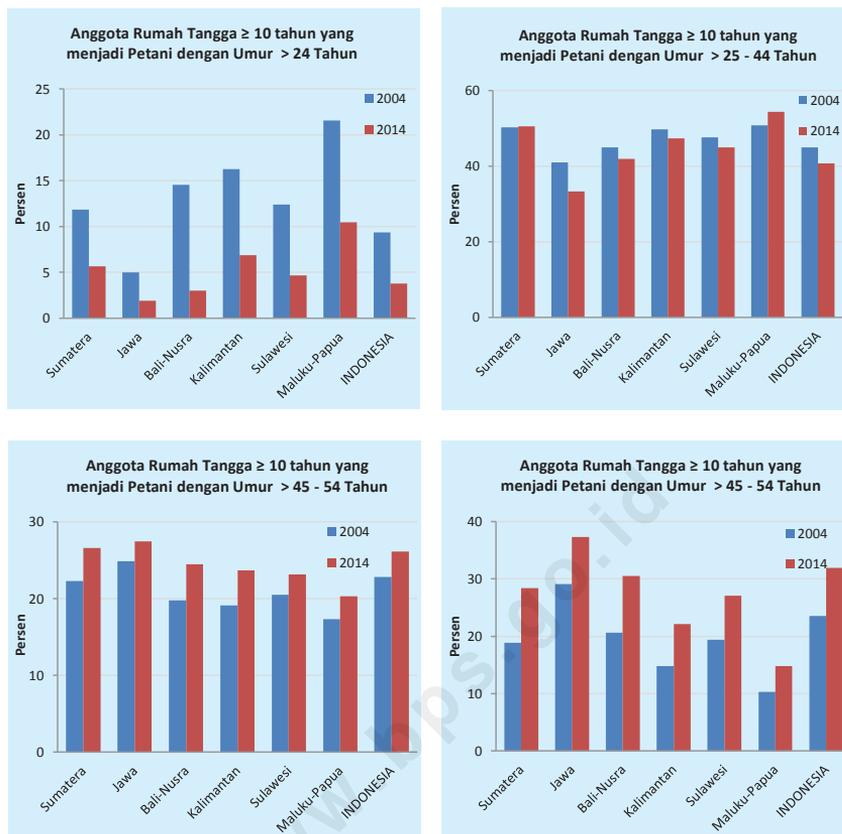
Keterangan: Berbeda signifikan jika tingkat signifikansinya $\leq 0,1$

4.3.7 Proporsi Anggota Rumah Tangga ≥ 10 tahun yang Menjadi Petani Berdasarkan Tingkat Usia

Usia petani merupakan faktor yang berkaitan erat dengan kemampuan kerja dalam melaksanakan kegiatan usaha pertanian. Pada kondisi usia produktif biasanya tenaga kerja bisa bekerja secara baik dan maksimal sehingga akan meningkatkan produktivitas. Usia petani di Indonesia masih banyak didominasi oleh usia produktif senja (di atas 45 tahun) terutama petani di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Kecenderungan yang terjadi adalah petani yang berusia produktif terus mengalami penurunan sebaliknya peningkatan terus terjadi pada petani yang berusia produktif senja. Kondisi ini menunjukkan tidak ada regenerasi, semakin sedikitnya petani yang berusia produktif mengakibatkan semakin menurunnya kualitas sumber daya manusia petani sehingga akan berdampak pada produksi pangan dalam negeri. Pergeseran usia petani terlihat paling signifikan di Wilayah Jawa, dengan penurunan proporsi petani usia produktif hingga 7,72 persen. Disisi lain, petani usia produktif senja mengalami peningkatan hingga 8,24 persen.

“Petani di Indonesia didominasi oleh petani dengan usia produktif senja.”

Usia petani dibawah 24 tahun mengalami penurunan signifikan di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, penurunan terbesar terjadi di Kalimantan yaitu 9,43 persen sedangkan penurunan terkecil di Jawa yaitu hanya 3,09 persen. Petani yang berusia sekitar 25 hingga 44 tahun juga mengalami penurunan signifikan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, dan Kalimantan, wilayah yang mengalami penurunan terbesar adalah Jawa yaitu sebesar 7,72 persen. Di sisi lain, petani yang berusia berkisar antara 45 hingga 54 tahun mengalami peningkatan signifikan di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Wilayah yang mengalami peningkatan tertinggi adalah Kalimantan yaitu sebesar 4,57 persen. Petani yang berusia di atas 55 tahun juga mengalami peningkatan signifikan di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, peningkatan tertinggi terjadi di wilayah Jawa dengan peningkatan sebesar 8,24 persen.



Gambar 4.23.

Persentase Anggota Rumah Tangga yang Menjadi Petani Berdasarkan Tingkat Usia, 2004 dan 2014

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013 (diolah)

Tabel 4.10.

Tingkat Signifikansi Hasil Uji Beda Anggota Rumah Tangga yang Menjadi Petani Berdasarkan Tingkat Usia, 2004 dan 2014

Wilayah	Golongan Umur			
	< 24 Tahun	25-44 Tahun	45 -54 Tahun	≥ 55 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera	0,000	0,003	0,004	0,000
Jawa	0,006	0,001	0,078	0,037
Bali-Nusra	0,187	0,205	0,183	0,068
Kalimantan	0,017	0,120	0,019	0,008
Sulawesi	0,001	0,600	0,072	0,000
Maluku-Papua	0,114	0,991	0,049	0,113
Indonesia	0,000	0,000	0,002	0,000

Keterangan: Berbeda signifikan jika tingkat signifikansinya $\leq 0,1$

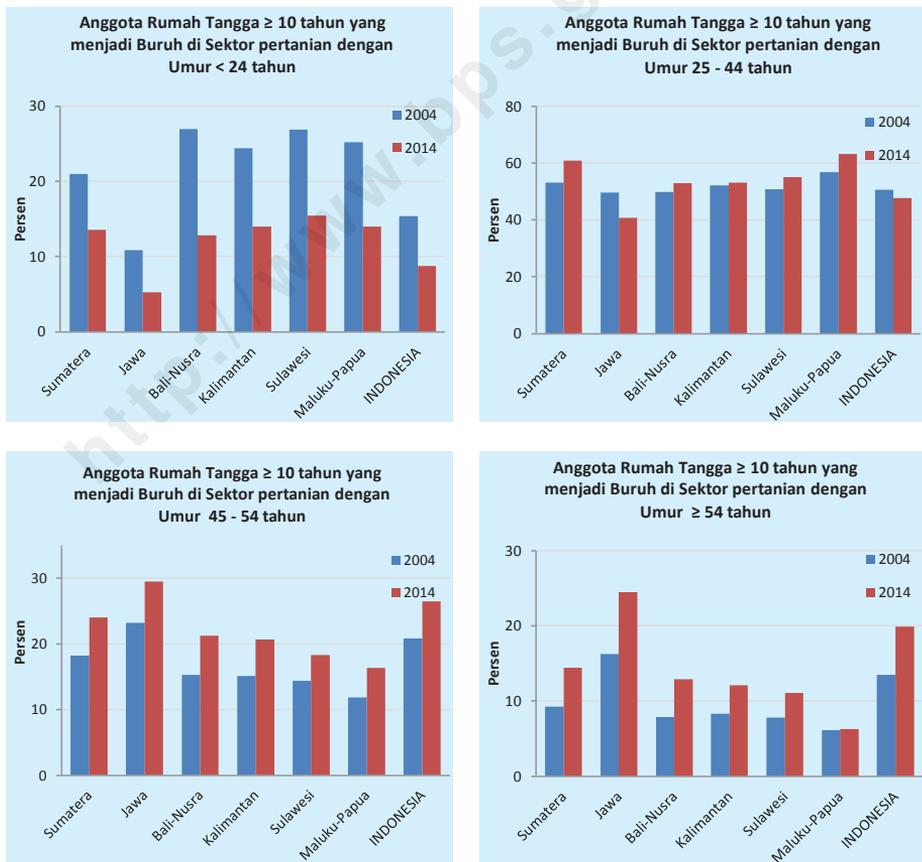
4.3.8 Proporsi Anggota Rumah Tangga ≥ 10 tahun yang Menjadi Buruh Sektor Pertanian Berdasarkan Tingkat Usia

Proporsi usia produktif senja juga masih mendominasi buruh di sektor pertanian dan jumlahnya pun cenderung mengalami peningkatan. Adanya stigma pekerjaan di sektor pertanian yang tidak menjanjikan, kesejahteraan

“Buruh tani di Indonesia didominasi oleh buruhtani dengan usia produktif senja.”

rendah, serta bergelut dengan kemiskinan mejadikan banyak generasi usia produktif lebih memilih bekerja di luar sektor pertanian seperti menjadi buruh pabrik atau sektor informal. Perubahan yang terlihat signifikan terhadap usia buruh sektor pertanian terjadi di wilayah Sumatera, Bali-Nusra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Proporsi buruh sektor pertanian yang berusia dibawah 24 tahun mengalami penurunan signifikan di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, penurunan tertinggi terjadi di Sulawesi yaitu sebesar 11,42 persen. Sementara buruh sektor pertanian yang berusia di atas 45 tahun mengalami peningkatan signifikan di seluruh wilayah kecuali di wilayah Jawa. Peningkatan usia buruh sektor pertanian terbesar berada di wilayah Bali-Nusra dengan peningkatan hingga 6,02 persen. Berdasarkan hasil analisis uji beda, Jawa dan Maluku- Papua menjadi wilayah yang tidak mengalami perubahan signifikan pada proporsi buruh di sektor pertanian berdasarkan tingkat usia, sebagian besar usia buruh sektor pertanian di Jawa didominasi oleh usia 25 hingga 54 tahun.



Gambar 4.24.

Persentase Anggota Rumah Tangga yang Menjadi Buruh Sektor Pertanian Berdasarkan Tingkat Usia, 2004 dan 2014

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013 (diolah)

Tabel 4.11.
Tingkat Signifikansi Hasil Uji Beda Anggota Rumah Tangga yang Menjadi Buruh Sektor Pertanian Berdasarkan Tingkat Usia, 2004 dan 2014

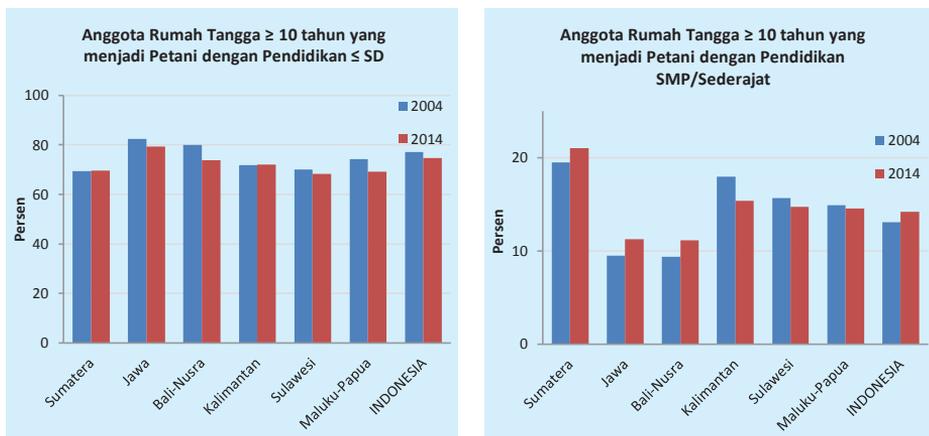
Wilayah	Golongan Umur			
	< 24 Tahun	25-44 Tahun	45 -54 Tahun	≥ 55 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera	0,000	0,109	0,002	0,009
Jawa	0,481	0,975	0,880	0,468
Bali-Nusra	0,061	0,672	0,037	0,000
Kalimantan	0,018	0,591	0,028	0,002
Sulawesi	0,007	0,495	0,024	0,006
Maluku-Papua	0,071	0,356	0,016	0,714
Indonesia	0,000	0,056	0,031	0.000

Keterangan: Berbeda signifikan jika tingkat signifikansinya $\leq 0,1$

4.3.9 Proporsi Anggota Rumah Tangga ≥ 10 tahun yang Menjadi Petani Berdasarkan Tingkat Pendidikan

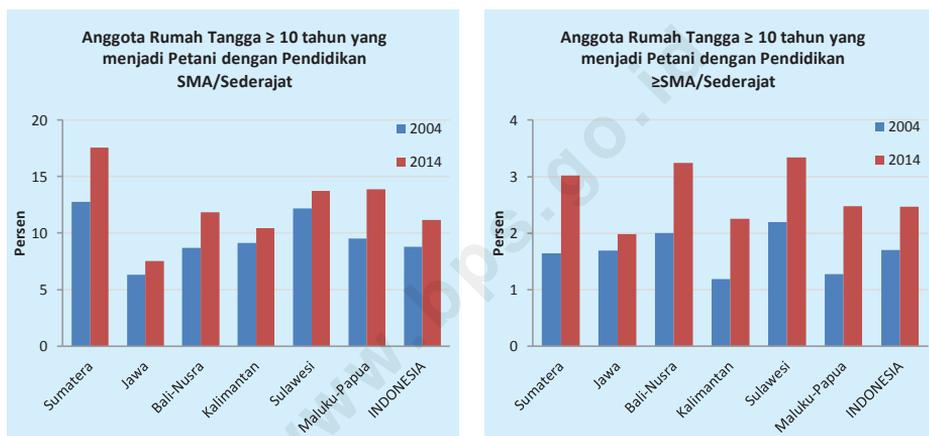
Secara umum tingkat pendidikan petani Indonesia masih rendah, sebanyak 72,6 persen tenaga kerja sektor pertanian berpendidikan sekolah dasar. Hal ini berbanding terbalik dengan industri keuangan, jasa, dan energi yang dipenuhi sumber daya manusia dengan daya inovasi tinggi. Kondisi ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh sektor pertanian di Indonesia. Rendahnya kualitas SDM berdampak pada produk pertanian yang dihasilkan kurang berdaya saing. Saat ini, mayoritas pendidikan petani Indonesia adalah lulusan sekolah dasar, namun kecenderungan yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir jumlah petani yang berpendidikan rendah mengalami penurunan meskipun penurunan yang terjadi tidak terlalu besar. Sementara itu petani yang berpendidikan hingga SMA terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mengindikasikan tingkat pendidikan petani Indonesia semakin membaik.

Hasil analisis uji beda (Gambar 4.25, Tabel 4.12) menunjukkan penurunan signifikan proporsi petani yang pendidikannya hanya tamatan SD terjadi di wilayah Sumatera dan Bali-Nusra, penurunan tertinggi terjadi di wilayah Bali-Nusra yaitu sebesar 6,21 persen. Di sisi lain, wilayah yang mengalami peningkatan petani yang berpendidikan hingga SMA signifikan terjadi di wilayah Sumatera, Bali-Nusra dan Maluku-Papua, peningkatan signifikan tertinggi terjadi di wilayah Maluku-Papua sebesar 4,37 persen. Petani dengan pendidikan diatas SMA mengalami peningkatan signifikan di semua wilayah kecuali Jawa dan Bali-Nusra.



Gambar 4.25.

Persentase Anggota Rumah Tangga yang Menjadi Petani Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2004 dan 2014



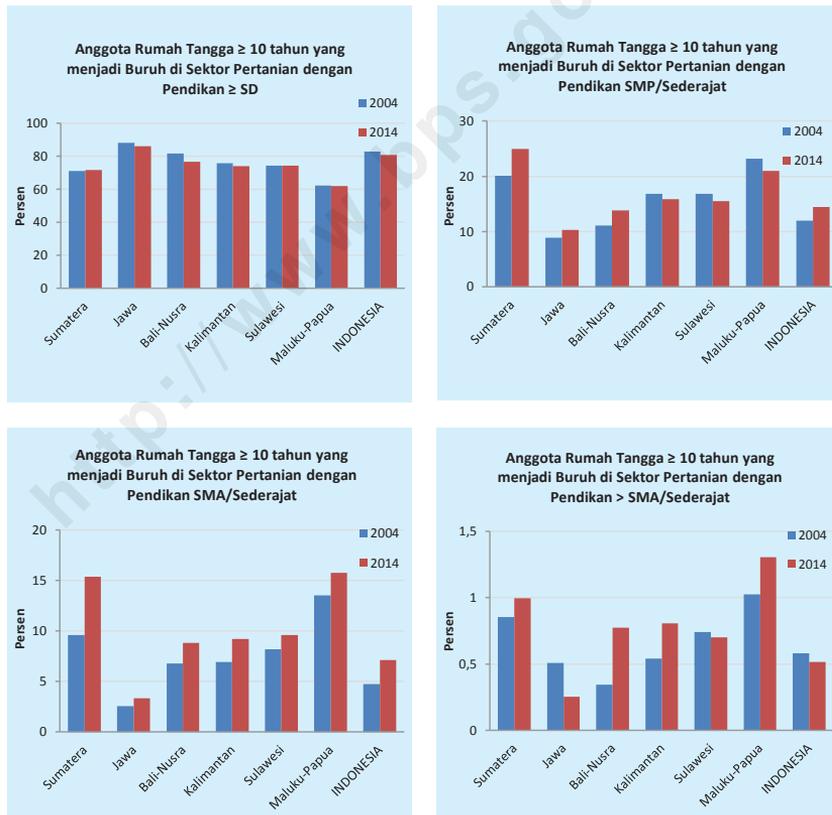
Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013 (diolah)

	Wilayah	Tingkat Pendidikan			
		≤ SD	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	> SMA
Tabel 4.12.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat Signifikansi Hasil Uji Beda Anggota Rumah Tangga yang Menjadi Petani Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2004 dan 2014	Sumatera	0,017	0,075	0,280	1,000
	Jawa	0,729	0,188	0,840	0,607
	Bali-Nusra	0,023	0,264	0,320	0,251
	Kalimantan	0,994	0,307	0,298	0,102
	Sulawesi	0,516	0,185	0,276	0,554
	Maluku-Papua	0,186	0,202	0,491	0,959
	Indonesia	0,179	0,519	0,009	0,280

Keterangan: Berbeda signifikan jika tingkat signifikansinya ≤ 0,1

4.3.10 Proporsi Anggota Rumah Tangga ≥ 10 tahun yang Menjadi Buruh Sektor Pertanian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan anggota rumah tangga yang menjadi buruh di sektor pertanian tidak berbeda jauh dengan anggota rumah tangga sebagai petani, yaitu masih didominasi oleh tamatan sekolah dasar. Dari hasil analisis uji beda yang dilakukan (Tabel 4.13), menunjukkan bahwa secara umum selama kurun waktu 10 tahun tidak terdapat perubahan yang signifikan (kecuali Sumatera) pada jumlah buruh di sektor pertanian berdasarkan tingkat pendidikan, meskipun bila melihat Gambar 4.26 di tahun 2004 dan 2014 terjadi perbedaan persentase jumlah buruh pertanian berdasarkan tingkat pendidikannya. Perubahan signifikan terlihat hanya di wilayah Sumatera, dimana terjadi penurunan yang signifikan terhadap persentase buruh pertanian yang tamatan SD serta peningkatan persentase buruh di sektor pertanian yang tingkat pendidikannya SMA dan di atas SMA.



Gambar 4.26.

Persentase Anggota Rumah Tangga yang Menjadi Buruh Sektor Pertanian Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2004 dan 2014

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013 (diolah)

Tabel 4.13.
Tingkat Signifikansi Hasil Uji Beda Anggota Rumah Tangga yang Menjadi Buruh Sektor Pertanian Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2004 dan 2014

Wilayah	Tingkat Pendidikan			
	≤ SD	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	> SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera	0,094	0,955	0,008	0,001
Jawa	0,133	0,626	0,425	0,385
Bali-Nusra	0,240	0,136	0,047	0,108
Kalimantan	0,900	0,367	0,051	0,004
Sulawesi	0,843	0,168	0,170	0,011
Maluku-Papua	0,888	0,580	0,023	0,006
Indonesia	0,038	0,314	0,000	0,085

Keterangan: Berbeda signifikan jika tingkat signifikansinya ≤ 0,1



5

**Determinan
Transformasi
Struktural
Usahatani dan
Petani Indonesia**

BAB 5

Determinan Transformasi Struktural Usahatani dan Petani Indonesia

“Faktor penguasaan lahan, pendapatan, dan pendidikan menjadi determinan utama transformasi struktural usahatani dan petani Indonesia.”



5.1 Pengantar

Bab IV baru berbicara tentang transformasi struktural perekonomian makro yang diproksi dengan PDRB sektor pertanian dan subsektor pertanian, transformasi karakteristik rumah tangga usaha pertanian serta transformasi usahatani. Determinan transformasi struktural sendiri yang menjadi dasar permasalahan pada awal kajian belum terjawab. Bab ini akan menganalisis determinan transformasi struktural, baik pada perekonomian makro, usahatani maupun petani atau rumah tangga usaha pertanian. Spesifikasi model dibangun berdasarkan pengembangan dari kerangka pemikiran konseptual yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam model umum yang telah disajikan pada Bab III. Model umum tersebut yaitu:

a. Transformasi Struktural Perekonomian Makro

$$\text{PDRB}_{\text{pertanian}} = \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB sektor lainnya} + \beta_2 \text{PDRB subsektor pertanian} + \beta_3 \text{Karakteristik RTUP}_{it} + \beta_4 \text{Karakteristik Usahatani}_{it} + e_t$$

b. Transformasi Struktural Usahatani

$$\text{SPU} = \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{Karakteristik RTUP}_{it} + \beta_3 \text{Karakteristik Usahatani}_{it} + e_t$$

c. Transformasi Struktural Petani atau Rumah Tangga Usaha Pertanian

$$\text{ARTPETANI} = \beta_0 + \beta_1 \text{Karakteristik RTUP}_{it} + \beta_2 \text{Karakteristik Usahatani}_{it} + e_t$$

$$\text{RTUP} = \beta_0 + \beta_1 \text{Karakteristik RTUP}_{it} + \beta_2 \text{Karakteristik Usahatani}_{it} + e_t$$

5.2 Hasil Estimasi

Penjelasan hasil estimasi yang diperoleh dimulai dengan penyajian persamaan perilakunya (*structural behavior*) berdasarkan tanda dan besarnya (*magnitude and sign*), koefisien determinasi (R^2), statistik t dan F . Spesifikasi model yang diestimasi diupayakan memenuhi kriteria baik secara logika ekonomi dan empiris, kriteria statistika maupun kriteria ekonometrika.

“Hasil estimasi model cukup representatif dalam menggambarkan faktor-faktor internal.”

Hasil estimasi menunjukkan *goodness of fit* (R^2) yang cukup baik dengan P -value untuk F -stat lebih kecil dari 0,001. R -squared (R^2) berkisar antara 55 persen sampai 98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum variabel-variabel independen yang ada dalam persamaan perilaku mampu menjelaskan dengan baik variabel dependen. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model terbebas dari heteroskedastisitas, multikolinieritas serta model memiliki *error term* yang menyebar normal. Secara umum hasil estimasi menunjukkan arah (tanda) yang sesuai dengan logika ekonomi dan empiris. Dengan keterbatasan data yang tersedia, hasil estimasi model dapat dinyatakan cukup representatif dalam menggambarkan faktor-faktor internal yang menjadi determinan transformasi struktural.

5.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transformasi Struktural Perekonomian Makro

Sektor pertanian memiliki peranan penting dan strategis bagi perekonomian. Secara alami pangsa sektor pertanian yang semakin menurun merupakan proses yang harus dilalui untuk kemajuan ekonomi. Secara teoritis perubahan struktur ekonomi yang ditandai dengan berkurangnya pangsa sektor pertanian (primer), dan sebenarnya secara absolut terus meningkat, dan meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri pengolahan).

Pada bagian ini akan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi perekonomian makro khususnya sektor pertanian. Perubahan proporsi PDRB sektor pertanian digunakan sebagai proksi perekonomian makro diduga dipengaruhi oleh perubahan proporsi PDRB sektor lainnya, perubahan proporsi PDRB subsektor pertanian, karakteristik petani, dan karakteristik usahatani.

Dependent Variable: PDRB_PERTANIAN

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C	-2.536366	0.852008	-2.976929	0.0070
PDRB_INDUSTRI	-0.188978	0.158388	-1.193137	0.2455
INCOME_PERTANIAN	0.016809	0.093097	0.180548	0.8584
SPU_PADIPWJ	0.151887	0.062529	2.429068	0.0238
PEND_ART_ATAS	-0.718503	0.598696	-1.200113	0.2429
PDRB_TABAMA	0.599991	0.243369	2.465350	0.0220
PDRB_PERKEBUNAN	0.350926	0.145533	2.411316	0.0247
PDRB_PERIKANAN	-0.185934	0.162308	-1.145567	0.2643

Keterangan : $R^2 = 61.4\%$, Prob (F-statistic) = 0.001641

Tabel 5.1.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Proporsi PDRB Sektor Pertanian

“Pertumbuhan sektor industri belum memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan sektor pertanian.”

“Perubahan PDRB subsektor tanaman bahan makanan dan perkebunan berpengaruh signifikan terhadap perubahan PDRB sektor pertanian.”

Hasil estimasi disajikan pada Tabel 5.1. Dari tabel tersebut terlihat bahwa *goodness of fit* model baik dengan *F-test* yang signifikan, meskipun R^2 sebesar 61 persen. Dari tujuh parameter yang diduga, terdapat tiga variabel yang tidak signifikan yaitu variabel perubahan proporsi PDRB industri,

variabel perubahan proporsi anggota rumah tangga dengan pendidikan \geq SMA dan variabel perubahan proporsi PDRB subsektor perikanan. Variabel lainnya signifikan dengan tingkat kepercayaan paling kecil 97 persen.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa PDRB sektor pertanian dipengaruhi oleh faktor internal baik karakteristik rumah tangga usaha pertanian, usahatani maupun PDRB subsektor pertanian. PDRB sektor industri meskipun bertanda negatif akan tetapi tidak berpengaruh signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor industri belum memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan sektor pertanian. Dengan kata lain bahwa sektor industri masih lebih banyak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor dibandingkan dengan bahan baku dalam negeri (*foot lose industry*). Sehingga meskipun secara makro terjadi transformasi sektor pertanian, akan tetapi bukan dipengaruhi oleh sektor industri.

Perubahan proporsi PDRB sektor pertanian dipengaruhi oleh perubahan proporsi jumlah rumah tangga petani yang sumber penghasilan utamanya berasal dari padi palawija (SPU_PADIPWJ), perubahan proporsi PDRB subsektor tanaman bahan makanan (PDRB TABAMA) dan PDRB perkebunan. SPU_PADIPWJ yang berpengaruh positif signifikan mengkonfirmasi fakta bahwa sumber pendapatan utama RTP mayoritas berasal dari subsektor tanaman pangan yaitu padi dan palawija. Perubahan pada variabel ini akan mengakibatkan perubahan pada PDRB sektor pertanian. Sejalan dengan itu, PDRB subsektor TABAMA juga berpengaruh positif signifikan. Hal ini logis mengingat subsektor TABAMA menjadi kontributor utama PDRB sektor pertanian (sekitar 47 persen). Begitu juga dengan PDRB subsektor kehutanan menjadi kontributor ketiga. Perubahan pada kedua subsektor ini akan berpengaruh signifikan terhadap perubahan PDRB sektor pertanian.

5.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transformasi Struktural Usahatani

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Proporsi Rumah Tangga Petani

Setelah dicoba beberapa alternatif model maka diperoleh spesifikasi model untuk model perubahan proporsi rumah tangga petani yang sumber penghasilan utamanya berasal dari subsektor padi dan palawija (SPU_PADIPWJ). Hasil estimasi menunjukkan bahwa perubahan proporsi PDRB tanaman bahan makanan (PDRB_TABAMA), perubahan proporsi pendapatan rumah tangga yang berasal dari padi palawija (INCOME_PADIPWJ) dan perubahan proporsi pendapatan yang berasal dari peternakan (INCOME_PETERNAKAN) berpengaruh positif pada tingkat signifikansi $\leq 0,1$. Dua variabel lainnya yaitu perubahan proporsi rumah tangga petani pengguna lahan (RTP_LAHAN) dan perubahan proporsi pendapatan rumah tangga yang berasal dari perkebunan (INCOME_PERKEBUNAN) juga berpengaruh positif tetapi tidak signifikan pada tingkat signifikansi $\leq 0,1$.

PDRB_TABAMA dan INCOME_PADIPWJ yang berpengaruh positif signifikan menunjukkan bahwa motif ekonomi menjadi pertimbangan utama bagi petani dalam memutuskan apakah tetap menjadi petani padi palawija ataukah

beralih menjadi petani pada subsektor lainnya. Meningkatnya proporsi PDRB_TABAMA dan INCOME_PADIPWJ akan menyebabkan meningkatnya rumah tangga yang sumber penghasilannya berasal dari padi dan palawija.

Tabel 5.2. *Dependent Variable: SPU_PADIPWJ*

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transformasi (Perubahan Proporsi) Rumah Tangga Petani yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Subsektor Padi dan Palawija	Variable (1)	Coefficient (2)	Std. Error (3)	t-Statistic (4)	Prob. (5)
C		2.983158	2.893982	1.030814	0.3129
RTP_LAHAN		0.217108	0.158385	1.370763	0.1831
PDRB_TABAMA		0.877604	0.387775	2.263175	0.0329
INCOME_PADIPWJ		1.515798	0.299979	5.053022	0.0000
INCOME_PERKEBUNAN		0.171253	0.193756	0.883860	0.3855
INCOME_PETERNAKAN		0.483280	0.245134	1.971495	0.0603

Keterangan : $R^2 = 70.07\%$, Prob (F-statistic) = 0.000012

“Subsektor peternakan bersifat komplementer dengan subsektor padi & palawija.”

Temuan menarik dari hasil estimasi ini adalah INCOME_PETERNAKAN yang berpengaruh signifikan positif. Temuan ini mengkonfirmasi fakta di lapangan bahwa peternakan bersifat komplementer dengan subsektor padi palawija. Semakin meningkatnya proporsi pendapatan rumah tangga yang berasal dari peternakan, akan menyebabkan semakin meningkatnya proporsi rumah tangga yang sumber penghasilannya berasal dari padi palawija. Hal ini diduga salah satunya berkaitan dengan penyediaan sumber pakan ternak yang berasal dari limbah padi dan palawija.

5.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transformasi Struktural Petani atau Rumah Tangga Usaha Pertanian

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Proporsi Anggota Rumah Tangga Petani yang Menjadi Petani

Setelah dicoba beberapa alternatif model maka diperoleh spesifikasi model untuk model perubahan proporsi anggota rumah tangga petani yang menjadi petani (ARTPETANI). Hasil estimasi menunjukkan variabel rumah tangga petani gurem (RTP_GUREM) berpengaruh negatif, sedangkan variabel pendidikan anggota rumah tangga petani \leq SMP (PEND_ART_BAWAH) dan SMA (PEND_ART_MENENGAH) berpengaruh positif. Adapun perubahan proporsi pendapatan yang bersumber dari industri pengolahan hasil pertanian (INCOME_INDUSTRIPHP) berpengaruh negatif meskipun tidak signifikan pada tingkat signifikansi $\leq 0,1$.

Dependent Variable: ARTPETANI

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C	-11.79144	1.622190	-7.268845	0.0000
RTP_GUREM	-0.597005	0.121967	-4.894812	0.0000
PEND_ART_BAWAH	1.683163	0.611122	2.754217	0.0108
PEND_ART_MENENGAH	2.419720	0.896364	2.699485	0.0123
INCOME_INDUSTRIPHP	-0.213593	0.170774	-1.250732	0.2226

Keterangan : $R^2 = 55.17\%$, Prob (F-statistic) = 0.000348

Negatifnya RTP_GUREM menunjukkan bahwa peningkatan RTP_GUREM akan menyebabkan berkurangnya ARTPETANI. Hasil ini logis mengingat RTP gurem hanya memiliki lahan kurang dari 0,86 hektar, sehingga tidak mungkin untuk dibagi

kepada anggota rumah tangga petani. Akibatnya anggota rumah tangga petani yang menjadi petani menjadi berkurang karena tidak memiliki lahan untuk diusahakan.

Di sisi lain meningkatnya proporsi anggota rumah tangga yang berpendidikan \leq SMP (PEND_ART_BAWAH) dan SMA (PEND_ART_MENENGAH) akan menyebabkan meningkatnya proporsi ARTPETANI. Hal ini mengindikasikan anggota rumah tangga yang berpendidikan SMA atau di bawahnya tidak mampu bersaing di sektor lain, sehingga pada akhirnya menjadi petani. Dugaan ini diperkuat dengan negatifnya pengaruh dari INCOME_INDUSTRIPHP, meskipun tidak signifikan. Artinya bahwa tingkat produktivitas sektor ekonomi lainnya lebih tinggi. Sektor ekonomi lain lebih menjanjikan dibandingkan sektor pertanian. Oleh karena itu, profesi petani dan sektor pertanian semakin kurang diminati. Namun demikian karena tingkat pendidikan anggota rumah tangga petani yang relatif rendah sehingga tidak mampu bersaing dengan sektor ekonomi lainnya, maka sebagian anggota rumah tangga tetap menjadi petani. Pilihan

“ Anggota rumah tangga yang berasal dari rumah tangga petani gurem cenderung tidak menjadi petani karena tidak memiliki lahan untuk diusahakan.”

Tabel 5.3.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transformasi (Perubahan Proporsi) Anggota Rumah Tangga Petani yang Menjadi Petani

“ Petani menjadi profesi pilihan terakhir bagi anggota rumah tangga petani setelah tidak diterima di sektor ekonomi lain.”

menjadi petani lagi-lagi karena faktor ketidakmampuan bersaing di sektor lain. Profesi petani akhirnya menjadi profesi pilihan terakhir setelah tidak diterima di sektor ekonomi lain. Dengan kata lain, profesi petani bukan menjadi pilihan utama profesi. Menjadi petani bagi anggota rumah tangga petani karena “keterpaksaan”.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proporsi Rumah Tangga Usaha Pertanian

Setelah dicoba beberapa alternatif model maka diperoleh spesifikasi model untuk model perubahan proporsi rumah tangga usaha pertanian (RTUP). Hasil estimasi menunjukkan semua variabel, kecuali proporsi anggota rumah tangga dengan tingkat pendidikan SMA (PEND_ART_SMA) berpengaruh positif, meskipun untuk proporsi pendapatan yang bersumber dari sektor pertanian (INCOME_PERTANIAN) dan PEND_ART_SMA tidak signifikan pada tingkat signifikansi $\leq 0,1$.

Positifnya proporsi rumah tangga pertanian pengguna lahan (RTP_LAHAN) mengindikasikan bahwa peningkatan RTP_LAHAN akan meningkatkan proporsi RTUP. Artinya lahan sebagai salah satu faktor produksi utama memiliki peranan penting dalam mempengaruhi perubahan proporsi RTUP. Berpindahnya penguasaan lahan pertanian baik karena konversi menjadi lahan nonpertanian ataupun berpindahnya kepemilikan lahan ke orang lain akan menyebabkan berkurangnya jumlah RTUP. Dengan kata lain, dapat diduga kuat RTUP yang tidak lagi menguasai lahan akan terpaksa beralih profesi menjadi buruh pertanian atau bahkan bergerak di sektor informal sebagai pedagang kaki lima, buruh kasar atau profesi lainnya yang mengandalkan kekuatan fisik.

Dependent Variable: RTUP

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C	-1.305797	0.428535	-3.047116	0.0055
RTP_LAHAN	1.023181	0.025588	39.98651	0.0000
INCOME_PERTANIAN	0.014864	0.031881	0.466240	0.6452
INCOME_PADIPWJ	0.102584	0.034624	2.962781	0.0068
PEND_ART_MENENGAH	0.247301	0.097305	2.541488	0.0179
PEND_ART_ATAS	-0.109801	0.207877	-0.528200	0.6022

Keterangan : R² = 98.96%, Prob (F-statistic) = 0.000000

perdagangan dan lain-lain) menyebabkan semakin banyaknya RTUP yang sudah tidak menguasai lahan beralih profesi. Tingkat pendidikan anggota rumah tangga yang rendah menyebabkan profesi yang dapat dimasuki hanyalah profesi yang tidak mensyaratkan *skill* yang tinggi yaitu buruh di sektor pertanian atau sektor informal.

Dugaan di atas diperkuat dengan pengaruh dari proporsi pendapatan dari padi palawija (INCOME_PADIPWJ) yang signifikan positif. Sebagaimana diketahui bahwa RTUP padi palawija mayoritas berada di Pulau Jawa. Tingginya konversi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian (permukiman, industri,

“Lahan memiliki peranan penting dalam mempengaruhi perubahan proporsi RTUP.”

Tabel 5.4.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian

6

Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

BAB 6

Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

“Kebijakan yang dapat membawa pertanian menjadi sektor yang “menarik” sebagai sumber penghidupan sangat diperlukan.”



Kesimpulan dan implikasi kebijakan yang dihasilkan dari kajian ini adalah:

1. Pangsa sektor pertanian dalam PDB semakin menurun. Pada saat yang sama, pangsa subsektor perikanan semakin meningkat. Oleh karena itu, subsektor perikanan dapat dijadikan sumber pertumbuhan baru sehingga strategi kebijakan pengembangan perikanan perlu dirancang lebih baik dan semakin dirasakan langsung nelayan, terutama nelayan skala kecil.
2. Perubahan struktural di sektor pertanian lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal, khususnya pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan dibandingkan faktor eksternal yaitu pertumbuhan sektor industri. Pertumbuhan sektor industri belum mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan sektor pertanian. Sektor industri justru menekan pertumbuhan sektor pertanian. Oleh karena itu, pengembangan industri berbasis pertanian dan perdesaan harus menjadi strategi pembangunan ekonomi agar terdapat keterkaitan antara pengembangan sektor pertanian dan sektor industri.
3. *Revenue Cost Ratio (R/C ratio)* tanaman pangan dan hortikultura semakin menurun. Oleh karena itu, kebijakan harga *input*, harga *output*, perbaikan infrastruktur dan teknologi pertanian yang lebih inovatif sangat diperlukan. Subsidi *input* pertanian (pupuk, benih dan pestisida) wajib lebih tepat sasaran agar efisiensi produksi pertanian terjamin.

4. Proporsi Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) subsektor berubah. RTUP subsektor perkebunan meningkat, sementara RTUP subsektor hortikultura menurun. RTUP di Sumatera dan Kalimantan mengandalkan perkebunan yang terlihat dari proporsi RTUP subsektor perkebunan yang meningkat signifikan. Oleh karena itu dalam situasi anjloknya harga saat ini, kebijakan perlindungan dan mitigasi risiko usaha sangat diperlukan oleh pekebun rakyat.
5. Determinan utama transformasi struktural usahatani dan petani Indonesia yaitu: *Pertama*, faktor penguasaan lahan dan pendapatan yang mewakili aspek ekonomi. Oleh karena itu peningkatan dan distribusi penguasaan lahan pertanian menjadi faktor penentu keberlanjutan usaha di sektor pertanian, selain pentingnya peningkatan produktivitas petani agar pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian semakin meningkat. *Kedua*, faktor pendidikan yang mewakili aspek sosial. Profesi petani dan sektor pertanian semakin kurang diminati. Anggota rumah tangga pertanian lebih memilih menjadi buruh di luar sektor pertanian. Profesi petani dan sektor pertanian bukan menjadi profesi pilihan utama tetapi pilihan terakhir yang dipilih karena keterpaksaan. Kemampuan dan *skill* yang terbatas, membuat generasi muda (anggota rumah tangga petani) akhirnya menjadi petani atau buruh di sektor pertanian. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijakan yang dapat membawa sektor pertanian menjadi sektor yang "menarik" sebagai sumber penghidupan, misalnya melalui strategi kebijakan ekonomi kreatif dan pembangunan industri pedesaan sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja baru.

Daftar Pustaka

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2005. Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian ST2003. Katalog BPS : 5109. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2013. Katalog BPS: 5106009. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2005. Struktur Ongkos Usaha Pertanian ST2003. Katalog BPS 5185. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. Ringkasan Eksekutif Struktur Ongkos Usaha Pertanian Komoditas Strategis dan Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Sekitar Hutan 2014: Hasil Survei Subsektor dan Survei Kehutanan 2014. Katalog BPS 5106012. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. Potensi Pertanian Indonesia: Analisis Hasil Pencacahan Lengkap ST2013. Katalog BPS 5106008. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013 Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap). Katalog BPS 5106005. Jakarta: BPS.
- Budiharsono S. 1996. Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Daerah di Indonesia 1969-1987. Disertasi tidak diterbitkan. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Clark C. 1940. The Conditions of Economic Progress. London: Macmillan.
- Clark C. 1951. The Conditions of Economic Progress. London: pp 584. London: Macmillan.
- Chenery, HB. 1960. Pattern of Industrial Growth. American Economic Review (50):621-654.
- Fisher RA. 1935. The Design of Experiments. Edinburgh: Oliver and Boyd.
- Hoselitz BF. 1960. Sociological Aspects of Economic Growth (An Adaptation). New York: Feffer and Simons Inc.
- Koutsoyiannis A. 1977. Theory of econometrics : an introductory exposition of econometric methods. London: Macmillan.
- Kuznets S. 1965. Economic Growth and Structure: Selected Essays. New York: Norton.

- Lewis WA. 1954. Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. Manchester School 22, 139-191.
- Nazir M. 1999. Metode Penelitian Cetakan Ketiga. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pryor S, Holt T. 1998. Agribusiness as an Engine of Growth in Developing Countries. Washington D.C: US Agency for International Development.
- Rostow WW. 1960. The Stages of Economic Growth: A Non Communist Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press.
- Syrquin M. 1988. Patterns of Structural Change. In Chenery HB and Srinivisan TN (eds) Handbook of Development Economics, Vol 2 Hal 205. Amsterdam: North-Holland.
- Syrquin M and Chenery HB. 1988. Pattern of Development 1950-1983. Washington DC: World Bank.
- [WB] World Bank. 2008. World Development Report : Agriculture for Development. Washington DC: World Bank



Lampiran

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 1

PDRB Sektor Pertanian dan *Share* terhadap PDRB Nasional Tahun 2003 dan 2013

	Provinsi	PDRB Sektor Pertanian (Miliar Rupiah)		Share PDRB Sektor pertanian terhadap PDRB Nasional (%)	
		2003	2013	2003	2013
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	7.609.133,78	10.130.608,53	17,03	26,98
2	Sumatera Utara	20.689.486,29	32.010.145,28	26,25	22,45
3	Sumatera Barat	6.557.510,72	10.273.538,83	25,08	22,03
4	Riau	11.649.245,97	18.667.091,00	12,98	12,98
5	Jambi	3.467.458,65	6.448.563,69	30,57	29,35
6	Sumatera Selatan	8.725.687,00	14.508.814,00	19,28	18,99
7	Bengkulu	2.222.288,58	3.651.526,06	39,72	36,32
8	Lampung	11.318.865,66	16.777.774,64	42,08	36,51
9	Bangka Belitung	1.803.586,00	3.032.446,34	22,14	23,50
10	DKI Jakarta	1.313.419,27	1.940.790,07	0,11	0,07
11	Jawa Barat	291.284,53	314.206,19	14,76	11,19
12	Jawa Tengah	32.402.164,32	43.292.316,15	21,03	16,82
13	DI Yogyakarta	27.157.595,62	37.513.957,62	19,19	15,19
14	Jawa Timur	2.948.400,09	3.732.462,45	17,93	13,19
15	Banten	41.123.649,34	55.345.357,38	8,66	7,31
16	Bali	5.213.975,53	7.734.692,11	22,28	17,69
17	Nusa Tenggara Barat	4.250.687,77	6.155.523,43	26,60	25,38
18	Nusa Tenggara Timur	3.742.920,49	5.182.627,03	42,63	34,17
19	Kalimantan Barat	3.859.386,78	5.037.663,54	26,02	24,48
20	Kalimantan Tengah	5.583.272,31	8.832.527,75	41,66	27,99
21	Kalimantan Selatan	5.230.195,61	6.436.568,86	23,98	22,24
22	Kalimantan Timur	5.062.526,06	8.049.106,76	6,68	7,09
23	Sulawesi Utara	5.981.660,78	8.664.167,47	21,14	17,19
24	Sulawesi Tengah	2.452.815,42	3.930.775,03	45,24	36,77
25	Sulawesi Selatan	4.612.965,89	8.423.688,03	34,98	32,28
26	Sulawesi Tenggara	10.818.735,72	27.846.916,93	37,29	27,06
27	Gorontalo	2.594.701,35	4.079.388,54	31,52	27,17
28	Maluku	557.677,66	990.904,52	34,66	29,69
29	Maluku Utara	1.559.172,99	2.733.286,57	36,29	31,80
30	Papua	1.029.450,15	1.517.677,21	17,25	16,19

Sumber: BPS 2003 dan 2013

Lampiran 2

Share PDRB Subsektor Pertanian Tahun 2003 dan 2013 (%)

	Provinsi	Tanaman Bahan Makanan		Tanaman Perkebunan		Peternakan dan Hasil-hasilnya		Kehutanan		Perikanan	
		2003	2013	2003	2013	2003	2013	2003	2013	2003	2013
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	39,71	41,45	15,62	19,68	18,77	17,29	10,82	5,70	15,08	15,88
2	Sumatera Utara	35,93	30,35	35,73	43,43	11,20	10,23	6,22	4,90	10,91	11,08
3	Sumatera Barat	50,88	49,54	21,14	25,43	9,22	7,90	7,73	5,43	11,03	11,70
4	Riau	12,88	10,42	32,01	42,35	6,10	7,07	33,49	23,53	15,51	16,64
5	Jambi	38,03	35,87	40,64	49,42	7,66	6,38	8,56	4,53	5,10	3,80
6	Sumatera Selatan	23,50	22,52	44,43	48,65	7,59	8,04	9,59	6,15	14,89	14,64
7	Bengkulu	45,58	43,19	31,34	37,20	7,19	7,76	4,57	2,94	11,32	8,90
8	Lampung	48,70	47,58	25,53	23,85	12,76	12,64	0,90	1,04	12,10	14,88
9	Bangka Belitung	10,46	12,31	51,35	51,32	3,40	3,46	2,99	1,97	31,79	30,94
10	DKI Jakarta	50,17	41,23	13,76	16,95	6,46	6,49	0,00	0,00	29,61	35,33
11	Jawa Barat	73,13	74,71	5,70	5,64	13,86	13,20	1,83	0,81	5,49	5,65
12	Jawa Tengah	72,08	68,71	9,06	9,49	11,25	14,37	1,30	1,73	6,31	5,70
13	DI Yogyakarta	73,46	74,46	2,53	2,74	15,72	14,59	6,44	5,16	1,85	3,04
14	Jawa Timur	59,39	54,08	13,90	13,96	15,17	17,05	1,68	1,88	9,86	13,03
15	Banten	60,30	56,32	8,62	8,15	22,74	24,25	0,68	0,56	7,66	10,72
16	Bali	52,57	47,41	4,82	4,70	24,13	27,31	0,03	0,04	18,45	20,54
17	Nusa Tenggara Barat	59,38	60,62	12,72	10,82	14,00	15,02	1,70	0,27	12,20	13,26
18	Nusa Tenggara Timur	51,77	46,56	10,61	11,74	28,15	30,52	0,64	0,69	8,83	10,50
19	Kalimantan Barat	37,35	39,84	35,29	37,42	9,97	10,44	9,32	4,05	8,08	8,25
20	Kalimantan Tengah	18,66	14,66	37,80	50,18	8,76	11,49	20,33	5,02	14,45	18,66
21	Kalimantan Selatan	44,42	42,78	24,77	27,70	5,36	7,27	6,17	4,22	19,28	18,04
22	Kalimantan Timur	17,16	16,85	10,35	21,40	9,92	11,19	43,42	20,72	19,16	29,84
23	Sulawesi Utara	30,00	30,17	37,32	33,11	9,16	11,08	2,02	1,26	21,50	24,38
24	Sulawesi Tengah	32,16	29,38	36,29	38,99	6,33	5,91	10,50	9,19	14,73	16,53
25	Sulawesi Selatan	47,39	55,94	27,23	29,16	3,89	10,77	0,68	2,70	20,81	1,42
26	Sulawesi Tenggara	22,23	19,55	34,07	29,81	14,54	16,33	3,60	3,47	25,57	30,84
27	Gorontalo	42,90	48,44	23,39	15,43	13,18	16,83	6,65	3,38	13,88	15,91
28	Maluku	25,71	23,18	20,84	19,78	3,57	3,60	5,31	3,43	44,57	50,01
29	Maluku Utara	26,53	25,64	49,37	53,58	4,20	3,57	6,56	4,95	13,34	12,26
30	Papua	38,09	38,77	5,40	7,43	5,40	7,24	23,01	16,86	28,10	29,71

Sumber: BPS 2003 dan 2013

Lampiran 3

Jumlah Rumah Tangga Pertanian (RTP) Tahun 2003 dan 2013

Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Pertanian (RTP)		Persentase Jumlah RTP Terhadap Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	136.938	653.144	14,72	57,21
2 Sumatera Utara	1.262.421	1.337.577	47,11	42,06
3 Sumatera Barat	639.711	649.694	60,64	53,93
4 Riau	544.222	664.446	40,90	34,30
5 Jambi	381.497	437.733	55,70	53,44
6 Sumatera Selatan	904.363	968.251	56,38	50,81
7 Bengkulu	260.530	279.996	71,37	61,15
8 Lampung	1.125.585	1.235.153	67,53	61,24
9 Bangka Belitung	127.777	127.112	52,92	37,99
10 DKI Jakarta	27.674	12.392	1,17	0,48
11 Jawa Barat	3.294.347	3.090.708	32,18	25,53
12 Jawa Tengah	4.263.214	4.303.001	53,92	48,12
13 DI Yogyakarta	471.563	499.095	58,47	46,24
14 Jawa Timur	4.835.771	5.003.893	46,14	47,09
15 Banten	687.203	601.936	28,85	21,52
16 Bali	397.763	412.988	46,10	38,52
17 Nusa Tenggara Barat	548.244	604.898	51,39	46,13
18 Nusa Tenggara Timur	706.102	788.325	83,17	73,50
19 Kalimantan Barat	585.354	631.281	63,68	58,44
20 Kalimantan Tengah	288.611	273.475	55,93	44,29
21 Kalimantan Selatan	433.495	436.936	51,93	42,15
22 Kalimantan Timur	216.761	229.991	31,53	24,24
23 Sulawesi Utara	305.314	255.555	54,23	42,25
24 Sulawesi Tengah	370.778	406.223	62,59	61,92
25 Sulawesi Selatan	1.138.202	1.175.193	58,45	53,56
26 Sulawesi Tenggara	286.640	319.819	64,98	59,34
27 Gorontalo	118.056	124.210	59,47	48,22
28 Maluku	177.800	178.196	67,21	52,99
29 Maluku Utara	125.456	131.920	78,49	57,28
30 Papua	341.415	522.651	57,74	88,39
Indonesia	25.002.807	26.355.792	45,27	41,15

Sumber: BPS, Laporan Hasil Sensus Pertanian 2003 dan 2013 (Pencacahan Lengkap)

Lampiran 4

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) ST2003 dan ST2013

Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP)		Persentase Jumlah RTUP Terhadap Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan (%)	
	ST2003	ST2013	ST2003	ST2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	699.370	644.851	74,33	55,87
2 Sumatera Utara	1.492.104	1.327.759	54,18	41,14
3 Sumatera Barat	709.351	644.610	65,95	53,18
4 Riau	615.245	651.508	42,65	31,92
5 Jambi	414.986	431.589	58,55	52,09
6 Sumatera Selatan	971.458	958.724	59,02	49,84
7 Bengkulu	280.964	277.136	75,54	60,18
8 Lampung	1.293.192	1.226.455	76,37	60,44
9 Bangka Belitung	139.315	124.970	52,77	35,11
10 DKI Jakarta	52.583	12.287	2,001	0,37
11 Jawa Barat	4.345.148	3.058.612	41,44	25,11
12 Jawa Tengah	5.770.801	4.290.619	72,06	47,67
13 DI Yogyakarta	574.920	495.781	71,06	45,90
14 Jawa Timur	6.314.370	4.978.358	59,05	46,41
15 Banten	898.021	592.841	36,75	20,89
16 Bali	492.394	408.233	56,27	37,73
17 Nusa Tenggara Barat	719.875	600.613	64,32	44,82
18 Nusa Tenggara Timur	729.483	778.854	85,05	71,88
19 Kalimantan Barat	614.738	627.638	64,67	57,11
20 Kalimantan Tengah	302.414	270.914	53,06	42,30
21 Kalimantan Selatan	471.972	432.328	54,02	40,55
22 Kalimantan Timur	242.127	225.349	31,29	21,58
23 Sulawesi Utara	324.374	253.503	53,44	40,73
24 Sulawesi Tengah	396.622	401.891	62,9	59,07
25 Sulawesi Selatan	1.249.349	1.166.793	62,15	51,50
26 Sulawesi Tenggara	314.011	316.262	66,55	55,64
27 Gorontalo	133.083	122.515	59,57	45,52
28 Maluku	184.376	175.362	67,47	50,60
29 Maluku Utara	129.246	130.233	77,88	55,52
30 Papua	356.292	508.881	57,14	82,79
Indonesia	31.232.184	26.135.469	56,65	40,21

Sumber: BPS, Laporan Hasil Sensus Pertanian 2003 dan 2013 (Pencacahan Lengkap)

Lampiran 5

Jumlah Rumah Tangga Pertanian Pengguna Lahan ST2003 dan ST2013

Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Pertanian Pengguna Lahan (RTP Lahan)		Persentase Jumlah RTP Lahan Terhadap Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan (%)	
	ST2003	ST2013	ST2003	ST2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	691.454	637.778	74,33	55,87
2 Sumatera Utara	1.451.813	1.308.393	54,18	41,14
3 Sumatera Barat	695.739	640.695	65,95	53,18
4 Riau	567.481	618.300	42,65	31,92
5 Jambi	401.052	426.647	58,55	52,09
6 Sumatera Selatan	946.858	949.801	59,02	49,84
7 Bengkulu	275.769	275.559	75,54	60,18
8 Lampung	1.272.932	1.218.927	76,37	60,44
9 Bangka Belitung	127.412	117.488	52,77	35,11
10 DKI Jakarta	47.262	9.515	2,001	0,37
11 Jawa Barat	4.242.003	3.039.716	41,44	25,11
12 Jawa Tengah	5.697.473	4.262.608	72,06	47,67
13 DI Yogyakarta	573.092	495.401	71,06	45,90
14 Jawa Timur	6.189.481	4.931.506	59,05	46,41
15 Banten	875.287	584.259	36,75	20,89
16 Bali	485.531	404.507	56,27	37,73
17 Nusa Tenggara Barat	686.172	587.617	64,32	44,82
18 Nusa Tenggara Timur	722.039	770.864	85,05	71,88
19 Kalimantan Barat	594.483	616.894	64,67	57,11
20 Kalimantan Tengah	273.806	261.227	53,06	42,30
21 Kalimantan Selatan	450.903	420.352	54,02	40,55
22 Kalimantan Timur	215.110	204.782	31,29	21,58
23 Sulawesi Utara	300.834	246.394	53,44	40,73
24 Sulawesi Tengah	372.636	387.528	62,9	59,07
25 Sulawesi Selatan	1.210.312	1.130.055	62,15	51,50
26 Sulawesi Tenggara	293.555	299.926	66,55	55,64
27 Gorontalo	118.257	117.248	59,57	45,52
28 Maluku	178.497	170.169	67,47	50,60
29 Maluku Utara	124.480	127.865	77,88	55,52
30 Papua	337.859	489.516	57,14	82,79
Indonesia	30.419.582	25.751.537	55,08	40,21

Sumber: BPS, Laporan Hasil Sensus Pertanian 2003 dan 2013 (Pencacahan Lengkap)

Lampiran 6

Jumlah Rumah Tangga Pertanian Gurem ST2003 dan ST2013

Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Pertanian Gurem (RTP Gurem)		Persentase Jumlah RTP Gurem Terhadap Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan (%)	
	ST2003	ST2013	ST2003	ST2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	248.823	276.729	26,75	24,24
2 Sumatera Utara	751.330	570.185	28,04	17,93
3 Sumatera Barat	357.797	275.135	33,92	22,84
4 Riau	125.418	68.560	9,43	3,54
5 Jambi	101.836	65.499	14,87	8,00
6 Sumatera Selatan	218.091	110.932	13,60	5,82
7 Bengkulu	49.147	35.974	13,46	7,86
8 Lampung	447.126	362.148	26,83	17,96
9 Bangka Belitung	52.891	26.069	21,90	7,79
10 DKI Jakarta	45.428	8.611	1,92	0,33
11 Jawa Barat	3.501.867	2.298.193	34,21	18,99
12 Jawa Tengah	4.629.877	3.312.235	58,56	37,04
13 DI Yogyakarta	479.780	424.557	59,49	39,34
14 Jawa Timur	4.893.626	3.755.837	46,69	35,34
15 Banten	634.415	379.888	26,64	13,58
16 Bali	313.111	257.181	36,29	23,99
17 Nusa Tenggara Barat	446.040	350.131	41,81	26,70
18 Nusa Tenggara Timur	224.987	289.917	26,50	27,03
19 Kalimantan Barat	120.575	81.286	13,12	7,53
20 Kalimantan Tengah	45.564	29.083	8,83	4,71
21 Kalimantan Selatan	193.773	133.853	23,21	12,91
22 Kalimantan Timur	56.075	27.326	8,16	2,88
23 Sulawesi Utara	103.154	72.055	18,32	11,91
24 Sulawesi Tengah	69.935	74.073	11,81	11,29
25 Sulawesi Selatan	408.673	338.108	20,99	15,41
26 Sulawesi Tenggara	72.188	63.809	16,37	11,84
27 Gorontalo	44.791	40.959	22,56	15,90
28 Maluku	68.913	78.140	26,05	23,24
29 Maluku Utara	19.679	21.857	12,31	9,49
30 Papua	169.774	305.380	28,71	51,65
Indonesia	18.894.684	14.133.710	34,21	22,07

Sumber: BPS, Laporan Hasil Sensus Pertanian 2003 dan 2013 (Pencacahan Lengkap)

Lampiran 7

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Subsektor Tanaman Pangan 2003 dan 2013

Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Subsektor Tanaman Pangan		Persentase Jumlah RTUP Subsektor Tanaman Pangan Terhadap RTUP Total (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	456.124	423.124	28,53	31,77
2 Sumatera Utara	834.394	741.068	26,10	27,01
3 Sumatera Barat	476.738	426.435	27,21	27,75
4 Riau	166.189	118.219	14,42	11,53
5 Jambi	177.035	133.985	20,33	17,53
6 Sumatera Selatan	513.471	397.938	24,14	24,95
7 Bengkulu	138.748	99.972	21,64	18,78
8 Lampung	799.331	743.542	22,74	26,11
9 Bangka Belitung	35.087	28.457	13,98	14,06
10 DKI Jakarta	5.729	1.301	9,28	8,92
11 Jawa Barat	2.613.080	2.492.459	27,25	35,01
12 Jawa Tengah	3.477.773	3.288.294	21,66	27,29
13 DI Yogyakarta	394.152	369.749	22,24	23,10
14 Jawa Timur	3.785.083	3.673.364	23,33	29,50
15 Banten	547.770	482.446	26,02	36,40
16 Bali	254.101	218.591	19,11	19,01
17 Nusa Tenggara Barat	420.984	473.274	25,75	38,94
18 Nusa Tenggara Timur	663.832	701.852	26,57	25,20
19 Kalimantan Barat	456.669	423.625	29,64	32,37
20 Kalimantan Tengah	195.528	146.650	25,39	24,36
21 Kalimantan Selatan	345.761	318.130	32,66	38,67
22 Kalimantan Timur	124.541	107.951	24,89	23,52
23 Sulawesi Utara	179.525	123.354	25,17	21,73
24 Sulawesi Tengah	169.494	190.186	20,01	20,91
25 Sulawesi Selatan	778.914	807.876	25,79	30,10
26 Sulawesi Tenggara	142.743	134.007	18,62	17,50
27 Gorontalo	84.840	77.320	34,83	28,72
28 Maluku	124.858	108.266	25,63	23,79
29 Maluku Utara	75.977	62.744	22,25	20,39
30 Papua	269.581	414.306	26,40	29,93
Indonesia	18.708.052	17.728.485	24,08	28,22

Sumber: BPS, Potensi Pertanian Indonesia: Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2003 dan 2013

Lampiran 8

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Subsektor Hortikultura 2003 dan 2013

Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Subsektor Hortikultura		Persentase Jumlah RTUP Subsektor Hortikultura Terhadap RTUP Total (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	278.436	195.090	17,41	14,65
2 Sumatera Utara	616.636	397.214	19,29	14,48
3 Sumatera Barat	366.749	261.298	20,93	17,01
4 Riau	213.901	117.278	18,56	11,43
5 Jambi	179.079	110.566	20,56	14,47
6 Sumatera Selatan	392.638	156.580	18,46	9,82
7 Bengkulu	125.137	79.926	19,52	15,01
8 Lampung	730.906	419.448	20,79	14,73
9 Bangka Belitung	50.353	29.133	20,06	14,40
10 DKI Jakarta	19.462	5.018	31,54	34,40
11 Jawa Barat	2.203.668	1.255.717	22,98	17,64
12 Jawa Tengah	3.829.396	2.377.021	23,85	19,73
13 DI Yogyakarta	391.409	316.540	22,08	19,78
14 Jawa Timur	3.826.739	2.222.937	23,59	17,85
15 Banten	473.751	220.660	22,51	16,65
16 Bali	302.076	238.484	22,71	20,75
17 Nusa Tenggara Barat	333.079	143.795	20,37	11,83
18 Nusa Tenggara Timur	472.431	426.970	18,91	15,33
19 Kalimantan Barat	232.991	131.090	15,12	10,02
20 Kalimantan Tengah	152.019	93.803	19,74	15,58
21 Kalimantan Selatan	217.654	106.991	20,56	13,01
22 Kalimantan Timur	118.499	85.668	23,68	18,67
23 Sulawesi Utara	141.817	101.763	19,88	17,93
24 Sulawesi Tengah	141.092	140.609	16,66	15,46
25 Sulawesi Selatan	514.602	347.279	17,04	12,94
26 Sulawesi Tenggara	138.121	117.902	18,01	15,39
27 Gorontalo	46.329	40.633	19,02	15,09
28 Maluku	101.329	88.261	20,80	19,39
29 Maluku Utara	76.171	60.479	22,31	19,66
30 Papua	251.147	313.994	24,59	22,68
Indonesia	16.937.617	10.602.147	21,80	16,87

Sumber: BPS, Potensi Pertanian Indonesia: Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2003 dan 2013

Lampiran 9

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Subsektor Perkebunan 2003 dan 2013

Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Subsektor Perkebunan		Persentase Jumlah RTUP Subsektor Perkebunan Terhadap RTUP Total (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	447.652	388.667	28,00	29,18
2 Sumatera Utara	858.655	938.843	26,85	34,22
3 Sumatera Barat	413.879	446.287	23,62	29,04
4 Riau	420.958	551.478	36,52	53,77
5 Jambi	295.392	363.372	33,91	47,55
6 Sumatera Selatan	630.665	733.157	29,65	45,96
7 Bengkulu	213.302	237.816	33,27	44,67
8 Lampung	770.893	806.529	21,93	28,33
9 Bangka Belitung	104.196	104.835	41,51	51,81
10 DKI Jakarta	3.508	93	5,68	0,64
11 Jawa Barat	1.161.492	782.935	12,11	11,00
12 Jawa Tengah	2.330.055	1.619.683	14,51	13,44
13 DI Yogyakarta	275.003	227.956	15,51	14,24
14 Jawa Timur	2.103.921	1.575.382	12,97	12,65
15 Banten	324.529	209.339	15,42	15,79
16 Bali	251.987	220.893	18,95	19,21
17 Nusa Tenggara Barat	246.377	174.948	15,07	14,39
18 Nusa Tenggara Timur	526.063	581.242	21,05	20,87
19 Kalimantan Barat	425.563	497.489	27,62	38,01
20 Kalimantan Tengah	142.470	196.675	18,50	32,67
21 Kalimantan Selatan	166.222	196.221	15,70	23,85
22 Kalimantan Timur	85.079	116.514	17,00	25,39
23 Sulawesi Utara	197.482	179.843	27,69	31,69
24 Sulawesi Tengah	301.911	322.130	35,64	35,42
25 Sulawesi Selatan	773.122	622.861	25,60	23,21
26 Sulawesi Tenggara	232.713	231.059	30,35	30,17
27 Gorontalo	42.765	52.441	17,56	19,48
28 Maluku	138.006	131.377	28,32	28,87
29 Maluku Utara	110.233	116.352	32,29	37,82
30 Papua	134.446	143.673	13,16	10,38
Indonesia	14.128.539	12.770.090	18,19	20,33

Sumber: BPS, Potensi Pertanian Indonesia: Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2003 dan 2013

Lampiran 10

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Subsektor Peternakan 2003 dan 2013

	Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Subsektor Peternakan		Persentase Jumlah RTUP Subsektor Peternakan Terhadap RTUP Total (%)	
		2003	2013	2003	2013
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	335.413	254.166	20,98	19,08
2	Sumatera Utara	728.722	534.625	22,79	19,48
3	Sumatera Barat	344.299	280.250	19,65	18,24
4	Riau	223.719	146.285	19,41	14,26
5	Jambi	148.951	112.863	17,10	14,77
6	Sumatera Selatan	403.448	200.836	18,97	12,59
7	Bengkulu	107.872	75.794	16,82	14,24
8	Lampung	803.781	555.238	22,87	19,50
9	Bangka Belitung	27.964	14.895	11,14	7,36
10	DKI Jakarta	19.733	3.637	31,98	24,93
11	Jawa Barat	2.259.713	1.191.663	23,56	16,74
12	Jawa Tengah	4.208.309	2.612.448	26,21	21,68
13	DI Yogyakarta	445.545	383.555	25,14	23,96
14	Jawa Timur	4.567.408	3.339.411	28,16	26,81
15	Banten	523.427	171.083	24,87	12,91
16	Bali	393.940	315.747	29,62	27,47
17	Nusa Tenggara Barat	447.000	286.410	27,34	23,56
18	Nusa Tenggara Timur	527.811	600.865	21,12	21,57
19	Kalimantan Barat	274.443	176.777	17,81	13,51
20	Kalimantan Tengah	117.028	81.190	15,19	13,49
21	Kalimantan Selatan	198.218	123.314	18,72	14,99
22	Kalimantan Timur	88.066	75.795	17,60	16,52
23	Sulawesi Utara	106.300	82.881	14,90	14,60
24	Sulawesi Tengah	135.534	163.202	16,00	17,94
25	Sulawesi Selatan	651.412	583.719	21,57	21,75
26	Sulawesi Tenggara	143.131	141.872	18,67	18,52
27	Gorontalo	41.147	72.857	16,89	27,06
28	Maluku	64.831	58.315	13,31	12,81
29	Maluku Utara	38.912	41.064	11,40	13,35
30	Papua	219.747	288.453	21,52	20,84
	Indonesia	18.595.824	12.969.210	23,94	20,64

Sumber: BPS, Potensi Pertanian Indonesia: Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2003 dan 2013

Lampiran 11

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Subsektor Perikanan 2003 dan 2013

Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Subsektor Perikanan		Persentase Jumlah RTUP Subsektor Perikanan Terhadap RTUP Total (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	52.875	48.044	3,31	3,61
2 Sumatera Utara	94.090	75.928	2,94	2,77
3 Sumatera Barat	84.940	63.252	4,85	4,12
4 Riau	98.321	74.898	8,53	7,30
5 Jambi	35.613	21.621	4,09	2,83
6 Sumatera Selatan	96.136	59.404	4,52	3,72
7 Bengkulu	28.778	13.894	4,49	2,61
8 Lampung	86.189	68.065	2,45	2,39
9 Bangka Belitung	25.344	16.321	10,10	8,07
10 DKI Jakarta	12.611	4.456	20,44	30,55
11 Jawa Barat	393.428	322.207	4,10	4,53
12 Jawa Tengah	270.092	259.878	1,68	2,16
13 DI Yogyakarta	26.632	39.274	1,50	2,45
14 Jawa Timur	284.335	189.777	1,75	1,52
15 Banten	48.629	26.264	2,31	1,98
16 Bali	18.720	14.869	1,41	1,29
17 Nusa Tenggara Barat	56.947	34.855	3,48	2,87
18 Nusa Tenggara Timur	45.162	40.292	1,81	1,45
19 Kalimantan Barat	77.150	43.514	5,01	3,32
20 Kalimantan Tengah	75.109	35.498	9,75	5,90
21 Kalimantan Selatan	91.352	58.261	8,63	7,08
22 Kalimantan Timur	43.142	48.256	8,62	10,52
23 Sulawesi Utara	51.483	34.992	7,22	6,16
24 Sulawesi Tengah	55.829	52.069	6,59	5,72
25 Sulawesi Selatan	129.754	118.397	4,30	4,41
26 Sulawesi Tenggara	60.239	48.157	7,86	6,29
27 Gorontalo	16.695	13.355	6,85	4,96
28 Maluku	41.938	43.557	8,61	9,57
29 Maluku Utara	31.022	19.800	9,09	6,44
30 Papua	57.126	86.078	5,59	6,22
Indonesia	2.489.681	1.975.233	3,20	3,14

Sumber: BPS, Potensi Pertanian Indonesia: Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2003 dan 2013

Lampiran 12

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Subsektor Kehutanan 2003 dan 2013

	Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Subsektor Kehutanan		Persentase Jumlah RTUP Subsektor Kehutanan Terhadap RTUP Total (%)	
		2003	2013	2003	2013
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	28.429	22.681	1,78	1,70
2	Sumatera Utara	64.968	56.133	2,03	2,05
3	Sumatera Barat	65.771	59.018	3,75	3,84
4	Riau	29.463	17.518	2,56	1,71
5	Jambi	34.946	21.794	4,01	2,85
6	Sumatera Selatan	90.596	47.222	4,26	2,96
7	Bengkulu	27.307	24.930	4,26	4,68
8	Lampung	323.843	254.363	9,21	8,93
9	Bangka Belitung	8.081	8.693	3,22	4,30
10	DKI Jakarta	666	82	1,08	0,56
11	Jawa Barat	958.439	1.073.535	9,99	15,08
12	Jawa Tengah	1.941.073	1.892.213	12,09	15,70
13	DI Yogyakarta	239.807	263.470	13,53	16,46
14	Jawa Timur	1.653.713	1.453.142	10,19	11,67
15	Banten	186.774	215.712	8,87	16,27
16	Bali	109.139	141.012	8,21	12,27
17	Nusa Tenggara Barat	130.399	102.158	7,98	8,41
18	Nusa Tenggara Timur	263.572	434.362	10,55	15,59
19	Kalimantan Barat	74.129	36.329	4,81	2,78
20	Kalimantan Tengah	88.026	48.177	11,43	8,00
21	Kalimantan Selatan	39.605	19.766	3,74	2,40
22	Kalimantan Timur	41.137	24.700	8,22	5,38
23	Sulawesi Utara	36.706	44.761	5,15	7,89
24	Sulawesi Tengah	43.193	41.367	5,10	4,55
25	Sulawesi Selatan	171.884	203.983	5,69	7,60
26	Sulawesi Tenggara	49.795	92.938	6,49	12,13
27	Gorontalo	11.827	12.623	4,86	4,69
28	Maluku	16.279	25.307	3,34	5,56
29	Maluku Utara	9.089	7.220	2,66	2,35
30	Papua	89.281	137.672	8,74	9,95
	Indonesia	6.827.937	6.782.881	8,79	10,80

Sumber: BPS, Potensi Pertanian Indonesia: Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2003 dan 2013

Lampiran 13

Jumlah Anggota Rumah Tangga \geq 10 Tahun yang menjadi Petani 2003 dan 2013

Provinsi	Jumlah ART \geq 10 Tahun yang menjadi Petani		Persentase Jumlah ART \geq 10 Tahun yang menjadi Petani Terhadap Jumlah ART \geq 10 Tahun Total (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	251.768	812.810	55,00	35,51
2 Sumatera Utara	1.830.324	1.690.767	40,27	38,18
3 Sumatera Barat	979.659	849.903	43,78	37,92
4 Riau	759.012	828.728	39,00	37,26
5 Jambi	612.808	547.757	48,67	39,06
6 Sumatera Selatan	1.666.709	1.255.179	53,79	39,90
7 Bengkulu	364.059	338.813	41,37	37,55
8 Lampung	1.338.846	1.534.540	35,08	39,38
9 Bangka Belitung	170.207	146.786	39,63	35,87
10 DKI Jakarta	31.455	13.191	28,04	27,46
11 Jawa Barat	4.186.802	3.512.069	40,68	37,58
12 Jawa Tengah	5.337.334	4.951.959	37,64	37,18
13 DI Yogyakarta	521.478	555.640	33,90	35,60
14 Jawa Timur	6.365.609	5.859.814	41,19	37,72
15 Banten	943.026	710.030	37,51	32,83
16 Bali	525.853	526.418	37,92	37,27
17 Nusa Tenggara Barat	709.998	643.531	40,12	35,41
18 Nusa Tenggara Timur	1.429.273	913.530	57,41	33,55
19 Kalimantan Barat	1.050.491	904.071	50,30	42,47
20 Kalimantan Tengah	600.529	376.293	61,78	43,16
21 Kalimantan Selatan	598.998	527.011	43,44	39,52
22 Kalimantan Timur	377.250	309.291	50,73	40,44
23 Sulawesi Utara	397.675	308.693	42,24	37,06
24 Sulawesi Tengah	578.773	471.392	46,19	34,34
25 Sulawesi Selatan	1.621.011	1.430.567	39,04	34,66
26 Sulawesi Tenggara	362.931	351.798	36,21	31,65
27 Gorontalo	152.132	146.621	39,43	33,32
28 Maluku	309.746	212.888	47,70	31,86
29 Maluku Utara	190.251	194.691	41,92	39,70
30 Papua	728.209	786.276	69,03	48,22
Indonesia	34.992.216	31.711.057	41,92	37,47

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013

Lampiran 14

Jumlah Anggota Rumah Tangga \geq 10 Tahun yang menjadi Buruh di Sektor Pertanian 2003 dan 2013

Provinsi	Jumlah ART \geq 10 Tahun yang menjadi Buruh di Sektor Pertanian		Persentase Jumlah ART \geq 10 Tahun Buruh di Sektor Pertanian Terhadap Jumlah ART \geq 10 Tahun Total (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	43.023	340.603	9,40	14,88
2 Sumatera Utara	471.051	504.163	10,36	11,39
3 Sumatera Barat	399.852	339.199	17,87	15,13
4 Riau	205.837	227.206	10,58	10,22
5 Jambi	193.572	177.662	15,38	12,67
6 Sumatera Selatan	415.848	431.375	13,42	13,71
7 Bengkulu	159.831	176.953	18,16	19,61
8 Lampung	776.638	738.288	20,35	18,94
9 Bangka Belitung	52.808	34.586	12,29	8,45
10 DKI Jakarta	893	682	0,80	1,42
11 Jawa Barat	2.012.489	1.556.671	19,56	16,66
12 Jawa Tengah	2.974.069	2.164.241	20,97	16,25
13 DI Yogyakarta	160.704	144.758	10,45	9,28
14 Jawa Timur	3.627.512	2.999.841	23,47	19,31
15 Banten	411.176	297.782	16,36	13,77
16 Bali	150.585	127.183	10,86	9,00
17 Nusa Tenggara Barat	490.595	452.846	27,72	24,92
18 Nusa Tenggara Timur	235.958	183.225	9,48	6,73
19 Kalimantan Barat	225.485	194.081	10,80	9,12
20 Kalimantan Tengah	74.859	96.073	7,70	11,02
21 Kalimantan Selatan	261.606	210.004	18,97	15,75
22 Kalimantan Timur	46.134	61.025	6,20	7,98
23 Sulawesi Utara	138.367	97.256	14,70	11,68
24 Sulawesi Tengah	209.168	211.444	16,69	15,40
25 Sulawesi Selatan	461.810	406.845	11,12	9,86
26 Sulawesi Tenggara	52.322	76.911	5,22	6,92
27 Gorontalo	43.068	96.984	11,16	22,04
28 Maluku	17.826	18.794	2,75	2,81
29 Maluku Utara	38.720	37.283	8,53	7,60
30 Papua	15.157	46.627	1,44	2,86
Indonesia	14.366.963	12.450.591	17,21	14,71

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013

Analisis Tematik ST2013 Subsektor Transformasi Struktural Usahatani dan Petani Indonesia

Lampiran 15

Jumlah Anggota Rumah Tangga \geq 10 Tahun yang menjadi Buruh di luar Sektor Pertanian Tahun 2003 dan 2013

Provinsi	Jumlah Anggota Rumah Tangga \geq 10 Tahun yang menjadi Buruh di luar Sektor Pertanian		Persentase Jumlah ART \geq 10 Tahun yang menjadi Buruh di luar Sektor Pertanian Terhadap Jumlah ART \geq 10 Tahun Total (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	33.928	336.754	7,41	14,71
2 Sumatera Utara	329.968	483.287	7,26	10,91
3 Sumatera Barat	181.066	292.910	8,09	13,07
4 Riau	177.404	257.903	9,12	11,60
5 Jambi	95.622	125.219	7,60	8,93
6 Sumatera Selatan	163.972	260.074	5,29	8,27
7 Bengkulu	51.989	105.940	5,91	11,74
8 Lampung	321.377	473.528	8,42	12,15
9 Bangka Belitung	60.790	60.131	14,15	14,70
10 DKI Jakarta	30.629	14.824	27,30	30,86
11 Jawa Barat	1.183.539	1.455.741	11,50	15,58
12 Jawa Tengah	2.085.967	2.685.956	14,71	20,17
13 DI Yogyakarta	289.929	426.674	18,85	27,34
14 Jawa Timur	1.603.613	2.264.776	10,38	14,58
15 Banten	348.374	376.516	13,86	17,41
16 Bali	292.502	376.880	21,09	26,68
17 Nusa Tenggara Barat	153.284	232.660	8,66	12,80
18 Nusa Tenggara Timur	156.107	234.498	6,27	8,61
19 Kalimantan Barat	174.672	212.385	8,36	9,98
20 Kalimantan Tengah	55.990	112.533	5,76	12,91
21 Kalimantan Selatan	127.287	184.326	9,23	13,82
22 Kalimantan Timur	85.103	103.093	11,44	13,48
23 Sulawesi Utara	93.298	133.771	9,91	16,06
24 Sulawesi Tengah	93.593	179.586	7,47	13,08
25 Sulawesi Selatan	239.239	427.881	5,76	10,37
26 Sulawesi Tenggara	77.151	162.809	7,70	14,65
27 Gorontalo	22.002	78.543	5,70	17,85
28 Maluku	42.027	62.046	6,47	9,29
29 Maluku Utara	32.410	49.526	7,14	10,10
30 Papua	27.762	87.195	2,63	5,35
Indonesia	8.630.594	12.257.965	10,34	14,48

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013

Lampiran 16

Jumlah Rumah Tangga Pertanian yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Tanaman Padi dan Palawija 2003 dan 2013

Provinsi	Jumlah RTP yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Tanaman Padi dan Palawija		Persentase RTP Tan Padi dan Palawija Terhadap Jumlah Total RTP Menurut Sumber Penghasilan Utama (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	20.323	250.395	20,8	55,8
2 Sumatera Utara	745.103	305.852	57,8	32,2
3 Sumatera Barat	173.815	144.107	42,0	40,4
4 Riau	25.831	21.066	6,4	4,3
5 Jambi	57.585	37.159	20,1	10,9
6 Sumatera Selatan	269.057	229.301	35,2	26,9
7 Bengkulu	61.100	30.020	30,5	15,0
8 Lampung	445.254	405.318	58,4	45,7
9 Bangka Belitung	616	1.244	1,1	2,0
10 DKI Jakarta	458	718	7,3	12,1
11 Jawa Barat	1.085.433	1.244.299	73,9	72,7
12 Jawa Tengah	1.508.017	1.413.931	72,1	66,1
13 DI Yogyakarta	69.112	141.391	54,3	70,0
14 Jawa Timur	1.459.902	1.917.572	51,4	66,2
15 Banten	286.784	265.439	68,3	73,9
16 Bali	93.325	66.082	44,1	35,2
17 Nusa Tenggara Barat	199.643	260.246	53,8	63,6
18 Nusa Tenggara Timur	357.147	403.613	65,0	63,2
19 Kalimantan Barat	113.792	114.658	27,3	23,2
20 Kalimantan Tengah	93.983	50.722	44,8	28,4
21 Kalimantan Selatan	143.030	130.329	49,2	46,8
22 Kalimantan Timur	71.084	58.280	46,8	34,7
23 Sulawesi Utara	61.075	42.006	30,2	27,1
24 Sulawesi Tengah	73.691	75.189	25,5	27,4
25 Sulawesi Selatan	359.640	519.079	39,5	58,0
26 Sulawesi Tenggara	58.623	57.899	28,6	30,2
27 Gorontalo	46.145	45.347	63,8	55,0
28 Maluku	43.683	39.312	38,4	31,2
29 Maluku Utara	8.140	7.244	11,4	7,4
30 Papua	130.710	328.498	58,0	69,3
Indonesia	8.062.101	8.606.316	51,9	52,0

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013

Lampiran 17

Jumlah Rumah Tangga Pertanian yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Tanaman Hortikultura 2003 dan 2013

Provinsi	Jumlah RTP yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Tanaman Hortikultura		Persentase RTP Hortikultura Terhadap Jumlah Total RTP Menurut Sumber Penghasilan Utama (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	8.210	19.792	8,4	4,4
2 Sumatera Utara	78.577	78.836	6,1	8,3
3 Sumatera Barat	47.882	34.488	11,6	9,7
4 Riau	12.783	12.893	3,2	2,6
5 Jambi	16.642	18.797	5,8	5,5
6 Sumatera Selatan	30.048	15.171	3,9	1,8
7 Bengkulu	9.336	8.720	4,7	4,4
8 Lampung	24.563	30.469	3,2	3,4
9 Bangka Belitung	2.491	2.297	4,5	3,8
10 DKI Jakarta	2.325	1.928	37,1	32,6
11 Jawa Barat	167.096	195.245	11,4	11,4
12 Jawa Tengah	182.321	281.634	8,7	13,2
13 DI Yogyakarta	8.265	21.734	6,5	10,8
14 Jawa Timur	238.467	223.823	8,4	7,7
15 Banten	64.954	33.380	15,5	9,3
16 Bali	29.409	27.383	13,9	14,6
17 Nusa Tenggara Barat	29.754	31.025	8,0	7,6
18 Nusa Tenggara Timur	14.291	21.371	2,6	3,3
19 Kalimantan Barat	15.273	14.407	3,7	2,9
20 Kalimantan Tengah	9.007	8.049	4,3	4,5
21 Kalimantan Selatan	18.108	11.646	6,2	4,2
22 Kalimantan Timur	18.112	17.347	11,9	10,3
23 Sulawesi Utara	16.202	16.502	8,0	10,6
24 Sulawesi Tengah	9.742	15.718	3,4	5,7
25 Sulawesi Selatan	30.257	39.707	3,3	4,4
26 Sulawesi Tenggara	7.996	7.279	3,9	3,8
27 Gorontalo	2.838	10.158	3,9	12,3
28 Maluku	4.543	11.295	4,0	9,0
29 Maluku Utara	2.389	3.544	3,3	3,6
30 Papua	11.413	39.961	5,1	8,4
Indonesia	1.113.294	1.254.599	7,2	7,6

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013

Lampiran 18

Jumlah Rumah Tangga Pertanian yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Tanaman Perkebunan 2003 dan 2013

Provinsi	Jumlah RTP yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Tanaman Perkebunan		Persentase RTP Perkebunan Terhadap Jumlah Total RTP Menurut Sumber Penghasilan Utama (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	58.661	142.586	60,0	31,7
2 Sumatera Utara	391.255	501.746	30,4	52,9
3 Sumatera Barat	125.213	146.206	30,3	41,0
4 Riau	314.616	402.178	77,5	81,2
5 Jambi	198.726	273.646	69,3	80,5
6 Sumatera Selatan	421.631	586.349	55,2	68,9
7 Bengkulu	123.088	155.342	61,4	77,6
8 Lampung	235.212	392.904	30,8	44,3
9 Bangka Belitung	36.086	45.695	65,7	74,6
10 DKI Jakarta	0	0	0,0	0,0
11 Jawa Barat	50.578	63.718	3,4	3,7
12 Jawa Tengah	152.946	157.501	7,3	7,4
13 DI Yogyakarta	8.832	12.346	6,9	6,1
14 Jawa Timur	412.853	296.669	14,5	10,2
15 Banten	27.368	27.284	6,5	7,6
16 Bali	49.795	49.120	23,5	26,1
17 Nusa Tenggara Barat	43.439	42.267	11,7	10,3
18 Nusa Tenggara Timur	108.423	150.148	19,7	23,5
19 Kalimantan Barat	251.141	341.048	60,2	69,0
20 Kalimantan Tengah	61.760	92.871	29,4	52,1
21 Kalimantan Selatan	63.416	103.285	21,8	37,1
22 Kalimantan Timur	26.968	49.095	17,8	29,3
23 Sulawesi Utara	99.975	75.477	49,5	48,6
24 Sulawesi Tengah	175.910	143.817	61,0	52,4
25 Sulawesi Selatan	343.512	212.872	37,7	23,8
26 Sulawesi Tenggara	99.133	83.575	48,3	43,6
27 Gorontalo	8.065	13.739	11,1	16,7
28 Maluku	55.628	52.000	48,9	41,3
29 Maluku Utara	51.653	77.616	72,3	79,8
30 Papua	28.308	30.005	12,6	6,3
Indonesia	4.024.191	4.721.105	25,9	28,5

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013

Lampiran 19

Jumlah Rumah Tangga Pertanian yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Peternakan 2003 dan 2013

Provinsi	Jumlah RTP yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Peternakan		Persentase RTP Peternakan Terhadap Jumlah Total RTP Menurut Sumber Penghasilan Utama (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	1.542	12.343	1,6	2,8
2 Sumatera Utara	22.838	26.486	1,8	2,8
3 Sumatera Barat	34.381	11.971	8,3	3,4
4 Riau	6.849	6.359	1,7	1,3
5 Jambi	2.666	1.867	0,9	0,5
6 Sumatera Selatan	7.566	5.477	1,0	0,6
7 Bengkulu	1.698	2.253	0,8	1,1
8 Lampung	16.492	32.693	2,2	3,7
9 Bangka Belitung	110	654	0,2	1,1
10 DKI Jakarta	49	691	0,8	11,7
11 Jawa Barat	51.510	103.935	3,5	6,1
12 Jawa Tengah	104.198	171.296	5,0	8,0
13 DI Yogyakarta	13.763	19.734	10,8	9,8
14 Jawa Timur	432.180	312.821	15,2	10,8
15 Banten	12.187	8.003	2,9	2,2
16 Bali	29.000	32.397	13,7	17,2
17 Nusa Tenggara Barat	49.641	46.666	13,4	11,4
18 Nusa Tenggara Timur	51.981	40.184	9,5	6,3
19 Kalimantan Barat	5.539	7.045	1,3	1,4
20 Kalimantan Tengah	2.800	3.392	1,3	1,9
21 Kalimantan Selatan	20.772	8.530	7,1	3,1
22 Kalimantan Timur	2.862	5.636	1,9	3,4
23 Sulawesi Utara	2.572	5.773	1,3	3,7
24 Sulawesi Tengah	2.951	6.325	1,0	2,3
25 Sulawesi Selatan	79.968	50.289	8,8	5,6
26 Sulawesi Tenggara	4.770	9.268	2,3	4,8
27 Gorontalo	1.800	4.373	2,5	5,3
28 Maluku	831	3.167	0,7	2,5
29 Maluku Utara	825	1.555	1,2	1,6
30 Papua	10.589	19.590	4,7	4,1
Indonesia	974.930	960.773	6,3	5,8

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013

Lampiran 20

Jumlah Rumah Tangga Pertanian yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Perikanan 2003 dan 2013

Provinsi	Jumlah RTP yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Perikanan		Persentase RTP Perikanan Terhadap Jumlah Total RTP Menurut Sumber Penghasilan Utama (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	6.623	20.799	6,8	4,6
2 Sumatera Utara	33.701	30.879	2,6	3,3
3 Sumatera Barat	14.912	8.792	3,6	2,5
4 Riau	38.743	41.629	9,5	8,4
5 Jambi	6.066	6.037	2,1	1,8
6 Sumatera Selatan	22.285	10.868	2,9	1,3
7 Bengkulu	3.485	2.607	1,7	1,3
8 Lampung	30.811	19.189	4,0	2,2
9 Bangka Belitung	13.090	9.842	23,8	16,1
10 DKI Jakarta	3.439	2.557	54,8	43,2
11 Jawa Barat	67.990	44.635	4,6	2,6
12 Jawa Tengah	70.520	43.803	3,4	2,0
13 DI Yogyakarta	267	1.422	0,2	0,7
14 Jawa Timur	110.531	83.485	3,9	2,9
15 Banten	11.083	16.251	2,6	4,5
16 Bali	7.525	10.387	3,6	5,5
17 Nusa Tenggara Barat	22.361	22.824	6,0	5,6
18 Nusa Tenggara Timur	13.669	18.588	2,5	2,9
19 Kalimantan Barat	20.340	13.125	4,9	2,7
20 Kalimantan Tengah	14.303	15.492	6,8	8,7
21 Kalimantan Selatan	31.258	19.380	10,8	7,0
22 Kalimantan Timur	20.029	32.120	13,2	19,2
23 Sulawesi Utara	18.816	13.127	9,3	8,5
24 Sulawesi Tengah	18.112	26.109	6,3	9,5
25 Sulawesi Selatan	75.493	65.666	8,3	7,3
26 Sulawesi Tenggara	29.778	28.190	14,5	14,7
27 Gorontalo	7.715	7.386	10,7	9,0
28 Maluku	7.955	17.237	7,0	13,7
29 Maluku Utara	3.231	6.061	4,5	6,2
30 Papua	12.013	31.828	5,3	6,7
Indonesia	736.144	670.279	4,7	4,0

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013

Lampiran 21

Jumlah Rumah Tangga Pertanian yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Buruh Subsektor Tanaman Padi dan Palawija 2003 dan 2013

Provinsi	Jumlah RTP yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Buruh Tanaman Padi dan Palawija		Persentase RTP Buruh Tan Padi dan Palawija Terhadap Jumlah Total RTP Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagai Buruh (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	0	15.214	0,0	31,2
2 Sumatera Utara	65.152	28.915	52,3	27,0
3 Sumatera Barat	40.082	43.629	56,0	55,8
4 Riau	886	1.002	3,7	1,9
5 Jambi	2.302	3.345	13,0	9,6
6 Sumatera Selatan	15.903	6.275	48,1	17,3
7 Bengkulu	4.907	4.240	40,0	15,1
8 Lampung	30.486	53.106	39,4	47,6
9 Bangka Belitung	57	63	0,8	0,5
10 DKI Jakarta	0	0	0,0	0,0
11 Jawa Barat	274.868	185.687	79,5	69,9
12 Jawa Tengah	269.964	224.401	78,2	68,2
13 DI Yogyakarta	9.171	12.287	88,7	78,5
14 Jawa Timur	263.085	395.707	47,4	69,8
15 Banten	18.525	18.356	75,3	65,3
16 Bali	4.347	2.961	33,3	14,7
17 Nusa Tenggara Barat	20.749	32.098	44,8	76,1
18 Nusa Tenggara Timur	2.269	8.128	44,2	67,1
19 Kalimantan Barat	4.100	5.869	15,6	15,2
20 Kalimantan Tengah	715	1.831	6,4	8,3
21 Kalimantan Selatan	11.848	7.610	59,1	27,0
22 Kalimantan Timur	1.103	662	22,4	6,0
23 Sulawesi Utara	8.188	6.158	43,0	28,0
24 Sulawesi Tengah	3.891	7.264	28,7	25,1
25 Sulawesi Selatan	11.307	11.019	47,0	34,2
26 Sulawesi Tenggara	548	1.885	10,9	18,3
27 Gorontalo	2.124	2.866	73,5	56,6
28 Maluku	110	35	27,3	1,5
29 Maluku Utara	294	46	8,5	1,2
30 Papua	136	189	14,7	4,9
Indonesia	1.067.117	1.080.848	57,8	54,1

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013

Lampiran 22

Jumlah RTP yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Buruh Subsektor Tanaman Hortikultura 2003 dan 2013

Provinsi	Jumlah RTP yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Buruh Tanaman Hortikultura		Persentase RTP Buruh Hortikultura Terhadap Total RTP Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagai Buruh (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	9	471	0,8	1,0
2 Sumatera Utara	8.010	7.595	6,4	7,1
3 Sumatera Barat	6.751	7.509	9,4	9,6
4 Riau	219	115	0,9	0,2
5 Jambi	777	2.836	4,4	8,1
6 Sumatera Selatan	4.948	689	15,0	1,9
7 Bengkulu	265	756	2,2	2,7
8 Lampung	3.155	1.505	4,1	1,4
9 Bangka Belitung	0	83	0,0	0,6
10 DKI Jakarta	0	0	0,0	0,0
11 Jawa Barat	19.792	35.619	5,7	13,4
12 Jawa Tengah	19.952	39.004	5,8	11,9
13 DI Yogyakarta	131	940	1,3	6,0
14 Jawa Timur	60.654	39.515	10,9	7,0
15 Banten	2.482	720	10,1	2,6
16 Bali	1.609	4.474	12,3	22,2
17 Nusa Tenggara Barat	4.116	1.982	8,9	4,7
18 Nusa Tenggara Timur	0	71	0,0	0,6
19 Kalimantan Barat	1.001	931	3,8	2,4
20 Kalimantan Tengah	131	450	1,2	2,0
21 Kalimantan Selatan	1.656	1.135	8,3	4,0
22 Kalimantan Timur	35	229	0,7	2,1
23 Sulawesi Utara	1.171	2.723	6,2	12,4
24 Sulawesi Tengah	0	304	0,0	1,1
25 Sulawesi Selatan	1.386	401	5,8	1,2
26 Sulawesi Tenggara	0	114	0,0	1,1
27 Gorontalo	119	0	4,1	0,0
28 Maluku	24	76	6,0	3,2
29 Maluku Utara	101	15	2,9	0,4
30 Papua	0	154	0,0	4,0
Indonesia	138.494	150.416	7,5	7,5

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013

Analisis Tematik ST2013 Subsektor Transformasi Struktural Usahatani dan Petani Indonesia

Lampiran 23

Jumlah RTP yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Buruh Subsektor Tanaman Perkebunan 2003 dan 2013

Provinsi	Jumlah RTP yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Buruh Tanaman Perkebunan		Persentase RTP Buruh Tan. Perkebunan Terhadap Jumlah Total RTP Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagai Buruh (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	606	24.496	56,0	50,2
2 Sumatera Utara	32.130	55.983	25,8	52,3
3 Sumatera Barat	8.723	19.912	12,2	25,5
4 Riau	17.921	44.605	74,0	85,6
5 Jambi	11.460	27.578	64,8	78,8
6 Sumatera Selatan	7.020	27.704	21,2	76,4
7 Bengkulu	5.711	21.934	46,5	78,3
8 Lampung	25.168	49.283	32,6	44,2
9 Bangka Belitung	3.322	10.621	49,0	82,4
10 DKI Jakarta	0	0	0,0	0,0
11 Jawa Barat	26.351	17.958	7,6	6,8
12 Jawa Tengah	28.755	25.077	8,3	7,6
13 DI Yogyakarta	327	1.048	3,2	6,7
14 Jawa Timur	32.876	82.981	5,9	14,6
15 Banten	1.098	3.705	4,5	13,2
16 Bali	3.522	8.433	27,0	41,9
17 Nusa Tenggara Barat	3.807	5.698	8,2	13,5
18 Nusa Tenggara Timur	563	1.508	11,0	12,4
19 Kalimantan Barat	8.358	28.026	31,9	72,5
20 Kalimantan Tengah	7.325	16.329	65,1	73,9
21 Kalimantan Selatan	1.791	16.137	8,9	57,2
22 Kalimantan Timur	916	8.276	18,6	75,2
23 Sulawesi Utara	5.809	9.920	30,5	45,1
24 Sulawesi Tengah	6.393	17.712	47,2	61,2
25 Sulawesi Selatan	5.213	9.238	21,7	28,6
26 Sulawesi Tenggara	332	4.164	6,6	40,3
27 Gorontalo	213	1.105	7,4	21,8
28 Maluku	0	1.264	0,0	53,7
29 Maluku Utara	2.537	3.390	73,5	85,8
30 Papua	590	1.667	63,8	43,3
Indonesia	248.837	545.752	13,5	27,3

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013

Lampiran 24

Jumlah Rumah Tangga Pertanian yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Buruh Peternakan 2003 dan 2013

Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Pertanian yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Buruh Peternakan		Persentase RTP Buruh Peternakan Terhadap Jumlah Total RTP Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagai Buruh (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	0	81	0,0	0,2
2 Sumatera Utara	12.939	2.901	10,4	2,7
3 Sumatera Barat	12.615	923	17,6	1,2
4 Riau	169	493	0,7	0,9
5 Jambi	20	262	0,1	0,7
6 Sumatera Selatan	2.191	194	6,6	0,5
7 Bengkulu	0	26	0,0	0,1
8 Lampung	91	1.633	0,1	1,5
9 Bangka Belitung	0	67	0,0	0,5
10 DKI Jakarta	0	0	0,0	0,0
11 Jawa Barat	5.299	8.498	1,5	3,2
12 Jawa Tengah	3.285	7.735	1,0	2,4
13 DI Yogyakarta	222	647	2,1	4,1
14 Jawa Timur	144.295	14.796	26,0	2,6
15 Banten	968	1.060	3,9	3,8
16 Bali	181	442	1,4	2,2
17 Nusa Tenggara Barat	12.028	343	26,0	0,8
18 Nusa Tenggara Timur	0	200	0,0	1,7
19 Kalimantan Barat	298	354	1,1	0,9
20 Kalimantan Tengah	0	94	0,0	0,4
21 Kalimantan Selatan	2.978	548	14,9	1,9
22 Kalimantan Timur	237	84	4,8	0,8
23 Sulawesi Utara	88	95	0,5	0,4
24 Sulawesi Tengah	121	291	0,9	1,0
25 Sulawesi Selatan	2.824	864	11,7	2,7
26 Sulawesi Tenggara	0	7	0,0	0,1
27 Gorontalo	0	0	0,0	0,0
28 Maluku	0	0	0,0	0,0
29 Maluku Utara	0	27	0,0	0,7
30 Papua	0	305	0,0	7,9
Indonesia	200.849	42.970	10,9	2,1

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013

Lampiran 25

Jumlah Rumah Tangga Pertanian yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Buruh Perikanan 2003 dan 2013

Provinsi	Jumlah RTP yang Sumber Penghasilan Utamanya Berasal dari Buruh Perikanan		Persentase RTP Buruh Perikanan Terhadap Jumlah Total RTP Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagai Buruh (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	145	4.867	13,4	10,0
2 Sumatera Utara	1.436	5.668	1,2	5,3
3 Sumatera Barat	930	3.156	1,3	4,0
4 Riau	3.161	1.393	13,0	2,7
5 Jambi	368	96	2,1	0,3
6 Sumatera Selatan	307	80	0,9	0,2
7 Bengkulu	180	567	1,5	2,0
8 Lampung	2.552	1.307	3,3	1,2
9 Bangka Belitung	1.378	411	20,3	3,2
10 DKI Jakarta	0	40	0,0	100,0
11 Jawa Barat	3.744	3.294	1,1	1,2
12 Jawa Tengah	8.954	14.739	2,6	4,5
13 DI Yogyakarta	0	171	0,0	1,1
14 Jawa Timur	8.176	15.297	1,5	2,7
15 Banten	309	1.348	1,3	4,8
16 Bali	1.003	2.494	7,7	12,4
17 Nusa Tenggara Barat	1.881	1.592	4,1	3,8
18 Nusa Tenggara Timur	1.408	1.938	27,4	16,0
19 Kalimantan Barat	1.192	880	4,5	2,3
20 Kalimantan Tengah	247	213	2,2	1,0
21 Kalimantan Selatan	811	998	4,0	3,5
22 Kalimantan Timur	880	221	17,9	2,0
23 Sulawesi Utara	1.814	1.990	9,5	9,1
24 Sulawesi Tengah	1.032	1.499	7,6	5,2
25 Sulawesi Selatan	2.025	6.106	8,4	18,9
26 Sulawesi Tenggara	414	2.078	8,2	20,1
27 Gorontalo	200	605	6,9	11,9
28 Maluku	144	575	35,7	24,4
29 Maluku Utara	337	366	9,8	9,3
30 Papua	50	311	5,4	8,1
Indonesia	45.078	74.300	2,4	3,7

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013

Lampiran 26

Rata-rata Pendapatan per Rumah Tangga Pertanian menurut Sumber Pendapatan Usaha SubSektor Tanaman Padi & Palawija Selama Setahun yang Lalu (ribu rupiah)

Provinsi	Rata-rata Pendapatan Per Rumah Tangga Pertanian Subsektor Tanaman Padi & Palawija		Persentase Rata-rata Pendapatan Per RTP Subsektor Tanaman Padi & Palawija Terhadap Jumlah Total Pendapatan RTP (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	974	3.566	15,8	33,5
2 Sumatera Utara	1.365	3.220	24,6	20,7
3 Sumatera Barat	1.459	3.587	30,6	26,9
4 Riau	449	626	4,1	2,9
5 Jambi	872	1.413	10,4	6,1
6 Sumatera Selatan	1.689	3.501	23,6	15,2
7 Bengkulu	1.131	1.870	21,0	10,9
8 Lampung	1.433	4.640	41,8	32,9
9 Bangka Belitung	137	424	2,2	2,6
10 DKI Jakarta	150	1.161	2,3	6,0
11 Jawa Barat	1.408	5.430	51,3	52,5
12 Jawa Tengah	1.156	3.587	45,2	44,7
13 DI Yogyakarta	624	2.582	30,5	34,8
14 Jawa Timur	1.325	4.683	44,3	44,6
15 Banten	1.728	4.913	53,8	51,3
16 Bali	1.113	2.638	27,1	22,0
17 Nusa Tenggara Barat	1.542	4.861	45,5	45,3
18 Nusa Tenggara Timur	1.421	3.071	34,0	34,0
19 Kalimantan Barat	1.080	2.556	19,3	15,5
20 Kalimantan Tengah	2.132	2.489	25,9	15,1
21 Kalimantan Selatan	1.137	3.615	31,4	28,7
22 Kalimantan Timur	2.162	4.109	24,3	19,6
23 Sulawesi Utara	1.506	2.847	26,1	18,7
24 Sulawesi Tengah	975	2.899	15,0	21,7
25 Sulawesi Selatan	1.492	4.752	30,0	37,0
26 Sulawesi Tenggara	1.063	2.642	16,4	22,5
27 Gorontalo	1.618	4.050	37,4	27,5
28 Maluku	1.293	2.766	22,2	22,3
29 Maluku Utara	1.083	1.518	17,8	10,0
30 Papua	2.283	4.753	32,8	25,4
Indonesia	1.314	3.991	32,0	32,2

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013

Lampiran 27

Rata-rata Pendapatan per Rumah Tangga Pertanian menurut Sumber Pendapatan Usaha Subsektor Hortikultura Selama Setahun yang Lalu (ribu rupiah)

Provinsi	Rata-rata Pendapatan Per Rumah Tangga Pertanian Subsektor Hortikultura		Persentase Rata-rata Pendapatan Per RTP Subsektor Hortikultura Terhadap Jumlah Total Pendapatan RTP (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	846	856	13,7	8,0
2 Sumatera Utara	612	1.467	11,0	9,4
3 Sumatera Barat	694	1.634	14,5	12,3
4 Riau	405	1.003	3,7	4,6
5 Jambi	625	1.374	7,5	6,0
6 Sumatera Selatan	462	592	6,5	2,6
7 Bengkulu	397	917	7,4	5,3
8 Lampung	212	615	6,2	4,4
9 Bangka Belitung	323	797	5,1	4,8
10 DKI Jakarta	1.789	4.682	27,6	24,2
11 Jawa Barat	442	1.737	16,1	16,8
12 Jawa Tengah	391	1.332	15,3	16,6
13 DI Yogyakarta	243	1.019	11,9	13,7
14 Jawa Timur	329	1.357	11,0	12,9
15 Banten	560	785	17,5	8,2
16 Bali	719	2.033	17,5	17,0
17 Nusa Tenggara Barat	279	1.378	8,2	12,8
18 Nusa Tenggara Timur	315	519	7,5	5,7
19 Kalimantan Barat	344	639	6,2	3,9
20 Kalimantan Tengah	686	1.059	8,3	6,4
21 Kalimantan Selatan	332	790	9,2	6,3
22 Kalimantan Timur	1.094	1.851	12,3	8,8
23 Sulawesi Utara	669	1.434	11,6	9,4
24 Sulawesi Tengah	191	845	2,9	6,3
25 Sulawesi Selatan	211	736	4,2	5,7
26 Sulawesi Tenggara	315	589	4,9	5,0
27 Gorontalo	620	1.203	14,3	8,2
28 Maluku	585	1.278	10,1	10,3
29 Maluku Utara	453	1.079	7,4	7,1
30 Papua	831	2.837	11,9	15,2
Indonesia	415	1.232	10,1	9,9

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013

Lampiran 28

Rata-rata Pendapatan per Rumah Tangga Pertanian menurut Sumber Pendapatan Usaha Subsektor Tanaman Perkebunan Selama Setahun yang Lalu (ribu rupiah)

Provinsi	Rata-rata Pendapatan Per Rumah Tangga Pertanian Subsektor Tanaman Perkebunan		Persentase Rata-rata Pendapatan Per RTP Subsektor Tanaman Perkebunan Terhadap Jumlah Total Pendapatan RTP (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	3.011	3.772	48,7	35,4
2 Sumatera Utara	2.818	7.900	50,8	50,8
3 Sumatera Barat	1.637	5.565	34,3	41,8
4 Riau	7.929	12.169	71,6	56,2
5 Jambi	6.006	18.801	71,8	81,7
6 Sumatera Selatan	4.421	17.476	61,7	75,9
7 Bengkulu	3.221	12.709	59,9	73,9
8 Lampung	1.094	6.268	31,9	44,4
9 Bangka Belitung	3.802	11.482	60,0	69,3
10 DKI Jakarta	15	6	0,2	0,0
11 Jawa Barat	207	533	7,5	5,2
12 Jawa Tengah	240	821	9,4	10,2
13 DI Yogyakarta	146	464	7,1	6,3
14 Jawa Timur	360	1.421	12,0	13,5
15 Banten	323	951	10,1	9,9
16 Bali	934	2.545	22,8	21,3
17 Nusa Tenggara Barat	586	1.355	17,3	12,6
18 Nusa Tenggara Timur	891	1.788	21,3	19,8
19 Kalimantan Barat	3.173	11.657	56,8	70,5
20 Kalimantan Tengah	2.533	9.212	30,7	55,9
21 Kalimantan Selatan	1.062	5.327	29,3	42,2
22 Kalimantan Timur	1.374	4.658	15,4	22,2
23 Sulawesi Utara	2.474	7.391	42,9	48,6
24 Sulawesi Tengah	4.008	6.743	61,5	50,5
25 Sulawesi Selatan	1.799	3.795	36,1	29,5
26 Sulawesi Tenggara	3.352	4.006	51,8	34,2
27 Gorontalo	779	1.748	18,0	11,9
28 Maluku	2.208	4.928	38,0	39,7
29 Maluku Utara	2.883	9.787	47,4	64,2
30 Papua	975	1.540	14,0	8,2
Indonesia	1.336	4.157	32,5	33,5

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013

Lampiran 29

Rata-rata Pendapatan per Rumah Tangga Pertanian menurut Sumber Pendapatan Usaha Subsektor Peternakan Selama Setahun yang Lalu (ribu rupiah)

Provinsi	Rata-rata Pendapatan Per Rumah Tangga Pertanian Subsektor Peternakan		Persentase Rata-rata Pendapatan Per RTP Subsektor Peternakan Terhadap Jumlah Total Pendapatan RTP (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	189	1.152	3,1	10,8
2 Sumatera Utara	291	962	5,2	6,2
3 Sumatera Barat	516	1.373	10,8	10,3
4 Riau	183	1.134	1,7	5,2
5 Jambi	222	674	2,7	2,9
6 Sumatera Selatan	120	532	1,7	2,3
7 Bengkulu	249	856	4,6	5,0
8 Lampung	237	1.249	6,9	8,9
9 Bangka Belitung	38	317	0,6	1,9
10 DKI Jakarta	110	2.895	1,7	14,9
11 Jawa Barat	165	1.192	6,0	11,5
12 Jawa Tengah	274	1.168	10,7	14,6
13 DI Yogyakarta	95	2.306	4,6	31,1
14 Jawa Timur	495	1.901	16,5	18,1
15 Banten	168	883	5,2	9,2
16 Bali	810	3.595	19,7	30,0
17 Nusa Tenggara Barat	469	1.880	13,9	17,5
18 Nusa Tenggara Timur	1.128	2.274	27,0	25,2
19 Kalimantan Barat	289	648	5,2	3,9
20 Kalimantan Tengah	273	996	3,3	6,0
21 Kalimantan Selatan	351	1.031	9,7	8,2
22 Kalimantan Timur	466	1.494	5,2	7,1
23 Sulawesi Utara	160	1.497	2,8	9,8
24 Sulawesi Tengah	135	1.028	2,1	7,7
25 Sulawesi Selatan	438	1.406	8,8	10,9
26 Sulawesi Tenggara	293	1.301	4,5	11,1
27 Gorontalo	150	2.069	3,5	14,0
28 Maluku	94	729	1,6	5,9
29 Maluku Utara	140	866	2,3	5,7
30 Papua	620	4.793	8,9	25,6
Indonesia	338	1.489	8,2	12,0

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013

Lampiran 30

Rata-rata Pendapatan per Rumah Tangga Pertanian menurut Sumber Pendapatan Usaha Subsektor Perikanan Selama Setahun yang Lalu (ribu rupiah)

Provinsi	Rata-rata Pendapatan Per Rumah Tangga Pertanian Subsektor Perikanan		Persentase Rata-rata Pendapatan Per RTP Subsektor Perikanan Terhadap Jumlah Total Pendapatan RTP (%)	
	2003	2013	2003	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Aceh	887	1.103	14,4	10,4
2 Sumatera Utara	367	1.772	6,6	11,4
3 Sumatera Barat	279	645	5,8	4,8
4 Riau	1.710	6.141	15,4	28,3
5 Jambi	209	485	2,5	2,1
6 Sumatera Selatan	279	452	3,9	2,0
7 Bengkulu	235	593	4,4	3,4
8 Lampung	294	666	8,6	4,7
9 Bangka Belitung	1.601	3.088	25,3	18,6
10 DKI Jakarta	4.388	10.475	67,8	54,0
11 Jawa Barat	307	542	11,2	5,2
12 Jawa Tengah	178	337	7,0	4,2
13 DI Yogyakarta	435	127	21,3	1,7
14 Jawa Timur	258	471	8,6	4,5
15 Banten	226	1.424	7,0	14,9
16 Bali	365	744	8,9	6,2
17 Nusa Tenggara Barat	209	910	6,2	8,5
18 Nusa Tenggara Timur	144	874	3,4	9,7
19 Kalimantan Barat	372	615	6,7	3,7
20 Kalimantan Tengah	905	1.664	11,0	10,1
21 Kalimantan Selatan	523	1.433	14,4	11,4
22 Kalimantan Timur	2.633	7.666	29,6	36,5
23 Sulawesi Utara	712	1.590	12,4	10,5
24 Sulawesi Tengah	785	1.391	12,1	10,4
25 Sulawesi Selatan	893	1.778	17,9	13,8
26 Sulawesi Tenggara	985	2.630	15,2	22,5
27 Gorontalo	544	5.404	12,6	36,7
28 Maluku	1.323	2.349	22,7	18,9
29 Maluku Utara	741	1.417	12,2	9,3
30 Papua	1.081	3.576	15,5	19,1
Indonesia	412	918	10,0	7,4

Sumber: BPS, Hasil Pencacahan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian ST2003 dan ST2013

Analisis Tematik ST2013 Subsektor Transformasi Struktural Usahatani dan Petani Indonesia

Lampiran 31

Struktur Ongkos Usaha Tani Tanaman Padi dan Palawija

A. SOUT Tanaman Padi Sawah dan Ladang

No	Uraian	Padi Sawah			Padi Ladang		
		2004	2008 (Dengan Imputasi)	2008 (Tanpa Imputasi)	2013	2004	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Produksi (000 Rp)	6153			17200	3847	10200
a	Utama (000 Rp)	6113				3789	
b	Ikutan (000 Rp)	40				58	
2	Ongkos Produksi (000 Rp)	2704	10834,27	5932,72	12700	1335	7800
a	Benih (%)	7,2	1,90	3,46	3,21	15,13	3,61
b	Pupuk (%)	30,0	7,26	13,26	10,4	33,78	7,76
c	Pestisida (%)	3,3	1,67	3,05	1,85	3,15	1,73
d	Tenaga Kerja Dibayar (%)	28,9	30,14	26,73	48.23*)	23,52	62.36*)
e	Sewa Lahan (%)	6,4	34,10	12,37	29,86	2,02	17,74
f	Sewa/pemeliharaan alat (%)	2,4	6,11	7,80	2,59	1,95	2,24
g	Jasa Pertanian (%)	11,8	14,34	26,18		7,79	
h	Lainnya (%)	9,9	4,49	7,15	3,85	12,66	4,56
	BCR	2,28			1,35	2,88	1,31
) Tenaga Kerja + Jasa Pertanian	40,72	44,48	52,91	48.23)	31,31	62.36*)

Sumber: Struktur Ongkos Usaha Pertanian 2003 dan 2013

B. SOUT Tanaman Jagung dan Kedelai

No	Uraian	Jagung			Kedelai				
		2004	2009 (Dengan Imputasi)	2009 (Tanpa Imputasi)	2013	2004	2010 (Dengan Imputasi)	2010 (Tanpa Imputasi)	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Produksi (000 Rp)	3578			12000	3637			9000
a	Utama (000 Rp)	2515				3613			
b	Ikutan (000 Rp)	63				24			
2	Ongkos Produksi (000 Rp)	1266	7562,12	3089,64	9100	1456	9515,48	4413,96	9100
a	Benih (%)	13,90	6,76	16,55	7,97	14,63	4,06	8,76	6,87
b	Pupuk (%)	36,97	9,05	22,15	11,99	17,10	12,81	27,62	4,75
c	Pestisida (%)	1,66	0,75	1,83	1,21	6,25	2,82	6,07	2,2
d	Tenaga Kerja Dibayar (%)	22,35	72,69	43,98	44.93*)	30,84	52,48	33,56	44.82*)
e	Sewa Lahan (%)	3,63	4,63	1,35	27,71	7,76	19,27	6,19	35,64
f	Sewa/pemeliharaan alat (%)	1,66	0,89	1,96	1,89	1,65	1,49	2,74	1,8
g	Jasa Pertanian (%)	5,45	3,56	8,71		4,53	4,9	10,57	
h	Lainnya (%)	14,38	1,42	3,48	4,29	17,24	2,17	4,49	3,92
	BCR	2,83			1,32	2,50			0,99
) Tenaga Kerja + Jasa Pertanian	27,80	76,25	52,69	44.93)	35,37	57,38	44,13	44.82*)

Sumber: Struktur Ongkos Usaha Pertanian 2003 dan 2013

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telp.: 021 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: 021 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id

ISBN 978-979-064-870-8

